INDO-PACIFIC DEFENSE

VOLUME 44, TERBITAN KE-3, 2019

FORUM

Senjata Misinformasi Massal

Kampanye Pengaruh Partai Komunis Tiongkok

tajuk utama

10 Uang untuk Mekong
Jepang memainkan peran pembiayaan yang menonjol dalam pembangunan dan pelestarian kawasan.

16 Perang Politik
Republik Rakyat Tiongkok mencoba memengaruhi pemerintah asing untuk mencapai tujuan politik-militer.

22 Proliferator Propaganda
Institut Konfusius, di bawah perlindungan pemerintah Tiongkok, menyusup ke berbagai negara di seluruh dunia dengan cara yang semakin berbahaya dan angkuh.

28 Mengindoktrinasi Militer Tiongkok
Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok beralih menuju akar propagandis, ideologi partai.

32 Rehab Teroris
Pendekatan sosial dan budaya memberikan kesempatan kedua bagi teroris di Indonesia.

40 Dialog Perairan Dalam
India dapat memperluas jangkauan maritim dengan membangun pelabuhan Indonesia.

44 Hari Baru bagi Pertahanan Jepang
Jepang memperkuat arsitektur pertahanan nasionalnya di tengah berubahnya lingkungan keamanan.

48 Simbol Kebebasan
Komandan Angkatan Darat A.S. di Jepang membagikan bagaimana penyelamatan keluarganya dari Saigon memicu keinginannya untuk melayani.

50 Dentuman Sonik
Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia bersaing untuk memenangkan kompetisi persenjataan hipersonik.

54 Peran Australia di Indo-Pasifik
Membangun fondasi kesuksesan di seluruh kawasan.

bagian-bagian

4 Indo-Pasifik Selayang Pandang

5 Kontributor

6 Seluruh Kawasan
Berita dari Indo-Pasifik.

8 Perkembangan Teroris
Asia Tenggara meningkatkan perjuangan melawan ancaman militan.

58 Suara
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai kontribusi Pasukan Bela Diri Jepang terhadap perdamaian.

62 Budaya dan Adat Istiadat
Pria Kamboja mengelola sekolah tempat anak-anak membiayai pendidikan mereka dengan bahan limbah daur ulang.

64 Cakrawala Dunia
Inggris bergerak untuk melarang keanggotaan di Hezbollah; Mesir mengungkap makam pejabat Dinasti Kelima; kelompok pencegahan epidemi berinvestasi dalam teknologi printer vaksin.

65 Renungan
Para ilmuwan mendokumentasikan perubahan bawah air di perairan Seychelles.

66 Kata Terakhir
Prajurit Angkatan Bersenjata Singapura dan prajurit komando anti-teror Indonesia berpartisipasi dalam latihan militer mereka masing-masing.

DI SAMPUL MAJALAH:
Ilustrasi ini menggambarkan pengerahan persenjataan Partai Komunis Tiongkok terhadap segala sesuatu mulai dari kata-kata dan angka-angka hingga politik dan teknologi untuk memanipulasi pikiran, pemerintah, dan negara.

Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi *Indo-Pacific Defense FORUM* tentang proyeksi kekuatan.

Proyeksi kekuatan adalah kemampuan suatu negara untuk menggunakan sebagian atau semua instrumen kekuatan nasionalnya guna memengaruhi pihak lain untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu.

Terbitan *FORUM* ini membahas proyeksi kekuatan dari banyak perspektif. Dr. Clive Hamilton, seorang penulis dan profesor etika publik Australia di Charles Sturt University Canberra, menelaah bagaimana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan perang politik melawan negara-negara asing untuk memajukan agenda ekspansionisme dan mengejar dominasi global. Artikel-artikel terkait membahas taktik khusus yang digunakan RRT untuk memengaruhi prajurit Tiongkok dan warga negara asing.

Untuk menghadapi agresi dan menangkal tantangan terhadap kepentingan bersama, sekutu dan negara mitra harus bekerja sama dalam upaya keamanan. Artikel yang ditulis oleh staf menunjukkan bagaimana Jepang menawarkan alternatif investasi yang dapat diandalkan terhadap rencana infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) RRT untuk pengembangan kawasan Mekong.

Selain itu dalam terbitan ini, Duta Besar Jane M. Hardy, konsul jenderal Konsulat Jenderal Australia, Honolulu, membagikan pendekatan Australia untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Australia memperkuat keterlibatan bilateral dan multilateral dan menjalin hubungan kritis untuk meningkatkan interoperabilitas dan melawan negara-negara agresor dan ancaman keamanan nontradisional.

Sekutu dan negara mitra di Indo-Pasifik menggunakan berbagai kombinasi instrumen diplomatik, militer, ekonomi, dan informasi untuk mempromosikan keamanan regional dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kita harus terus bekerja bersama untuk memperkuat kemampuan respons dan kerja sama keamanan guna menangkal tantangan terhadap kepentingan bersama kolektif kita dan mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan yang telah menghadirkan kemakmuran di kawasan ini selama 70 tahun terakhir.

Saya berharap edisi ini menggugah pembicaraan regional dan memajukan solusi keamanan. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf *FORUM* di **ipdf@ipdefenseforum.com** untuk menyampaikan perspektif Anda.

Salam,

P. S. DAVIDSON
Laksamana, Angkatan Laut A.S.
Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S.

IPD FORUM

Proyeksi Kekuatan
Volume 44, Terbitan ke-3, 2019

KEPEMIMPINAN USINDOPACOM

PHILIP S. DAVIDSON
Laksamana AL A.S.
Komandan

BRYAN P. FENTON
Letnan Jenderal, A.S.
Wakil Komandan

MICHAEL A. MINIHAN
Marsekal Muda, AU A.S.
Kepala Staf

STEPHEN T. KOEHLER
Laksamana Muda, AL A.S.
Direktur Operasi

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

CHRISTIAN C. NICOLAS
Mayor, AS
Manajer IPD Forum

HUBUNGI KAMI

IPD FORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 USA

ipdefenseforum.com
email:
ipdf@ipdefenseforum.com

Indo-Pacific Defense FORUM adalah sebuah majalah militer profesional yang diterbitkan triwulanan oleh komandan Komando Indo-Pasifik A.S. untuk menyediakan forum internasional bagi personel militer di kawasan Indo-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan atau sudut pandang komando ini atau lembaga pemerintah A.S. lainnya. Semua artikel ditulis oleh staf FORUM kecuali jika disebutkan lain. Menteri pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S.

ISSN 2333-1593 (cetak)
ISSN 2333-1607 (online)

DR. CLIVE HAMILTON adalah seorang penulis dan profesor etika publik Australia di Charles Sturt University di Canberra. Sebelum mulai memegang jabatan profesor pada tahun 2008, Hamilton menjabat selama 14 tahun sebagai direktur eksekutif The Australia Institute, kelompok cendekiawan progresif yang dia dirikan. Dia telah membuat tulisan mengenai berbagai macam topik, dan pada tahun 2018, Hamilton menerbitkan buku terbarunya, *Silent Invasion: China's Influence in Australia (Invasi Senyap: Pengaruh Tiongkok di Australia)*. Ditampilkan pada Halaman 16

ZI YANG adalah seorang analis senior di China Programme, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura. Dia memegang gelar Master of Arts di bidang studi Asia dari Georgetown University dan Bachelor of Arts di bidang urusan global dan sejarah dari George Mason University. Sebelum bergabung dengan RSIS, dia bekerja di United States Institute of Peace dan Pusat Studi Keamanan, Georgetown University.
Ditampilkan pada Halaman 28

NOOR HUDA ISMAIL merupakan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Indonesia. Dia sekarang adalah peneliti tamu di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Dia menjadi sutradara dan produser film dokumenter seperti *Jihad Selfie* (2017), *Pengantin* (2018), dan *Seeking the Imam* (2019). Untuk terbitan *FORUM* ini, dia menulis tentang pendekatan untuk merehabilitasi mantan teroris.
Ditampilkan pada Halaman 32

DUTA BESAR JANE M. HARDY adalah konsul jenderal di Konsulat Jenderal Australia, Honolulu. Dia sebelumnya menjabat sebagai asisten sekretaris Cabang Kontrol Senjata dan Kontra-Proliferasi di Divisi Keamanan Internasional Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Canberra. Sebelum memegang jabatan ini, dia menjabat sebagai duta besar Australia untuk Spanyol, Andorra, dan Guinea Khatulistiwa. Dia juga telah menulis buku dan artikel jurnal tentang seni pribumi Australia dan analisis program bantuan luar negeri.
Ditampilkan pada Halaman 54

Gabung dengan Bahasan Ini

Kami ingin mendengar dari ANDA!

Indo-Pacific Defense FORUM melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai topik-topik yang memengaruhi upaya keamanan di seluruh kawasan — mulai dari kontraterorisme hingga kerja sama internasional dan bencana alam.

FORUM membangkitkan bahasan-bahasan yang mendalam dan mendorong pertukaran gagasan yang sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-pokok bahasan atau tanggapan-tanggapan lainnya kepada kami lewat DUNIA MAYA atau ke:

Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan konten online ekstensif, dengan artikel baru yang dipasang setiap hari, di **www.ipdefenseforum.com**

Para pengunjung dapat:

- **Membaca tulisan khusus di dunia maya**
- **Menengok kembali terbitan sebelumnya**
- **Mengirim umpan balik kepada kami**
- **Meminta berlangganan**
- **Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan**

FORUM

Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa

Mari bergabung dengan kami di Facebook dan Twitter.

REUTERS

INDONESIA

SUAKA KOPI

Pada Januari 2019, Starbucks membuka toko terbesarnya di Asia Tenggara, yang dikenal sebagai Starbucks Dewata Coffee Sanctuary.

Seorang pekerja memilah biji kopi di sebuah perkebunan desa di pulau Sumatra, Indonesia.

Suaka unik ini memberikan penghormatan kepada peran penting yang dimainkan Indonesia dalam membawa kopi berkualitas kepada pelanggan, termasuk kopi Sumatra yang populer, demikian ungkap perusahaan itu dalam rilis berita. Indonesia merupakan kawasan penghasil kopi Arabika terbesar keempat di dunia.

Suaka kopi seluas lebih dari 20.000 kaki persegi di Bali itu menampilkan perkebunan pohon kopi produktif dan ruang untuk mencicipi kopi. Pelanggan dapat memulai perjalanan menikmati kopi mulai dari biji kopi hingga disajikan ke cangkir ketika mereka dapat mencoba berbagai macam kegiatan seperti mencuci, mengeringkan, dan menggaruk biji kopi hijau.

"Kami mulai memasok kopi Indonesia lebih dari empat dekade lalu dan selalu terkesan oleh rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap perjalanan kopi di setiap langkah," ujar Kevin Johnson, CEO Starbucks. Business Wire

SINGAPURA

FACEBOOK AKAN MEMBANGUN PUSAT DATA MILIARAN DOLAR

Facebook berencana untuk menginvestasikan lebih dari 14,03 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) untuk membuat pusat data di Singapura, didukung oleh energi terbarukan dan disesuaikan dengan iklim tropis negara-kota itu.

Pusat data itu, yang akan beroperasi sekitar tahun 2022, akan menampung server Facebook dan memusatkan operasi teknologi informasinya, demikian yang dikatakan Thomas Furlong, wakil presiden Facebook untuk pusat data infrastruktur itu, pada September 2018.

Lokasi seluas 170.000 meter persegi di negara-kota yang langka akan lahan itu akan terdiri dari 11 lantai dan dilengkapi dengan fitur khusus untuk mengatasi suhu panas, yang jarang turun di bawah 25 derajat Celsius.

Ini mencakup sistem pendingin canggih yang baru, yang menggunakan air dan bukannya udara dan akan bekerja dengan lebih baik dalam kelembapan, serta fasad bangunan yang terbuat dari bahan ringan berlubang untuk memungkinkan aliran udara yang lebih baik.

Fasilitas yang dibuat secara khusus senilai 14,32 triliun rupiah (1,02 miliar dolar A.S.) itu akan menjadi pusat data ke-15 Facebook di seluruh dunia. Furlong mengatakan bahwa Facebook, yang memiliki 2,23 miliar pengguna aktif setiap bulan per akhir Juni 2018, memilih Singapura karena infrastrukturnya yang tangguh, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan kemudahan berbisnis dengan pemerintah.

Google, yang telah membangun dua pusat data di Singapura, mengumumkan pada September 2018 bahwa pihaknya mulai membangun pusat data ketiga, menjadikan investasinya di beberapa lokasi itu menjadi 11,93 triliun rupiah (850 juta dolar A.S.). Agence France-Presse

Tombol "suka" Facebook menyala di kantor pusat Facebook di Paris, Prancis. REUTERS

MALAYSIA

THE ASSOCIATED PRESS

REFORMASI TENAGA KERJA

Malaysia berupaya mengeliminasi perantara yang mengenakan biaya perekrutan yang sangat tinggi kepada jutaan pekerja asing sehingga membuat mereka dibebani dengan utang dan rentan terhadap eksploitasi.

Dari pabrik hingga lokasi konstruksi dan perkebunan, negara Asia Tenggara itu sangat bergantung pada pekerja asing untuk pekerjaan yang biasanya dijauhi oleh penduduk setempat.

Banyak pekerja asing yang tiba di sana dengan meminjam uang dalam jumlah besar untuk membayar agen perekrutan, yang berarti mereka harus bekerja selama bertahun-tahun tanpa mengantongi uang sepeser pun — suatu bentuk perbudakan modern yang dikenal sebagai jeratan utang.

Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia membuat kesepakatan dengan Nepal untuk merekrut langsung para pekerja di sana tanpa melalui agen. Kesepakatan itu muncul setelah Nepal menghentikan sementara pengiriman pekerja karena kekhawatiran akan perlakuan terhadap mereka.

"Ini bertujuan untuk mengekang perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja," ungkap Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Kulasegaran.

"Mereka tidak boleh berada dalam situasi jeratan utang di negara ini dan terjebak dalam lingkaran setan untuk melunasi utang mereka."

Berdasarkan perjanjian itu, yang mulai berlaku pada akhir Oktober 2018, pekerja Nepal akan dipekerjakan berdasarkan skema pemerintah-ke-pemerintah. Pengusaha Malaysia harus menanggung semua biaya rekrutmen, termasuk tiket pesawat, serta biaya visa dan pemeriksaan kesehatan.

Kulasegaran mengatakan bahwa Malaysia sedang menegosiasikan perjanjian serupa dengan Bangladesh, Indonesia, dan Vietnam.

Statistik pemerintah menunjukkan bahwa Bangladesh, Indonesia, dan Nepal merupakan penyedia utama bagi hampir 2 juta pekerja migran yang terdaftar di Malaysia. Ada jutaan lagi pekerja migran tanpa izin kerja.

Seorang pria Qatar menunjukkan paspornya dengan izin kerja di Departemen Tenaga Kerja Asing di Kathmandu, Nepal.

Pembuat sarung tangan terbesar di dunia, perusahaan Top Glove di Malaysia, mengatakan pada Desember 2018 bahwa pihaknya akan memutuskan hubungan dengan agen perekrutan yang tidak etis, setelah beberapa pekerja migrannya diketahui bekerja lembur secara berlebihan untuk melunasi utang.

Selama bertahun-tahun, pejuang hak buruh telah meminta Malaysia untuk mengeliminasi perantara yang mengenakan biaya hingga 20.000 ringgit Malaysia (4.790 dolar A.S.) kepada buruh migran, utang yang sering kali mereka tanggung selama bertahun-tahun untuk dilunasi.

Jeratan utang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang paling umum, yang memengaruhi lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia, demikian menurut Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reuters

Seorang Prajurit Filipina menjaga jalan menuju masjid yang hancur di daerah pertempuran utama di Kota Marawi, di pulau selatan Mindanao, pada April 2018.

Asia Tenggara mendorong perjuangan melawan

ANCAMAN MILITAN 'NYATA DAN AKTUAL'

AGENCE FRANCE-PRESSE | FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Negara-negara Asia Tenggara yang berusaha memerangi ancaman militansi telah sepakat untuk berbagi intelijen, demikian ujar menteri pertahanan Singapura, ketika dia memperingatkan bahaya "nyata dan aktual" terhadap kawasan itu.

Lebih dari setahun setelah pejuang yang terkait dengan Negara Islam merebut kota Marawi di Filipina selatan, ancaman teroris sama kuatnya seperti sebelumnya, demikian ungkap Ng Eng Hen setelah menjadi tuan rumah pertemuan para menteri pertahanan pada akhir tahun 2018.

"Sayangnya, bahkan ketika situasi di Irak dan Suriah membaik, kami memperkirakan lebih banyak pejuang asing akan datang ke sini," tambahnya.

Ng mengatakan bahwa semua 18 menteri pada pertemuan Oktober 2018 di Singapura, dari Asia Tenggara dan mitra-mitra utama di luar kawasan itu, memandang "terorisme sebagai ancaman nyata dan aktual."

Menteri Pertahanan Singapura menambahkan bahwa delegasi Asia Tenggara mengadopsi platform pembagian informasi yang diberi nama "Our Eyes" yang akan digunakan untuk membagikan intelijen seketika yang dapat segera ditindaklanjuti.

Ini terjadi setelah berbagai negara menyadari bahwa mereka telah meremehkan ancaman tersebut sebelum terjadinya serangan di Kota Marawi, ketika upaya pembangunan kembali dapat menelan biaya sekitar 14,03 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.), demikian ujarnya.

Platform yang diusulkan oleh Indonesia ini didasarkan pada aliansi pembagian intelijen yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan tiga negara lain setelah Perang Dunia II untuk memantau Uni Soviet.

Perwakilan dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadiri pertemuan keamanan tersebut, demikian pula Menteri Pertahanan A.S. saat itu Jim Mattis dan pejabat dari berbagai negara termasuk Australia, Tiongkok, India, dan Rusia.

Selama serangan tahun 2017 di Marawi, ratusan militan bersenjata yang didukung oleh pejuang asing Negara Islam menyerang dan mengambil kendali atas kota yang sebagian besar dihuni umat Muslim itu dalam upaya untuk mendirikan sebuah pangkalan di Asia Tenggara.

Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen menyampaikan pidato pembukaannya di KTT keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Singapura pada Oktober 2018.

Pasukan Filipina, didukung oleh pesawat pengintai canggih dari Amerika Serikat, mengusir kelompok militan itu setelah lima bulan pertempuran sengit yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menghancurleburkan kota itu.

Kelompok militan dari berbagai negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia dan Malaysia, terlibat dalam pertempuran itu.

Mereka yang hadir dalam pertemuan itu "merasa bahwa ini tidak boleh terjadi lagi di kota mana pun di ASEAN," ungkap Ng.

Uang untuk Mekong

Jepang memainkan peran pembiayaan yang menonjol dalam pembangunan dan pelestarian kawasan

STAF *FORUM*

Sungai Mekong yang luar biasa, yang panjangnya lebih dari 4.800 kilometer membentang dari Tiongkok melintasi lima negara Mekong yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam sebelum bermuara di Laut Cina Selatan, menyediakan makanan, air, dan transportasi bagi lebih dari 60 juta orang, dan di saat yang sama memiliki sejumlah tantangan lingkungan paling sulit di Indo-Pasifik. Dengan air terjun dan jeram sungai yang mengalir deras, Mekong menawarkan lanskap indah untuk investasi dan berfungsi sebagai jenis medan perang baru dalam perjuangan untuk memperebutkan pengaruh.

Kawasan Mekong dibanjiri investasi dari program infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Akan tetapi, selama bertahun-tahun, Jepang telah menjadi investor terkemuka di Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

"Memang ada aspek kompetitif dalam investasi Jepang di Mekong dibandingkan dengan investasi Tiongkok," ungkap Dr. Yee-Kuang Heng, seorang profesor di Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik di University of Tokyo, kepada *FORUM*. "Jepang sering kali menggunakan istilah 'infrastruktur

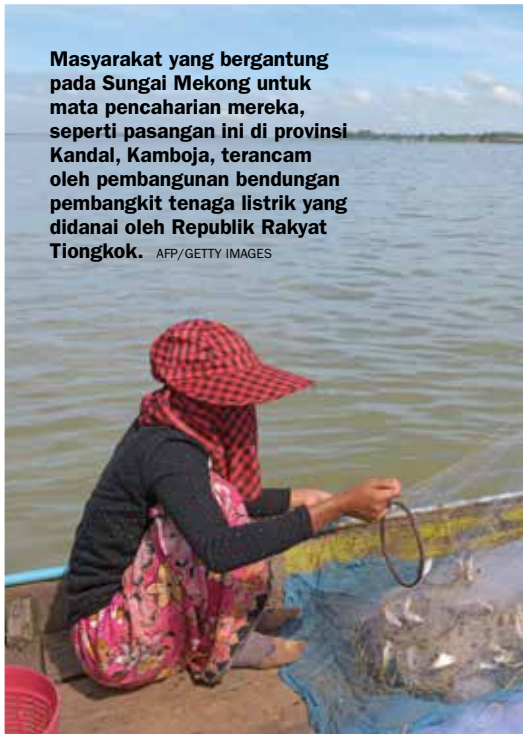

Masyarakat yang bergantung pada Sungai Mekong untuk mata pencaharian mereka, seperti pasangan ini di provinsi Kandal, Kamboja, terancam oleh pembangunan bendungan pembangkit tenaga listrik yang didanai oleh Republik Rakyat Tiongkok. AFP/GETTY IMAGES

Sungai Mekong mengular melingkari pegunungan Luang Prabang di Laos utara. Arti nama kota itu adalah "patung Buddha kerajaan."

ISTOCK

Seorang perempuan Vietnam menjual buah dan sayuran dari pasar terapung di Sungai Mekong. Mekong terkenal akan pasar terapungnya yang memungkinkan petani untuk menjual barang-barang mereka ke penyalur setempat. ISTOCK

berkualitas,' yang dilihat secara luas sebagai cara untuk membedakan proyek-proyek Jepang dari megaproyek Tiongkok yang dianggap berkualitas lebih rendah dan kurang berkelanjutan secara fiskal dan lingkungan. Mengingat meningkatnya kekhawatiran di negara-negara penerima atas diplomasi perangkap utang" dalam program OBOR RRT, "Jepang dapat dilihat sebagai pemain alternatif yang layak."

Jepang memberikan sumbangan dana publik dalam jumlah signifikan untuk mendukung pinjaman sektor swastanya dan memperkuat citranya sebagai mitra keuangan yang andal. Selama tiga tahun terakhir saja, berbagai perusahaan Jepang telah menginvestasikan setara dengan sekitar 252,6 triliun rupiah (18 miliar dolar A.S.) di kawasan Mekong, demikian menurut surat kabar *The Straits Times*, harian berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura. Sekarang, sebagai bagian dari Strategi Tokyo 2018 untuk Kerja Sama Jepang-Mekong, Jepang memperluas jejak ekonominya. Pada pertemuan tahun 2018 dengan para pemimpin Mekong, Jepang berjanji untuk membiayai 150 proyek tambahan selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan konektivitas di kawasan itu dan melestarikan lingkungan.

"Mengikuti rekam jejak dukungan tersebut, guna mewujudkan investasi swasta lebih banyak dari sebelumnya, Jepang akan memanfaatkan dana publik termasuk pinjaman luar negeri, investasi, dan bantuan pembangunan resmi (official development assistance - ODA)," ungkap Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada KTT Mekong-Jepang ke-10 yang diadakan di Tokyo pada Oktober 2018.

Investasi Jepang di Mekong dilakukan jauh sebelum prakarsa OBOR Tiongkok, meskipun investasinya sekarang secara eksplisit terkait dengan strategi Abe untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan lebih sengaja dirancang untuk melawan pengaruh RRT, demikian ujar Heng.

Visi Alternatif

Sebelum KTT Mekong-Jepang, Abe mengadakan pertemuan individu dengan para pemimpin Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Dalam pertemuan-pertemuan itu, dia membuat proposal yang sangat kontras dengan proyek-proyek RRT, yang, dalam kasus bendungan pembangkit tenaga listrik, telah dipersalahkan atas degradasi lingkungan di kawasan itu.

Abe berjanji untuk memberikan kepada Laos paket bantuan hingga 112,3 miliar rupiah (8 juta dolar A.S.) untuk mempercepat pembersihan dan penjinakan artileri militer yang belum meledak. Di Laos, jutaan sisa bahan peledak yang tersisa dari konflik Vietnam menimbulkan risiko bagi pertanian dan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyambut pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat dia tiba di KTT Mekong-Jepang ke-10 di Tokyo pada Oktober 2018. REUTERS

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menatap ketika Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memeluk Perdana Menteri Kamboja Hun Sen selama KTT Tokyo. REUTERS

pembangunan infrastruktur karena bahan peledak itu belum dimusnahkan.

"Kami sangat menghargai bantuan pembangunan resmi Jepang," ujar Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith, demikian menurut situs web Nikkei Asian Review. "Bantuan itu berkontribusi pada pembangunan ekonomi Laos."

Tokyo juga menawarkan untuk meminjamkan dana hingga 443,7 miliar rupiah (31,6 juta dolar A.S.) kepada Kamboja untuk membangun fasilitas irigasi di daerah Danau Tonle Sap. Tonle Sap merupakan perikanan darat terbesar di dunia, menghasilkan 3,9 juta ton ikan setiap tahun dengan nilai lebih dari 42,1 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.). Siklus banjir menghasilkan tanah yang subur untuk pertanian ketika air surut, dan danau itu luasnya berkembang lima kali lipat selama musim banjir. Fasilitas irigasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian padi sebanyak tiga kali lipat.

Sebanyak 150 proyek yang direncanakan Jepang untuk kawasan itu terbagi dalam tiga area fokus: membangun konektivitas, seperti memperluas fasilitas bandara di Laos dan membangun jalan baru di Myanmar; membangun masyarakat yang berfokus pada manusia, seperti menggunakan teknologi untuk meningkatkan perawatan kesehatan; dan manajemen lingkungan dan bencana, seperti proyek irigasi di Kamboja. Jepang belum memastikan nilai moneter untuk 150 proyek itu.

Meskipun mereka sering kali melakukan bisnis dengan RRT, para pemimpin Mekong menyuarakan dukungan terhadap strategi Abe untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang mempromosikan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan dan pembangunan proyek infrastruktur berkualitas. Meskipun pernyataannya ditolak oleh mahkamah internasional, RRT telah mengajukan klaim teritorial atas terumbu karang dan fitur buatan manusia di Laut Cina Selatan di wilayah yang juga diklaim oleh Vietnam, salah satu negara Mekong. Meskipun para pemimpin itu tidak menyebut nama sebuah negara, mereka menyinggung RRT dalam pernyataan bersama mereka di KTT Tokyo dengan mengatakan bahwa proyek reklamasi

tanah dan kegiatan lainnya "telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merongrong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu."

Investor Jangka Panjang di Mekong

Meskipun program OBOR RRT yang memiliki jangkauan luas baru-baru ini telah menghasilkan perhatian internasional, Jepang telah berinvestasi di berbagai negara Mekong selama bertahun-tahun.

"Perlu dicatat bahwa Jepang telah lama mendukung dan mengembangkan beberapa koridor konektivitas, misalnya, di kawasan Mekong, jauh sebelum kemunculan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative - BRI) Tiongkok," ungkap Heng. "Tokyo bukan pemain baru di blok ini, dan dengan sejarah panjang proyek-proyek ODA pasca-1945, Jepang memiliki banyak pengalaman dan keahlian."

Jepang telah berkontribusi pada Koridor Ekonomi Timur-Barat, sistem jalan, rel, dan pelabuhan terintegrasi yang menghubungkan negara-negara Mekong. Koridor Ekonomi Timur-Barat berfokus pada pembangunan jembatan dan jalan nasional yang menghubungkan Myanmar, Laos, Thailand, dan Vietnam. Proyek-proyek itu meliputi pemutakhiran pelabuhan laut Danang di Vietnam. Heng mengatakan bahwa Jepang juga telah membiayai proyek konektivitas di Koridor Ekonomi Selatan yang menghubungkan Kamboja, Thailand, dan Vietnam.

Motivasi Jepang untuk berinvestasi, menurut Heng, lebih luas daripada sekadar bersaing dengan Tiongkok. "Akan tetapi, keinginan Jepang untuk memainkan peran regional yang lebih besar, juga didorong oleh pertimbangan domestik yang penting bagi kebaikan mereka sendiri," ungkap Heng. "Perdana Menteri Abe, misalnya, telah lama mengklaim bahwa 'Jepang kembali' dan tidak akan pernah menjadi kekuatan kelas dua. ODA dan prakarsa konektivitas jangka panjang dan kerangka kerja multilateral di kawasan itu dan sekitarnya telah muncul sebagai instrumen utama yang telah digunakan Abe untuk meningkatkan profil internasional Jepang."

Selain investasi Mekongnya, Tokyo memobilisasi Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika dan Pertemuan Para Pemimpin Pulau Pasifik untuk menggalang dukungan bagi prakarsa konektivitas dan strategi Indo-Pasifiknya yang bebas dan terbuka, demikian ujar Heng.

Persaingan Sengit

Jepang menghadapi persaingan ketat dari Tiongkok dalam menarik mitra bisnis di Mekong. Sebagai bagian dari program OBOR-nya, RRT telah membagikan pinjaman lunak dan investasi bernilai miliaran dolar. Melalui prakarsa Kerja Sama Lancang-Mekong (Lancang-Mekong Cooperation - LMC), RRT menjanjikan kepada negara-negara Mekong yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam pinjaman senilai 22,45 triliun rupiah (1,6 miliar dolar A.S.) dan kredit senilai 140,4 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.) pada tahun 2016 saja. Tahun berikutnya, LMC menjanjikan pinjaman lunak pemerintah senilai 15,44 triliun rupiah (1,1 miliar dolar A.S.) dan kredit senilai 70,18 triliun rupiah (5 miliar dolar A.S.) untuk 45 proyek, demikian menurut laporan yang ditulis oleh Nguyen Khac Giang, seorang peneliti di Institut Riset Ekonomi dan Kebijakan Vietnam di Vietnam National University di Hanoi. Nama usaha gabungan Tiongkok-Mekong diambil dari nama sungai itu, yang disebut Lancang di Tiongkok dan Mekong di bagian hilir.

Meskipun investasinya sulit dilacak karena kurangnya transparansi, RRT merupakan salah satu kontributor ODA yang lebih besar di Mekong, demikian menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), sebuah organisasi beranggotakan 36 negara yang diarahkan untuk merangsang kemajuan ekonomi. ODA merupakan istilah yang diciptakan oleh organisasi itu untuk menunjukkan aliran bantuan internasional. ODA mencakup pinjaman dan hibah.

Adapun bagi negara-negara yang memenuhi standar transparansi OECD, Jepang merupakan kontributor ODA terbesar di Mekong, dan Korea Selatan berada di lima teratas. Korea Selatan telah memfokuskan bantuan pembangunannya pada Vietnam, ketika negara itu melampaui Jepang pada tahun 2018 sebagai investor asing terbesar.

Para pencinta lingkungan telah mengkritik bendungan pembangkit tenaga listrik yang didanai oleh Tiongkok, seperti bendungan ini di provinsi Stung Treng, Kamboja, sebagai bencana bagi populasi ikan air tawar yang memberi makan kawasan itu. AFP/GETTY IMAGES

Akan tetapi persaingan untuk pembiayaan dan perdagangan membuat beberapa negara Mekong menyuarakan keprihatinan bahwa mereka akan dipaksa untuk memilih di antara beberapa kekuatan yang bersaing. Para pemimpin regional menyuarakan keprihatinan ini pada forum Jepang-Mekong di Phnom Penh, Kamboja, pada Maret 2018, demikian menurut Nikkei Asian Review.

Di forum tersebut, Kentaro Sonoura, penasihat khusus Abe, menanggapi bahwa strategi baru Tokyo diarahkan untuk mendukung Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada strategi Indo-Pasifik yang lebih luas. Jepang ingin menggabungkan dua benua dan samudra melalui hubungan transportasi dan infrastruktur dan untuk mempromosikan konektivitas tambahan melalui perdagangan bebas, supremasi hukum, dan peningkatan keamanan. "Kami kira dimungkinkan untuk bekerja sama dengan negara mana pun yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip strategi itu," ujarnya.

Para menteri ASEAN, yang memiliki pandangan serupa, telah mengadopsi apa yang mereka sebut arsitektur regional ASEAN-sentris yang "terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan."

Banyak penelitian ilmiah yang menyimpulkan bahwa keinginan RRT untuk memanfaatkan tenaga air dan mengendalikan banjir di sepanjang cekungan Sungai Mekong merongrong ketahanan pangan dan merusak lingkungan di kawasan itu.

Mekong Hijau

Salah satu pilar strategi Tokyo untuk bermitra dengan negara-negara Asia Tenggara adalah apa yang disebutnya "realisasi Mekong Hijau." Strategi itu mencakup langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim dan polusi laut, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan risiko bencana. Di bidang-bidang inilah Jepang berada di atas angin.

Terkait dengan investasi RRT di kawasan itu, para pelindung lingkungan merupakan beberapa pihak yang mengkritiknya dengan paling keras. Banyak penelitian ilmiah yang menyimpulkan bahwa keinginan RRT untuk memanfaatkan tenaga air dan mengendalikan banjir di sepanjang cekungan Sungai Mekong merongrong ketahanan pangan dan merusak lingkungan di kawasan itu.

Sebuah penelitian baru-baru ini berjudul "Potential Disruption of Flood Dynamics in the Lower Mekong River Basin Due to Upstream Flow Regulation" (Potensi Gangguan Dinamika Banjir di Cekungan Mekong Hilir Karena Regulasi Aliran Hulu) mengungkapkan sejumlah bendungan yang sedang dibangun oleh RRT di kawasan itu merampas ekosistem hilir dari nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga populasi ikan tetap sehat. Peneliti dari Michigan State University menerbitkan penelitian itu pada Desember 2018 di *Nature*, sebuah jurnal sains internasional.

"Setiap perubahan besar terhadap aliran musiman dapat dengan mudah mengubah dinamika dataran banjir di daerah itu," ungkap penulis utama Yadu Pokhrel, asisten profesor teknik sipil dan lingkungan di Michigan State University. "Ini bisa sangat memengaruhi berbagai ekosistem dan merongrong ketahanan pangan regional."

Bendungan terbesar yang direncanakan untuk Sungai Mekong adalah proyek yang didukung Tiongkok di Kamboja untuk membangun reservoir seluas 620 kilometer persegi. Bendungan yang dirancang oleh China Southern Power Grid Co. itu akan meningkatkan pembangkitan listrik "tetapi kemungkinan menimbulkan kerusakan bagi perikanan di Sungai Mekong, dan pastinya mengakibatkan perseteruan dengan Vietnam," ungkap laporan yang ditulis oleh para ahli di National Heritage Institute atas nama pemerintah Kamboja.

Bendungan yang diusulkan itu akan memblokir jalur migrasi yang ditempuh oleh ribuan ikan per jam sebelum menuju ke anak sungai di bagian hulu untuk bertelur atau bagian hilir untuk habitat pembibitan dan perikanan di Danau Tonle Sap dan delta Sungai Mekong. Ikan itu akhirnya mencapai delta Vietnam, yang sudah penuh dengan banjir dan kehilangan daratan karena naiknya permukaan air laut.

Kepentingan Strategis

Jepang memandang kawasan Mekong, yang memiliki populasi gabungan 238 juta jiwa dan produk domestik bruto agregat sebesar 10,96 kuadriliun rupiah (781 miliar dolar A.S.) pada tahun 2017, sebagai pasar yang menjanjikan dan tujuan penting bagi ekspor infrastruktur perusahaannya. Para pejabat Jepang juga menganggap Mekong sangat penting dari sudut pandang militer dan geopolitik karena terletak di antara Tiongkok dan India dan menghadap ke jalur pelayaran vital di Laut Cina Selatan, demikian menurut laporan Kyodo News pada Oktober 2018.

Banyak pemimpin Mekong di KTT Tokyo mengatakan kerja sama Jepang membawa manfaat positif — tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi untuk perdamaian. Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar, mengatakan negaranya telah mendapat banyak manfaat dari investasi Jepang, dan begitu juga dengan kawasannya.

"Secara keseluruhan, saya kira semua orang sepakat bahwa kerja sama Jepang-Mekong telah menjadi kisah sukses," tuturnya, demikian menurut berbagai laporan media. "Dan kami yakin bahwa kami akan terus menggunakan kerja sama ini, tidak hanya untuk kesejahteraan, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan regional." □

PERANG POLITIK

Republik Rakyat Tiongkok mencoba memengaruhi pemerintah asing untuk mencapai tujuan politik-militer

ILUSTRASI *FORUM*

DR. CLIVE HAMILTON

Di bawah dorongan konstan propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT), kerinduan patriotik banyak rakyat Tiongkok telah berubah menjadi ambisi untuk membalas dendam atas penghinaan dalam sejarah mereka. Agresi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan, pernyataan agresif mengenai Taiwan, demonstrasi anti-Jepang yang direkayasa, dan lebih banyak lagi terus memanaskan perasaan patriotik. Menurut narasi partai komunis itu, Maraton Seratus Tahun pada tahun 2049 akan melihat Tiongkok melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang unggul di dunia ini.

"Impian Tiongkok" Presiden Xi Jinping bertujuan untuk melihat RRT menggusur Amerika Serikat sebagai kekuatan nomor 1 di dunia. Menurut ucapan mantan orang kuat Singapura Lee Kuan Yew: "Tiongkok berniat untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia."

Di depan umum, para pemimpin PKT mengatakan bahwa mereka berharap Tiongkok menjadi salah satu kutub di dunia multipolar. Akan tetapi prediksi analis strategis Michael Pillsbury, yang sekarang ini bekerja di Hudson Institute, lebih dekat dengan kebenaran, ketika dia menulis: "Mereka melihat dunia multipolar hanya sebagai penanda sementara dalam perjalanan menuju hierarki global baru tempat Tiongkok berada sendirian di puncak."

Para pemimpin RRT percaya bahwa dunia Barat yang kelelahan secara politik dan moral sedang mengalami kemunduran yang tak terbendung. Mereka mengatakan bahwa krisis keuangan tahun 2008 disebabkan oleh pembusukan institusional di Amerika Serikat dan menandai titik balik ketika tatanan dunia yang dipimpin RRT menjadi tak tertahankan.

Partai yang sedang berperang

Para pemimpin PKT yang terbenam dalam teori Marxis-Leninis percaya bahwa mereka terlibat dalam perjuangan abadi. Sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Thomas Mahnken, Ross Babbage, dan Toshi Yoshihara, berjudul "Countering Comprehensive Coercion: Competitive Strategies Against Authoritarian Political Warfare" (Melawan Paksaan Komprehensif: Strategi Kompetitif Melawan Perang Politik Otoriter), menyatakan seperti ini: "Sangat jelas bahwa Partai itu memandang dirinya berperang dengan Barat. Buku-bukunya menggambarkan perjuangan hidup dan mati melawan kekuatan ideologis berbahaya yang bisa menjatuhkan rezim itu."

Kepemimpinan RRT bersifat paranoid. RRT melihat dunia luar, dan khususnya Barat, sebagai kekuatan musuh yang cenderung merongrongnya di setiap kesempatan. Karena itu pihaknya harus selalu waspada. RRT harus menerapkan langkah penanggulangan dan terus menyerang. Kondisi pemikiran ini sangat kontras dengan konsepsi Barat tradisional ketika kondisi sejarah normal adalah perdamaian, secara berkala terganggu oleh perang.

Hal yang sangat penting bagi strategi RRT adalah mengonfigurasi ulang peran pasukan militernya, Tentara Pembebasan Rakyat, untuk menjadikan mereka ahli di bidang informasi, perang siber dan psikologis, dan untuk mengintegrasikan bentuk-bentuk ini menjadi semacam tekanan militer konvensional.

Mentalitas perdamaian dari berbagai negara yang tertantang untuk menyeimbangkan proyeksi kekuatan RRT menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan musuh seperti Tiongkok yang berperilaku seolah-olah terlibat dalam perang. Selama berbagai negara memandang hubungan mereka dengan RRT sebagai hubungan diplomatik yang normal, mereka kalah perang, karena RRT telah mengerahkan pasukannya sementara yang lain masih menunggu terjadinya sesuatu.

Jika berbicara tentang "perang" tampaknya terlalu keras, maka berbagai negara harus mengakui bahwa seperti itulah yang dilihat oleh kepemimpinan PKT itu sendiri — sedang berperang. Ini bukan metafora tetapi pemahaman yang berbeda tentang perang sebagai sarana untuk menaklukkan musuh. Untuk mengatasinya dan mencari cara untuk menanggapinya, berbagai negara perlu memikirkan

kembali ide perang dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya karena itulah yang telah dilakukan RRT.

Hal yang sangat penting bagi strategi RRT adalah mengonfigurasi ulang peran pasukan militernya, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), untuk menjadikan mereka ahli di bidang informasi, perang siber dan psikologis, dan untuk mengintegrasikan bentuk-bentuk ini menjadi semacam tekanan militer konvensional. Langkah ini, pada gilirannya, dikoordinasikan dengan bentuk-bentuk proyeksi kekuatan lainnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk upaya-upaya United Front Work Department (UFWD), upaya propaganda, keahlian pengelolaan ekonomi negara, diplomasi normal, dan bentuk-bentuk diplomasi yang semakin memaksa yang dipraktikkan oleh Beijing.

Setelah terpilih untuk masa jabatan kedua, Presiden Tiongkok Xi Jinping dilantik di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 17 Maret 2018. AFP/GETTY IMAGES

Baik diterima atau tidak, Australia dan Amerika Serikat terlibat dalam jenis perang baru dengan RRT — perang politik. Sifatnya bukan perang, dan kecil kemungkinan berpotensi menjadi perang, tetapi tujuan musuh mereka masih sama — untuk menaklukkan mereka sehingga Australia dan A.S. tidak menawarkan perlawanan apa pun terhadap ekspansi berkelanjutan dan dominasi geopolitik RRT.

Jika perang politik RRT berlanjut tanpa hambatan, dalam 10 hingga 20 tahun, Australia tidak akan lagi mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat, setidaknya dalam hal lain selain pengertian formal. Sasaran sekunder PKT termasuk memastikan akses tanpa hambatan bagi perusahaan Tiongkok ke sumber daya alam Australia dan aliran modal dan tenaga kerja yang bebas.

Definisi perang politik

Definisi perang politik yang paling berguna diberikan oleh Mark Stokes dan Russell Hsiao dari kelompok cendekiawan keamanan Project 2049 Institute. "Perang politik berupaya untuk memengaruhi emosi, motif, alasan objektif, dan perilaku pemerintah, organisasi, kelompok, dan individu asing dengan cara yang menguntungkan tujuan politik-militernya sendiri."

Perang politik juga dapat dianggap sebagai "seni untuk membesarkan hati kawan dan melemahkan semangat lawan."

Sejak tahun 1920-an, PKT telah mengembangkan berbagai cara nonmiliter untuk mencapai tujuannya — langkah-langkah yang tidak digunakan dan tidak dipahami pihak Barat. Cara-cara nonmiliter untuk mengubah perilaku bersifat persuasif dan koersif, meskipun perbedaan di antara keduanya samar-samar. PKT, dan juga PLA, tidak memisahkan antara cara-cara militer dan nonmiliter (diplomatik dan politik) seperti pemisahan yang dilakukan pihak Barat.

Operasi psikologis bisa menjadi senjata, dan penargetan mereka tidak terbatas pada komandan musuh mereka. Meskipun demikian, para politisi membuat semua keputusan militer yang penting (pikirkan operasi kebebasan navigasi, misalnya). Pengaruh pada pemikiran dan perasaan politisi beragam — penasihat militer, penasihat politik, kolega partai, pakar akademis, media, pelobi, pengusaha, sekutu, istri dan suami, dan masyarakat, yang tersegmentasi sebagaimana mestinya menjadi komponen yang kurang-lebih berpengaruh.

Untuk memahami cara kekuatan ekonomi dipersenjatai, pemerintah perlu memahami perangkat persuasi, interferensi, dan pemaksaan yang luas, rumit, dan sangat canggih yang telah dikembangkan oleh PKT.

Di Australia, seperti halnya di tempat lain, semua ini merupakan target untuk perang politik RRT, termasuk operasi psikologis PLA, yang dilaksanakan oleh Departemen Penghubung dari Departemen Pekerjaan Politik Komisi Militer Pusat, departemen politik umumnya. Departemen ini dapat meminta rangkaian sumber daya yang lebih luas daripada yang tersedia di negara demokrasi liberal. Tidak

seperti di Tiongkok, pemerintah demokratis tidak memiliki kemampuan untuk mempersenjatai kekuatan ekonomi untuk tujuan politik dengan menginstruksikan aktor ekonomi untuk melayani kepentingan negara.

Untuk memahami cara kekuatan ekonomi dipersenjatai, pemerintah perlu memahami perangkat persuasi, interferensi, dan pemaksaan yang luas, rumit, dan sangat canggih yang telah dikembangkan oleh PKT. Selagi kekuatan militer konvensional menerapkan tekanan dari luar, PKT mengerahkan rangkaian persenjataan politik dan psikologisnya untuk mengikis kesediaan lawan-lawannya untuk melawan dari dalam.

Jadi, pemerintah dan militer perlu mendefinisikan kembali pemahaman mereka mengenai konflik agar konsisten dengan cara RRT (dan sampai batas tertentu Rusia) memikirkan perang saat ini. Singkatnya, perang di abad ke-21 kurang terkait dengan melawan kemampuan musuh untuk bertarung dibandingkan dengan melemahkan kesediaannya untuk bertarung. Operasi nonkinetik yang canggih, dibantu oleh teknologi baru, melemahkan hubungan antara kemampuan dan kemauan untuk bertarung, semakin besar ketika kemampuan untuk memproyeksikan pengaruh ke dalam sistem politik musuh tumbuh dan disempurnakan.

Vektor pengaruh yang paling penting adalah melalui kalangan elit. Sasaran perang politik adalah, pertama dan terpenting, individu yang berpengaruh. Itulah sebabnya dalam buku saya, *Silent Invasion: China's Influence in Australia (Invasi Senyap: Pengaruh Tiongkok di Australia)*, saya mencoba mengidentifikasi orang-orang yang, secara sadar atau tidak, telah diyakinkan untuk memperdebatkan kasus Beijing. (Melakukan hal itu berisiko melanggar hukum pencemaran nama baik.)

Metode yang digunakan beragam dan halus. Daftar yang tidak lengkap meliputi:

- Menggunakan proksi kaya untuk membeli politisi sehingga mereka menegaskan kembali posisi Beijing.
- Menumbuhkan hubungan pribadi yang hangat dengan penasihat politik dan birokrat senior.
- Merekrut pemimpin bisnis untuk berargumen bahwa "Tiongkok adalah teman kita," dan kita seharusnya tidak membuatnya marah.
- Merekrut mantan politisi senior dan perwira militer senior sebagai agen pengaruh dengan berbagai cara, termasuk keanggotaan dewan yang dibayar dengan baik dan akses ke para pemimpin puncak.
- Mengambil hati akademisi melalui undangan ke konferensi dan kolaborasi penelitian.
- Mengambil hati editor, jurnalis, dan komentator media melalui acara sosial dan kunjungan yang disponsori ke Tiongkok.
- Menggunakan proksi kaya untuk mendukung kelompok cendekiawan dan mendapatkan simpati eksekutif universitas dan rekanan elit mereka dalam bisnis dan politik.

Pekerjaan psikologis pada kalangan elit melengkapi senjata perang politik Beijing yang paling kuat, paksaan dan persuasi ekonomi. Kita telah melihatnya diterapkan baru-baru ini dengan pembatasan nyata tetapi dapat disangkal pada impor dari Australia, mengarahkan kelompok bisnis untuk menekan pemerintah agar lebih ramah terhadap Beijing, sebuah taktik yang di Taiwan diberi nama, *yi shang bi zheng* (paksaan politik melalui ekonomi).

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, kiri, berbicara pada konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing pada November 2018. REUTERS

Seperti yang dilihat Beijing, diaspora Tiongkok di Australia merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memproyeksikan pengaruh partai. Presiden Xi Jinping telah menggembar-gemborkan upaya United Front Work Department dan meningkatkan sumber dayanya. Oleh karena itu United Front Work Department telah melakukan kampanye intensif untuk mempromosikan mereka yang bersimpati terhadap Beijing sebagai perwakilan komunitas yang sah dan mendorong mereka untuk terlibat secara politik. Warga Tiongkok-Australia yang menentang partai telah dibungkam dan dipinggirkan.

Pendukung pro-Tiongkok memegang spanduk yang mengharapkan kunjungan yang sukses bagi Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang sebelum upacara penyambutan resmi di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, pada Maret 2017. REUTERS

Operasi psikologis: jenis perang baru

Apakah suatu negara berperang ketika negara itu yakin sedang berperang atau ketika musuh telah melancarkan permusuhan terhadapnya? Di masa lalu, tidak ada bedanya. Sekarang, persenjataan untuk menaklukkan musuh dapat dikerahkan sembari tetap berada di bawah radar. Dalam perang yang dapat disangkal ini, musuh bekerja untuk meyakinkan kita bahwa pihaknya tidak melakukan permusuhan tetapi berkomitmen terhadap perdamaian atau, menurut slogan-slogan PKT, hanya menginginkan "tatanan dunia yang harmonis" dan "kerja sama saling menguntungkan."

Dalam teks kanonik *Seni Berperang*, Sun-Tzu mengatakan bahwa selalu lebih baik mengalahkan musuh tanpa bergabung dalam pertempuran. Jika para pemimpin politik dapat diyakinkan bahwa tidak ada gunanya memobilisasi kekuatan militernya, maka kapitulasinya sama totalnya dengan kekalahan militer. Singkatnya, persuasi lebih disukai daripada paksaan. Ini dipahami dengan baik.

Apa yang baru adalah keanekaragaman dan kekuatan metode yang sekarang digunakan oleh RRT untuk membentuk pemahaman pihak lain tentang situasi tersebut. Menurut kata-kata Mahnken, Babbage, dan Yoshihara, PKT telah "mengembangkan dan memperbaiki berbagai instrumen koersif yang dapat diterapkan untuk menyesatkan, mengalihkan perhatian, membingungkan, dan merusak koherensi pengambilan keputusan negara Barat dan negara demokrasi lainnya."

Instrumen-instrumen ini terbukti sangat efektif sehingga banyak pemberi pengaruh dan pembuat keputusan senior dalam elit politik, birokrasi, bisnis, dan akademis Australia sekarang menekankan kembali pesan-pesan Beijing tanpa menyadari bahwa persepsi mereka telah dibentuk oleh operasi pengaruh Beijing yang halus.

Beberapa komentator, seperti ekonom dari Australian National University (ANU) Peter Drysdale, yakin bahwa kebangkitan berkelanjutan Tiongkok hanya akan bisa membawa kebaikan bagi Australia dan bahwa merupakan kesalahan untuk "percaya dan mendukung dikotomi palsu antara demokrasi liberal dan totaliterisme." Pihak lain percaya bahwa perlawanan itu sia-sia atau (bahkan lebih baik untuk Beijing) berupaya membujuk warga Australia bahwa mungkin tidak ada yang bisa

ditentang. (Hugh White, profesor studi strategis ANU, misalnya, berpendapat bahwa "nilai-nilai Tiongkok" mungkin baik untuk Australia.)

Pencapaian tertinggi dari perang politik PKT adalah membujuk warga Australia untuk menyambut hegemoni RRT. Beberapa pihak di sisi kiri politik mengklaim bahwa tidak ada yang unik tentang operasi pengaruh RRT di Australia. Bagi mereka, mencermati kegiatan perang politik PKT merupakan kampanye menakut-nakuti yang berperan dalam fantasi invasi Asia ketika Australia benar-benar harus mengutuk imperialisme A.S. di Asia.

Operasi psikologis dapat dilihat berjalan dengan baik di ranah kritis Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ada pandangan luas bahwa Laut Cina Selatan hilang dan sekarang menjadi bagian dari lingkup pengaruh RRT. Setelah menyaksikan pembangunan pulau dan militerisasi RRT, kecaman Beijing terhadap beberapa hukum internasional, taktik menguasai dan memecah belahnya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan sekarang tantangan agresifnya terhadap kapal-kapal Australia dan A.S. di perairan internasional, suara-suara berpengaruh dalam pemerintahan, universitas, dan media telah menyimpulkan bahwa sudah terlambat untuk mencegah RRT mencaplok segala sesuatu di dalam "sembilan garis putus-putus" yang ditulis secara serampangan pada peta oleh pemerintah Nasionalis pada tahun 1947.

Tetapi apakah kawasan itu telah hilang, atau apakah kawasan itu telah dibujuk untuk menyerah? Apakah strategi RRT di Laut Cina Selatan, pada dasarnya, merupakan operasi militer atau psikologis?

Mereka yang telah diyakinkan bahwa kendali Tiongkok atas Laut Cina Selatan merupakan fakta yang tidak dapat diubah biasanya memerlukan alasan untuk menyerahkannya kepada RRT, karena tidak nyaman untuk mengakui bahwa RRT telah merebut wilayah itu secara ilegal. Rasionalisasi meliputi hal berikut ini.

- Laut Cina Selatan secara historis adalah milik Tiongkok, dan Tiongkok hanya mendapatkan kembali posisi dominan yang pernah dipegangnya di kawasan tersebut (Paul Keating, yang merupakan perdana menteri Australia pada tahun 1990-an, mengartikulasikan posisi resmi Partai Komunis Tiongkok ini).
- RRT dapat mengendalikan Laut Cina Selatan, tetapi tidak terlalu penting karena tidak mungkin bagi Tiongkok untuk mengganggu pengapalan komersial, yang merupakan hal terpenting bagi Australia (populer di kalangan analis bisnis).
- Australia memiliki kepentingan ekonomi untuk menenangkan Tiongkok; Australia rentan terhadap pembalasan (posisi otomatis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia).
- Amerika Serikat telah secara efektif menarik diri atau tidak akan membantu pihak mana pun yang berkonflik dengan Tiongkok, jadi apa gunanya? (Hugh White dari ANU)

Beijing, tentu saja, telah menyebarkan argumen-argumen ini sebagai cara untuk melemahkan perlawanan, dan banyak warga Australia yang berpengaruh menyerah pada semacam "ketidakberdayaan yang dipelajari" dalam menghadapi kekuatan baru yang agresif ini.

Lebih dari 1.000 kader dan pekerja Tiongkok berkumpul pada Juni 2018 untuk menyanyikan lagu *Kantata Sungai Kuning* saat mereka merayakan peringatan 97 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. GETTY IMAGES

Beberapa tahun yang lalu, Michael Pillsbury dari Hudson Institute menulis tentang RRT: "Kita tidak tahu bahwa kita kalah. Faktanya, kita bahkan tidak tahu bahwa permainan telah dimulai."

Akan tetapi sekarang, sejumlah kecil analis dan pengamat mulai memahami permainan PKT dan menerima bahwa Australia telah kalah. Mereka menyadari bahwa sekarang Australia dan sekutu serta mitranya perlu mulai bermain dan telah mulai berupaya mencari cara untuk menanggapi kekuatan baru yang mengganggu ini. □

Dr. Clive Hamilton menyampaikan kuliah ini di Naval War College di Newport, Rhode Island, A.S., pada Oktober 2018. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format *FORUM*.

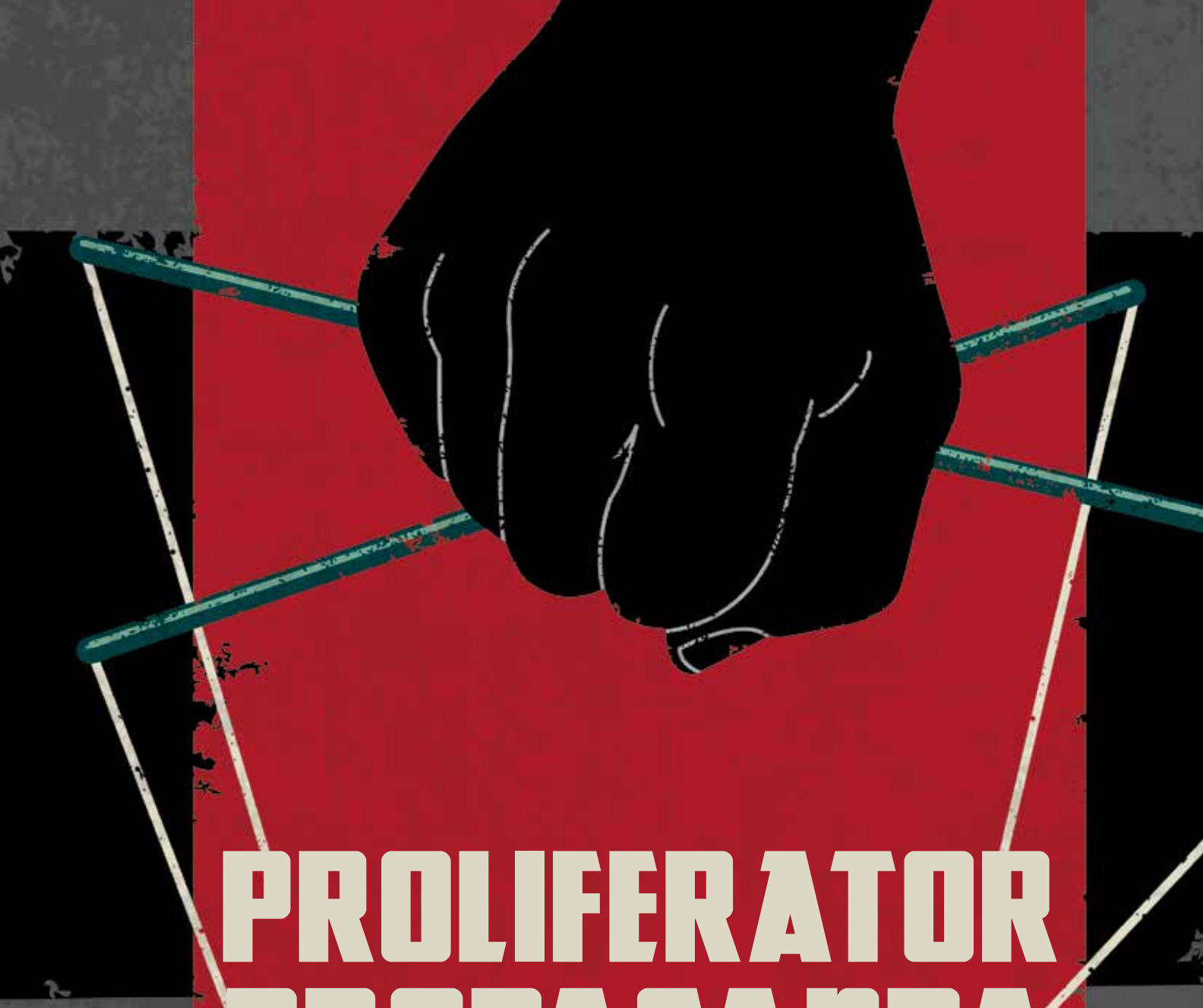

PROLIFERATOR PROPAGANDA

Institut Konfusius, di bawah perlindungan pemerintah Tiongkok, menyusup ke berbagai negara di seluruh dunia dengan cara yang semakin berbahaya dan angkuh

STAF *FORUM*

ILUSTRASI *FORUM*

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mendirikan lebih dari 530 Institut Konfusius dan 1.100 ruang kelas Konfusius di 149 negara sejak organisasi itu dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2004, demikian menurut penghitungan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2017 oleh Xinhua, kantor berita resmi milik pemerintah RRT.

Praktik mengekspor merek pusat pembelajaran budaya Tiongkok mungkin tampak tidak berbahaya di permukaan. Akan tetapi, lembaga yang didanai RRT, yang namanya diambil dari filsuf Tiongkok kuno itu, merupakan bagian dari skema paksaan RRT yang lebih besar, demikian ujar para ahli. Lembaga itu mengklaim sebagai bagian dari organisasi pendidikan publik internasional nirlaba yang didirikan untuk mengajarkan bahasa dan budaya Tiongkok di luar negeri, mirip dengan Alliance Francaise milik Prancis atau Goethe Institute milik Jerman. Akan tetapi, semakin banyak pakar yang berpendapat bahwa Institut Konfusius alih-alih merupakan bagian dari kampanye ekspansif ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menghabiskan anggaran sekitar 140,4 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.) secara internasional untuk memanipulasi lingkungan politik dan informasi negara-negara sasaran.

Institut Konfusius yang berada di berbagai negara dari Argentina hingga Zimbabwe itu diawasi oleh sebuah lembaga dari Departemen Pendidikan RRT, yang dikenal sebagai Hanban, yang berisi anggota-anggota berpangkat tinggi dari cabang-cabang propaganda dan ideologi PKT. Struktur itu memungkinkan "realisasi kebijakan Politbiro dalam operasi Institut Konfusius. Sehubungan dengan Institut Konfusius dan ruang kelas yang didirikan di perguruan tinggi dan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah di seluruh dunia, lembaga-lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai cabang propaganda periferal dari partai tunggal penguasa negara Tiongkok," ungkap Dr. Marshall Sahlins, seorang profesor di University of Chicago, dalam artikel di situs web Inside Higher Ed pada Juli 2018. Politbiro pusat RRT, yang memiliki 25 anggota, mengawasi PKT. Pada gilirannya, PKT mengatur operasi pengaruh melalui United Front Work Department (UFWD)-nya untuk menetralisasi sumber-sumber tantangan potensial terhadap otoritasnya. Institut Konfusius merupakan bagian dari upaya luar negeri UFWD. RRT telah menyatakan keinginannya untuk mendirikan hingga 1.000 lembaga semacam itu paling lambat tahun 2020.

ARSITEKTUR KOERSIF

Dalam beberapa tahun terakhir ini, RRT telah berupaya untuk mengaburkan misi institut itu dengan memfokuskan penyampaian pesan promosi pada proliferasi dan keberhasilan yang diakuinya sendiri dalam menyediakan keterampilan bahasa Tiongkok. Akan tetapi, para pemimpin RRT menggambarkan niat mereka secara eksplisit selama peluncuran dan perluasan institut itu dan kampanye penyampaian pesan mereka yang luas. Pada tahun 2010, misalnya, menteri propaganda Tiongkok saat itu, Liu Yunshan, memberi tahu surat kabar *People's Daily* bahwa propaganda luar negeri RRT harus bersifat "komprehensif, berjenjang, dan luas. ... Berkenaan dengan isu-isu utama yang memengaruhi kedaulatan dan keselamatan kita, kami harus secara aktif melakukan pertempuran propaganda melawan isu-isu seperti Tibet, Xinjiang, Taiwan, hak asasi manusia, dan Falun Gong. Strategi kami adalah secara proaktif membawa budaya kita ke luar negeri. ... Kami harus melakukannya dengan baik dalam membangun pusat budaya di luar negeri dan Institut Konfusius."

Hanban mendirikan banyak institut di dekat proyek-proyek yang merupakan bagian dari rencana infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) RRT yang kontroversial. Layanan berita Tiongkok Xinhua melaporkan pada Oktober 2017 bahwa "135 Institut Konfusius didirikan di 51 negara di sepanjang Sabuk dan Jalan." OBOR bertujuan untuk membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur untuk menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika, tetapi proyek-proyeknya biasanya disertai dengan beban utang yang besar dan pamrih politik. Berbagai negara tuan rumah mulai dari Jibuti dan Tajikistan hingga Sri Lanka dan Maladewa telah belajar bahwa ketentuan OBOR terutama bermanfaat bagi kepentingan pemerintah Tiongkok.

Pengumuman Xinhua bahwa Institut Konfusius secara geografis selaras dengan proyek-proyek OBOR mendukung gagasan

bahwa institut itu dirancang sebagai bagian dari strategi agresif untuk mengendalikan kemauan politik negara tuan rumah dan merongrong kedaulatan mereka. Selain itu, semakin banyak kritikus menuduh bahwa kegiatan yang dikaitkan dengan institut yang seharusnya merupakan pusat budaya itu semakin bergerak di luar operasi pengaruh semata menjadi campur tangan di negara tuan rumah.

"Komunis Tiongkok sedang menyusup ke dalam universitas-universitas Amerika untuk ikut campur dengan kurikulum kami, membungkam kritik terhadap rezim mereka, dan mencuri kekayaan intelektual termasuk penelitian penggunaan ganda yang sensitif," ungkap Senator A.S. Ted Cruz dari Texas kepada surat kabar *The Washington Post* pada Mei 2018. "Institut Konfusius merupakan sarung tangan beludru di seputar kebengisan kampanye mereka di kampus kita. Pemerintah Amerika membutuhkan alat bantu baru untuk melindungi integritas universitas dan penelitian kita dan untuk memblokir spionase akademik."

INFILTRASI UNIVERSITAS

Sekitar 110 Institut Konfusius disisipkan dalam perguruan tinggi dan universitas A.S., dan lebih dari 500 ruang kelas Konfusius telah didirikan di A.S., demikian menurut laporan Hoover Institution yang dikeluarkan pada akhir November 2018 dan berjudul "Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance" (Pengaruh Tiongkok & Kepentingan Amerika: Mempromosikan Kewaspadaan Konstruktif). Ada 160 institut semacam itu yang tersebar di seluruh Eropa, termasuk 29 institut di Inggris dan 20 institut di Jerman, demikian ungkap laporan itu.

Dalam kesaksian di Senat pada Februari 2018, Direktur FBI Christopher A. Wray mendukung tuduhan Cruz bahwa institut itu terkait dengan upaya spionase RRT dan pencurian kekayaan intelektual. Dia bersaksi bahwa Institut Konfusius merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh RRT untuk mengumpulkan intelijen dari universitas A.S. secara nasional.

"Pada dasarnya di setiap disiplin," ungkap Wray. "Dan saya kira tingkat kenaifan di sektor akademik tentang hal ini menciptakan masalahnya sendiri. Mereka [RRT] mengeksploitasi lingkungan penelitian dan pengembangan yang sangat terbuka yang kita miliki, yang kita semua hormati."

Upaya RRT untuk mencuri penelitian dan teknologi dari universitas di seluruh dunia telah banyak dilaporkan di media berita. Akan tetapi pencurian secara terang-terangan tidak selalu diperlukan. RRT memangsa keterbukaan lingkungan akademik asing. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA), misalnya, telah berkolaborasi dengan universitas di Australia, Kanada, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Inggris, dan A.S. untuk memajukan teknologi dan kemampuan militernya, demikian yang diungkapkan studi dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) pada November 2018 berjudul, "Picking Flowers, Making Honey" (Memilih Bunga, Membuat Madu). Selama kurang lebih dalam dekade terakhir ini, PLA telah mendukung lebih dari 2.500 ilmuwan dan insinyur militer untuk belajar di luar negeri dan mengembangkan hubungan dengan para peneliti dan lembaga di seluruh dunia, demikian yang ditemukan oleh penulis laporan itu, Alex Joske. Presiden Tiongkok Xi Jinping berupaya memperluas metode penggalian intelijen dari universitas asing ini sebagai bagian dari apa yang disebut upaya fusi sipil-militer, demikian menurut berbagai laporan media.

MENGHINDARI PENGAWASAN

RRT sebagian besar telah menghindari pemeriksaan ketat terhadap Institut Konfusiusnya di A.S. lewat menghindari hukum dan pengawasan akademik yang lazim dilakukan dengan menciptakan kemitraan yang terstruktur dengan cermat. Hanban mendirikan pusat-pusatnya bersama-sama dengan universitas tuan rumah A.S., memberikan hibah senilai 2,1 miliar rupiah (150.000 dolar A.S.) dalam bentuk modal awal, demikian yang ditemukan laporan Hoover. Kemudian RRT memberikan 1,4 miliar rupiah (100.000 dolar A.S.) hingga 2,8 miliar rupiah (200.000 dolar A.S.) per tahun dalam bentuk pendanaan langsung ke institusi A.S. yang sering kali mengalami kekurangan dana. Hibah untuk ruang kelas Konfusius di sekolah menengah pada awalnya senilai 701,7 juta rupiah (50.000 dolar A.S.) dan kemudian 210,5 juta rupiah (15.000 dolar A.S.) per tahun, demikian ungkap laporan itu.

Berdasarkan pengaturan semacam itu, Hanban, yang bekerja melalui universitas Tiongkok, memasok guru, buku pelajaran, dan materi lainnya yang mempromosikan sudut pandang budayanya dan tunduk pada kendali Partai Komunis Tiongkok, demikian ungkap laporan Hoover. Akibatnya, guru institut tidak diharuskan memiliki kartu hijau atau membayar pajak A.S. Mereka juga berada di bawah kendali Hanban.

Laporan Hoover mengatakan bahwa Hanban mengamanatkan melalui kontrak dengan universitas tuan rumah bahwa kegiatan institut itu harus mengikuti hukum Tiongkok, dan persyaratan pengaturan harus tetap dirahasiakan. Hanban juga mengandalkan perjanjian larangan pengungkapan serupa di negara-negara lain. "Kegiatan yang mendapat manfaat dari pendanaan Tiongkok atau hubungan komersial dengan Tiongkok lebih memprihatinkan ketika pengaruh Tiongkok kurang mudah dilacak," demikian yang dijelaskan laporan Hoover.

Insiden ketika RRT dan Institut Konfusiusnya telah mengganggu kebebasan akademik di kampus-kampus telah menjadi berita utama mulai dari Eropa dan Amerika Latin hingga Australia dan Selandia Baru. Situs web Inside Higher Ed melaporkan bahwa pada sebuah konferensi universitas di Portugal pada tahun 2014, misalnya, seorang administrator dari Institut Konfusius menyensor materi yang berkaitan dengan Taiwan, menyita materi itu, dan menghapus halaman terkait Taiwan dari program itu. Pada Mei 2016, administrator di sebuah universitas di Peru yang menampung Institut Konfusius membatalkan pameran lukisan yang menampilkan seniman Tiongkok Falun Gong.

Seorang perempuan berpartisipasi dalam demonstrasi menentang Tiongkok ketika negara itu ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, pada November 2018. Propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT) berupaya memberangus diskusi tentang berbagai macam topik seperti Tibet, Xinjiang, Taiwan, hak asasi manusia, dan Falun Gong. REUTERS

Doris Liu, seorang jurnalis dan pembuat film Kanada kelahiran Tiongkok, merilis film dokumenter pada tahun 2017 berjudul *In the Name of Confucius (Atas Nama Konfusius)* yang mengidentifikasi ancaman dari institut itu terhadap Kanada, A.S., dan negara-negara lain. Filmnya antara lain mengungkap institut itu melarang praktisi Falun Gong, gerakan olahraga dan meditasi yang telah berusaha ditindas oleh pemerintah Tiongkok selama dua dekade. "Nilai-nilai fundamental kita berada dalam risiko atau dirusak. Institut itu mengajarkan propaganda dengan menyelundupkannya ke kampus-kampus kita," ujar Liu kepada surat kabar *South China Morning Post* dalam sebuah wawancara pada tahun 2018. "Pertama, ada diskriminasi hak asasi manusia. Kedua, independensi akademik."

Di bawah tekanan dari PKT, pelajar dan asosiasi cendekiawan Tiongkok juga memainkan peran dalam menjangkau dan mengendalikan warga Tiongkok yang tinggal di seluruh dunia serta warga negara tuan rumah, demikian menurut laporan Hoover pada November 2018. "Para cendekiawan dan diplomat Tiongkok telah berusaha untuk memengaruhi debat-debat di kampus demi kepentingan Tiongkok dan bahkan memprotes ketika universitas-universitas Amerika telah menggunakan hak mereka untuk mengundang para pembicara yang diidentifikasi oleh Tiongkok sebagai tidak ramah. Akhirnya, beberapa pelajar dan cendekiawan Tiongkok telah mengeksploitasi lingkungan penelitian kolaboratif di kampus-kampus A.S. untuk mendapatkan teknologi Amerika yang sensitif," tulis laporan itu.

Sel-sel pelajar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok telah muncul di kampus-kampus di Australia, Kanada, Cile, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Meksiko, Belanda, Portugal, Korea Selatan, Spanyol, Thailand, A.S., dan di tempat lain yang secara efektif memperluas upaya pengawasan RRT, demikian menurut artikel pada April 2018 di majalah *Foreign Policy*. Sel-sel itu merupakan

Tembok di Beijing menampilkan poster propaganda Presiden Tiongkok Xi Jinping. AFP/GETTY IMAGES

Potret lukisan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kiri, dan mendiang pemimpin komunis Mao Zedong digantung di pasar Beijing. AFP/GETTY IMAGES

"bagian dari strategi, yang sekarang diperluas di bawah Presiden Tiongkok Xi Jinping, untuk memperluas kontrol partai langsung secara global dan untuk mengisolasi pelajar dan cendekiawan di luar negeri dari pengaruh 'ideologi berbahaya,' kadang-kadang dengan meminta anggota untuk melaporkan perilaku dan keyakinan satu sama lain," ungkap artikel itu.

Samantha Hoffman, peneliti tamu di Mercator Institute for China Studies di Berlin, mengatakan kepada *Foreign Policy*, "Anda masih tahu bahwa jika Anda secara aktif memprotes [partai], atau jika Anda membuat beberapa komentar, Anda tahu itu bisa membahayakan Anda di kemudian hari," ungkapnya. "Informasi itu tersebar. Tindakan itu merupakan cara mengendalikan apa yang ingin Anda lakukan."

RRT menggembar-gemborkan sel-sel itu di antara keberhasilan propagandanya. "Meningkatnya jumlah cabang partai di luar negeri adalah fenomena baru, yang menunjukkan pengaruh yang semakin besar dari [Partai Komunis Tiongkok] dan Tiongkok," demikian menurut artikel pada November 2017 di surat kabar *Global Times* penyambung lidah partai komunis. "Sel-sel partai di luar negeri juga bertanggung jawab untuk mempromosikan kebijakan partai dan pemerintah."

MENINGKATKAN KESADARAN

Atas dasar prevalensi ketidakpatutan tersebut, Asosiasi Cendekiawan Nasional (National Association of Scholars - NAS) A.S., bersama dengan organisasi pendidikan tinggi lainnya seperti Asosiasi Dosen Universitas Amerika di A.S. dan Asosiasi Dosen Universitas Kanada di Kanada, telah mengadvokasi untuk penghapusan Institut Konfusius

secara nasional. Laporan NAS pada tahun 2017, berjudul, "Outsourced to China: Confucius Institutes and Soft Power in American Higher Education" (Pengalihdayaan ke Tiongkok: Institut Konfusius dan Kekuatan Lunak dalam Pendidikan Tinggi Amerika) menemukan bahwa dalam menerima dana semacam itu "sebagian besar, universitas telah membuat konsesi tidak patut yang membahayakan kebebasan akademik dan otonomi kelembagaan. Kadang-kadang konsesi ini bersifat resmi dan tertulis; lebih sering konsesi ini beroperasi sebagai kebijakan implisit." Para ahli menjelaskan bahwa untuk menjaga pendanaan institut tetap mengalir dan akses ke sumber daya Tiongkok yang terkandung dalam kontrak, banyak universitas yang kekurangan dana menyensor diri mereka sendiri.

Ketika pengetahuan publik tentang kegiatan institut itu telah tumbuh dan tekanan dari para kritikus telah meningkat, berbagai universitas internasional telah mengakhiri hubungan mereka dengan institut itu, termasuk Osaka Sangyo University di Jepang, McMaster University dan Universite de Sherbrooke di Kanada, University of Lyon di Prancis, Stuttgart Media University dan University of Hohenheim di Jerman, dan Stockholm University di Swedia.

Lebih dari 10 universitas A.S., termasuk Pennsylvania State University, universitas-universitas di Chicago, Iowa, Michigan di Ann Arbor, Minnesota di Twin Cities dan North, South, dan West Florida, juga telah bergerak untuk menutup institut itu di kampus mereka — mayoritas dilakukan dalam satu tahun terakhir ini. Upaya bipartisan yang dilakukan oleh Anggota Kongres Texas Michael McCaul dan Henry Cuellar, misalnya, menyebabkan penutupan dua Institut Konfusius yang berafiliasi dengan Texas A&M University pada tahun 2018. Dalam surat pada Maret 2018 ke universitas-universitas negara bagian mereka, para perwakilan itu menyebut institut yang didukung oleh RRT sebagai "ancaman terhadap keamanan negara kita dengan berfungsi sebagai platform untuk pengumpulan intelijen dan agenda politik Tiongkok." Mereka menambahkan, "Kita memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berekspresi Amerika kita dan untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melawan perilaku apa pun yang menjadi ancaman bagi demokrasi kita."

Universitas-universitas lain yang telah mengevaluasi apakah akan membuka Institut Konfusius, termasuk University of Pennsylvania dan Princeton University, telah memutuskan menentang rencana semacam itu dalam beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi sejumlah sekolah, termasuk University of North Carolina di Charlotte, Southern Utah University, dan Savannah State University telah membuka institut itu sehingga membuat jumlah institut yang dibuka di A.S. menjadi sekitar 100.

PRAKARSA PERLINDUNGAN PEMERINTAH

Pemerintah dan universitas di seluruh dunia harus mengawasi dengan cermat kegiatan yang terkait dengan Institut Konfusius dan kampanye pengaruh RRT serta kontrol terkait yang memanfaatkan keterbukaan sistem demokrasi di luar negeri. Para ahli berpendapat bahwa kampanye pengaruh otoriter RRT bukan tentang daya tarik atau persuasi, tetapi justru berfokus pada pengalihan perhatian dan manipulasi. Para ahli memperingatkan bahwa kegiatan interferensi semacam itu mengikis fondasi kepercayaan yang membuat berfungsinya sistem yang terbuka, demokratis dan multikultural, dan pada akhirnya dapat mengikis kedaulatan.

Di Senat A.S., Cruz memperkenalkan undang-undang pada Mei 2018 yang dirancang untuk memantau secara lebih erat kooptasi pemerintah asing terhadap lembaga pendidikan A.S., seperti aktivitas RRT melalui Institut Konfusiusnya. Undang-undang yang diusulkannya, disebut Undang-Undang Menghentikan Pencurian dan Spionase Pendidikan Tinggi Tahun 2018, juga akan membuat pendanaan RRT terhadap Institut Konfusius mematuhi Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing. Di DPR A.S, anggota partai Republik Joe Wilson dari South Carolina memperkenalkan proposal yang serupa yang disebut Undang-Undang Transparansi Pengaruh Asing Tahun 2018, yang juga mengamanatkan universitas untuk mengungkapkan sumbangan dari sumber-sumber asing yang nilainya 701,7 juta rupiah (50.000 dolar A.S.) atau lebih. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional A.S., yang disahkan menjadi undang-undang pada Agustus 2018, sekarang melarang Departemen Pertahanan untuk mendanai program-program bahasa Tiongkok yang menampung Institut Konfusius kecuali jika mereka memperoleh pengecualian. Ketentuan baru itu dapat menyebabkan penutupan lebih banyak institut, seperti institut di University of Rhode Island, yang menerima dana RRT dan Departemen Pertahanan. Mengingat kekhawatiran yang meningkat tentang paksaan dan spionase RRT, pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump sedang mempertimbangkan apakah akan mewajibkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ekstensif dan pembatasan lain pada pelajar Tiongkok di A.S., demikian menurut laporan Reuters pada akhir November 2018. Pada Juni 2018, Departemen Luar Negeri A.S. memperpendek masa berlaku visa menjadi satu tahun bagi mahasiswa pascasarjana Tiongkok yang mempelajari penerbangan, robotika, dan manufaktur tingkat lanjut untuk mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Sebelumnya mereka telah diberi visa selama lima tahun.

Reuters melaporkan bahwa A.S. juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ekstensif terhadap pelajar Tiongkok sebelum mereka bersekolah di A.S.

"Setiap pelajar Tiongkok yang dikirim Tiongkok ke sini harus melalui proses persetujuan partai dan pemerintah," ungkap seorang pejabat senior A.S. kepada Reuters. "Anda mungkin tidak berada di sini untuk tujuan spionase seperti yang didefinisikan secara tradisional, tetapi tidak ada pelajar Tiongkok yang datang ke sini yang bebas dari kekangan negara." □

MENGINDOKTRINASI MILITER TIONGKOK

ILUSTRASI *FORUM*

TENTARA PEMBEBASAN RAKYAT TIONGKOK BERALIH MENUJU AKAR PROPAGANDIS, IDEOLOGI PARTAI

ZI YANG

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) sedang mengalami transformasi signifikan, yang paling menyeluruh dalam 91 tahun keberadaannya. Nyaris semua bagian PLA mengalami perubahan, dengan tujuan memodernisasi kekuatan sesuai standar dunia. Sementara langkah besar telah dilakukan dalam kemajuan teknologi, penekanan ulang pada indoktrinasi politik dan ideologi terhadap perwira dan calon tamtama PLA juga telah terjadi. Inisiatif tersebut memiliki efek yang mendalam pada pikiran individu yang membentuk militer terbesar di dunia. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa falsafah penuntun di balik indoktrinasi massal PLA?
- Apa komponen "budaya militer yang kuat" dari PLA?
- Apa yang dimaksud dengan "prajurit empat kepemilikan"?
- Langkah-langkah spesifik apa yang telah diambil untuk mengindoktrinasi militer?
- Apa kelebihan dan kekurangan dari fokus ulang pada indoktrinasi politik?

Presiden Tiongkok Xi Jinping telah secara bertahap mengonsolidasikan kekuatan sejak tahun 2012, menjadikannya pemimpin Tiongkok terkuat sejak Mao Zedong. Sesuai tradisi komunis Tiongkok, pemikiran Xi Jinping telah diangkat ke tingkat ideologi negara resmi. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa garis pemikirannya tentang pertahanan, yang disebut pemikiran Xi Jinping tentang penguatan militer, mendominasi reformasi PLA.

Dalam pandangan Xi, Tiongkok menghadapi bahaya yang sangat besar, baik dari musuh internal maupun eksternal. Di panggung internasional, bangkitnya Tiongkok telah membuat A.S. jauh lebih waspada, dan Washington telah mengambil berbagai tindakan untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin meningkat. Selain itu, intensifikasi konflik regional menimbulkan tantangan lebih lanjut terhadap integritas teritorial Tiongkok, termasuk bangkitnya kembali Partai Progresif Demokratis Taiwan, ancaman terorisme domestik dan separatisme, serta korupsi dalam militer Tiongkok yang mengancam landasan PLA.

Dalam kondisi seperti itu, Xi telah menyerukan untuk kembali ke fundamen PLA — tentara yang sangat disiplin di bawah kepemimpinan mutlak Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang mampu memenangkan perang — mengenang kembali Tentara Merah di masa awal yang dipimpin oleh Mao.

Ada tiga prinsip bagi ekspektasi Xi terhadap militer Tiongkok — mematuhi perintah partai, bersiap memenangkan perang, dan mempertahankan perilaku yang

Presiden Tiongkok Xi Jinping meletakkan tangannya di atas salinan konstitusi sebelum mengambil sumpah jabatan setelah terpilih kembali untuk masa jabatan kedua oleh Kongres Rakyat Nasional di Aula Besar Rakyat di Beijing pada bulan Maret 2018.
THE ASSOCIATED PRESS

baik. Tertempel di semua barak di Tiongkok, ide-ide ini lugas dan sederhana. Pertama, PLA harus mematuhi perintah partai karena, tidak seperti militer demokrasi Barat, PLA milik PKT, bukan negara. Tugasnya adalah membela kepentingan partai di atas segalanya. PKT mulai berkuasa melalui perjuangan bersenjata yang panjang, dan PKT memahami betapa pentingnya menjaga kekuasaan dengan bantuan militer. Oleh karena itu, partai tidak akan pernah melepaskan kendali atas PLA, dan anggota militer tidak boleh menyimpang dari perintah mutlak partai. Pemimpin politik dan militer Tiongkok percaya bahwa konflik antara PLA dan PKT pasti akan menyebabkan kejatuhan negara, seperti yang terjadi di Uni Soviet. Oleh karena itu, prinsip pertama pemikiran Xi tentang militer adalah PLA mematuhi semua perintah dari partai.

Selain mematuhi politik yang "benar", PLA harus siap untuk bertempur dan memenangkan perang. Pada masa perubahan besar, PLA harus berlatih keras dan berdiri tegar untuk mempertahankan kepentingan nasional. Di masa lalu, PLA telah memperluas kemampuan di dunia maya, perang elektronik, ruang angkasa, dan melakukan operasi bersama sambil mengumumkan prestasi teknologi baru di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, hypersonic glide vehicle (HGV), senjata gelombang mikro kekuatan tinggi, senjata laser, navigasi satelit, pesawat tanpa awak (drone), dan komunikasi kuantum. Kemajuan semacam itu akan sangat bermanfaat bagi PLA jika konflik meletus di masa mendatang.

Ketiga, PLA harus mempertahankan perilaku yang baik, dengan tegas mengikuti peraturan dan hukum. Pecahnya ketertiban di lembaga mana pun merupakan perkembangan yang buruk. Meski di masa lalu PLA dijalankan seperti perusahaan milik negara yang dikelola dengan buruk, banyak yang telah berubah sejak Xi mengambil alih. Kampanye antikorupsi di PLA telah menjaring daftar panjang pejabat tingkat menengah dan tinggi sembari menebar rasa takut di benak banyak orang lainnya.

Namun, selain 'pentungan besar', kepemimpinan militer juga berusaha memajukan nilai-nilai revolusioner kepada anggota militer, mengingatkan mereka bahwa PLA adalah tentara rakyat. Sebenarnya, menggalakkan "budaya militer yang kuat" menempati prioritas tinggi dalam agenda Xi, karena budaya menembus semua tingkat militer dan memiliki pengaruh yang kuat pada cara prajurit berperilaku.

Gagasan Xi tentang budaya militer yang kuat adalah bauran yang disebut budaya militer merah dan etika militer tradisional. Budaya militer merah berasal dari pengalaman revolusioner bersama PKT dan PLA dari kepunahan yang nyaris terjadi di tangan pasukan Kuomintang untuk menaklukkan seluruh Tiongkok.

Sebuah mural menggambarkan prajurit Tentara Pembebasan Rakyat di sebuah pameran Beijing yang memamerkan prestasi Presiden Tiongkok Xi Jinping. THE ASSOCIATED PRESS

"Nilai-nilai merah" seperti keberanian, pengorbanan, kesetiaan, ketekunan, dan tanpa rasa takut sering kali ditekankan. Demikian pula, "lembaga merah", seperti sistem komisar politik, dan ketaatan pada partai disoroti.

Etika militer tradisional, atau *wude*, adalah konsep yang dapat dilacak hingga zaman kuno. Ada tiga prinsip inti dalam hal etika militer tradisional — kesetiaan, keberanian, dan ketegasan. Kesetiaan harus didedikasikan untuk negara dan tugas. Dalam hal keberanian, seseorang harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar dan harus cerdas, tidak keras kepala, dalam menerapkan keberanian. Dalam hal ketegasan, seseorang harus tegas pada semua — diri sendiri, rekan, dan bawahan.

Kendati demikian, Xi secara khusus menguraikan ekspektasinya untuk menempa ulang anggota militer PLA menjadi apa yang ia sebut sebagai "prajurit empat kepemilikan", yang berarti mereka harus memiliki semangat, kemampuan, ketidaktakutan, dan moralitas. Prajurit empat kepemilikan harus memiliki semangat seorang yang sangat yakin pada komunisme dan kepemimpinan partai serta memiliki keinginan untuk menentang segala hasrat batin dan upaya luar untuk menggulingkan komitmen itu. Ia harus memiliki kemampuan untuk beralih ke mode tempur kapan saja, membangun kemampuannya dalam melawan apa yang disebut perang terinformatisasi, memperkuat persiapan mental untuk pertempuran, dan menjadi pembelajar seumur hidup yang penuh rasa ingin tahu. (Perang terinformatisasi mengacu pada gagasan bahwa teknologi informasi, seperti kapabilitas yang terkait dengan komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, merupakan kunci efektivitas militer).

Dalam pidatonya, Xi berulang kali mengkritik dampak mengenaskan dari "penyakit masa damai" yang mengikis kesediaan anggota militer untuk melakukan pengorbanan akhir. Akibatnya, prajurit empat kepemilikan harus berani dan tanpa rasa takut. Ia harus siap berkorban dan mati demi perjuangannya. Yang terakhir, prajurit empat kepemilikan harus memiliki moralitas. Ia harus dapat membedakan benar dan salah, mempertahankan perilaku unggulan, mematuhi hukum, dan memiliki standar hidup yang tinggi.

Untuk memajukan nilai dan model ini, PLA telah mengadopsi dua strategi umum, mengusung tokoh panutan dan indoktrinasi politik sehari-hari. Memilih tokoh panutan dan menyebarkan perbuatan kepahlawanan mereka bukanlah hal baru. Bahkan, gerakan nasional untuk "belajar dari PLA" pada tahun 1960-an telah menciptakan sejumlah pahlawan militer. Meski sebagian telah lama dilupakan, beberapa pahlawan, seperti Lei Feng, masih bertahan dan tetap sangat populer di Tiongkok. Namun, propagandis PLA telah menyarankan agar tidak menggunakan metode yang sama dari masa lalu. Pahlawan militer saat ini hendaknya tidak lagi berupa stereotip dari tahun 1960-an — laki-laki, suku Han, dan perwujudan kesempurnaan. Upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk menemukan individu perempuan, bukan suku Han, dan tidak sempurna yang menjadi lebih baik melalui perjuangan dan kerja keras, papar mereka.

Seorang perwira polisi paramiliter Tiongkok menjaga potret almarhum pemimpin Tiongkok Mao Zedong di Gerbang Tiananmen di Beijing. THE ASSOCIATED PRESS

Strategi indoktrinasi lainnya adalah pendidikan politik sehari-hari. Ini mencakup aktivitas sehari-hari dan inisiatif yang diselenggarakan untuk membawa pulang pesan politik. Armada Laut Utara Angkatan Laut PLA, misalnya, telah menerapkan serangkaian langkah melalui kegiatan kelompok budaya yang menyenangkan. Ada pertemuan rutin klub baca, tontonan film, konser piano, pelajaran kaligrafi dan fotografi, pesta karaoke lagu merah, kompetisi pembuatan film, dan kompetisi sejarah PKT, PLA, dan Angkatan Laut PLA, semuanya ditujukan untuk menciptakan identitas pelaut empat kepemilikan. Selain itu, peristiwa peringatan untuk martir revolusi telah diselenggarakan untuk tujuan serupa. Melalui upaya ini, Armada Laut Utara berharap memiliki generasi baru pelaut berkomitmen yang memenuhi standar panglima tertinggi.

Jelas bahwa Xi berusaha mengembalikan PLA ke akarnya, ke era di mana tentara "merah" dan juga "ahli". Namun, banyak yang telah berubah sejak masa perang revolusioner, dan viabilitas model tersebut patut diragukan. Mengambil waktu yang berharga dari pelatihan untuk indoktrinasi politik memang bermasalah, terutama pada saat dibutuhkan lebih banyak pelatihan. Menggunakan taktik usang, meski didukung oleh media sosial dan tradisional, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kampanye propaganda baru. Namun, para pemimpin kemungkinan besar memandang perlu indoktrinasi, mengingat pentingnya menjaga PLA benar-benar setia pada ideologi pemimpin Tiongkok baru dan PKT. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa PLA akan menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk menghasilkan perwira dan calon tamtama yang dibekali dengan pernyataan ideologis terbaru partai. □

REHAB TERORIS

PENDEKATAN SOSIAL DAN BUDAYA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEDUA BAGI TERORIS DI INDONESIA

NOOR HUDA ISMAIL

ILUSTRASI *FORUM*

Bom Bali pada tahun 2002 merupakan titik balik dalam hidup saya. Saat itu saya bekerja sebagai koresponden khusus untuk surat kabar *The Washington Post* yang meliput serangan itu yang menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar orang asing. Saya dengan cepat mengetahui dari konferensi pers polisi bahwa Fadlullah Hasan, teman sekamar saya ketika belajar di sebuah pondok pesantren di Solo, Jawa Tengah, Indonesia, selama enam tahun pada awal 1980-an, merupakan salah satu pelaku pengeboman.

Sejak hari itu, pertanyaan mengapa orang cerdas dan sopan yang bicaranya halus seperti Hasan terlibat dalam terorisme telah menjadi hal yang sangat pribadi bagi saya. Dalam mengejar jawaban atas pertanyaan ini, saya mewawancarai ratusan terpidana teroris di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengunjungi beberapa kamp militer mereka di Ambon dan Poso, dua daerah yang terdampak oleh konflik komunal setelah runtuhnya rezim Suharto pada tahun 1998.

Untuk meningkatkan pemahaman global saya tentang terorisme, saya mengajukan beasiswa Chevening Inggris untuk melanjutkan gelar magister saya di bidang keamanan internasional di St. Andrews University, Skotlandia, dari tahun 2005 hingga 2006. Saya melakukan pekerjaan lapangan di Irlandia Utara untuk memahami konflik di sana. Setelah bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang mencoba mengintegrasikan mantan teroris kembali ke masyarakat, saya mendapatkan pencerahan: Jika LSM ini bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya di negara saya saat saya kembali.

Pencarian pribadi itu dan hubungan historis dengan jaringan kelompok militan di Indonesia sangat penting dalam mengarahkan saya untuk mendirikan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) pada tahun 2008. Melalui YPP, saya memulai serangkaian intervensi sosial yang kontroversial untuk membantu mantan terpidana teroris, atau "mantan teroris", untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

TAK ADA ORANG YANG TERLAHIR SEBAGAI TERORIS

Pemahaman inti YPP adalah bahwa tak ada orang yang terlahir sebagai teroris. Untuk menjadi teroris, orang membutuhkan beberapa lintasan, mulai dari keluhan politik, ekonomi, dan keluarga seseorang hingga pentingnya tekanan sejawat serta peran kekerabatan multigenerasi tertentu.

Beberapa dari mereka yang ditangkap akhirnya akan dibebaskan. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk menangani mereka? Haruskah kita mengunci mereka di penjara dan membuang kuncinya? Atau haruskah kita merehabilitasi mereka sehingga mereka bisa kembali menjadi anggota komunitas yang berguna?

Menurut laporan 2013 oleh Institute of Policy Analysis of Conflict, sistem peradilan Indonesia tidak memiliki dana, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai untuk menangani rehabilitasi yang sukses terhadap mantan teroris. Kurangnya perawatan pasca-penahanan membuat narapidana teroris berisiko kembali melakukan kekerasan, karena mereka tidak dinilai dengan benar. Mereka tidak menerima pemrograman ulang yang memadai untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat arus utama.

Siswa SD memegang poster dalam unjuk rasa antiterorisme kecil di Jakarta Pusat, Indonesia. REUTERS

MERANGKUL KEGAGALAN DAN BERSIKAP FLEKSIBEL

Seruan untuk memberi kesempatan kedua kepada teroris yang telah dibebaskan untuk memulai hidup baru tidaklah mudah, terutama bagi seseorang yang berasal dari masyarakat sipil, seperti saya. Saya menghadapi beberapa tantangan. Bagi mereka yang merasakan derita langsung akibat terorisme, seperti korban dan keluarganya, rehabilitasi mantan teroris dapat menjadi hal yang kontroversial, bahkan menyinggung perasaan.

Terorisme juga bukan penyebab utama kematian di Indonesia. Strok, penyakit jantung iskemik, dan diabetes merupakan pembunuh teratas di negara ini, demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Itu berarti makan terlalu banyak donat dan minum soda kemungkinan besar membunuh lebih banyak orang Indonesia dibandingkan diserang oleh teroris.

Oleh karena itu, sebagai sebuah isu, terorisme di Indonesia sering kali masih dipandang oleh segmen tertentu komunitas Muslim sebagai upaya sistematis Barat untuk menyudutkan Islam. Sementara itu, bagi masyarakat, terorisme masih dianggap sebagai urusan pemerintah.

TERORIS MEMILIKI KEHIDUPAN SOSIAL

Farihin Kandai adalah klien pertama saya. Dia adalah veteran Afganistan yang berjuang bersama Osama bin

Laden pada pertengahan tahun 1980-an dan kembali ke Indonesia pada awal tahun 1990-an. Saya mengenal Farihin melalui pekerjaan saya sebagai jurnalis untuk *The Washington Post* pada tahun 2002. Kami langsung terhubung begitu ia mengatakan istrinya juga lulusan pondok pesantren saya, Al-Mukmin, Ngruki, Solo.

Saat mewawancarainya, saya mengetahui bahwa karena hubungan pribadinya dengan Hambali, seorang veteran Afganistan dari Jawa Barat yang kemudian bergabung dengan Al-Qaeda, Farihin terlibat dalam kegiatan terorisme di negara ini.

Setelah ia dibebaskan dari penjara, saya membantunya memulai hidup baru dengan menjalankan perkebunan kakao di Sulawesi Tengah. Usaha itu gagal karena ia jarang datang ke perkebunan. Ia punya istri kedua, yang membuatnya terlalu sibuk mengatur waktunya antara istri baru dan lama. Mungkin hubungan baru ini mencegahnya kembali ke dunia terorisme.

Saya memperoleh pelajaran penting dari intervensi ini: Terorisme adalah "pekerjaan paruh waktu" bagi sebagian besar orang Indonesia yang terlibat. Mereka memiliki kehidupan sosial selain bertempur. Bahkan, beberapa dari mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Farihin, memiliki waktu dan energi untuk memiliki istri kedua.

Ini membuat saya berpikir. Bayangkan apabila kita dapat memberi mereka aktivitas yang bermakna selain terorisme (selain mendorong mereka untuk menjadi poligamis), mungkin mereka tidak akan lagi mengejar karier sebagai teroris.

Wanita Indonesia menjelajahi toko buku Islam di dekat pondok pesantren Al-Mukmin, tempat banyak militan Islam bersekolah. REUTERS

Dalam salah satu pembicaraan saya dengan Farihin, ia memberi tahu saya bagaimana rasanya hidup di dalam kelompok kekerasan seperti Jemaah Islamiyah (JI).

"Menjadi bagian dari kelompok [teroris] merupakan perjalanan penuh petualangan," katanya. "Saya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri, Al-Qaeda. Hambali selalu mengatakan bahwa kami ingin mengubah sistem sekuler yang korup di dunia."

TERORISME ADALAH "PEKERJAAN PARUH WAKTU" BAGI SEBAGIAN BESAR ORANG INDONESIA YANG TERLIBAT. MEREKA MEMILIKI KEHIDUPAN SOSIAL SELAIN BERTEMPUR.

Ia berbicara penuh keyakinan dan otoritas. Perkataannya tidaklah unik di kalangan terpidana teroris yang pernah saya wawancarai. Mereka cenderung mengidentifikasi diri dengan komunitas yang jauh lebih besar, samar, sering kali transnasional, dan dibangun lebih ideologis, dan mereka mengklaim melakukan serangan atas nama komunitas tersebut.

Dengan latar belakang sebagai veteran Afganistan pada tahun 1980-an, ia mendapatkan respek sosial di dalam komunitas tertentu JI.

Kisah pahlawan gadungan yang sudah melakukan jihad, seperti Farihin, adalah alat propaganda penting untuk subbudaya jihad. Komunitas itu memfasilitasi, mendorong, merayakan, mendukung, dan memublikasikan tindakan mereka melalui artefak dan narasi yang diedarkan melalui teknologi dan budaya media global.

Kisah Farihin istimewa karena ia berasal dari keluarga jihadi terkemuka. Melalui hubungan kekerabatan ini, ia dipilih untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer di Afganistan pada tahun 1980-an.

Ia mengatakan bahwa pamannya terlibat dalam upaya membunuh presiden Indonesia pertama pada tahun 1950-an. Sebagian besar adiknya juga terlibat dalam terorisme di negara ini, termasuk pengeboman di rumah duta besar Filipina di Jakarta pada akhir tahun 1990-an, pengeboman Mal Atrium pada tahun 2000-an, dan pembakaran gereja selama konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah, pada tahun 2000-an. Singkatnya, terorisme adalah bisnis keluarga Farihin.

Kabar baiknya, menurut Farihin, adalah bahwa hidup sebagai teroris itu sulit dan membosankan. Itu membutuhkan kesiapan konstan, dan bukan aktivitas yang

Mahmudi Haryono, yang juga dikenal dengan alias militannya Yusuf Adirama, bekerja di restorannya di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Haryono merupakan contoh terkemuka bagaimana mantan jihadis dapat direhabilitasi menjadi anggota masyarakat yang produktif. THE ASSOCIATED PRESS

menarik bagi seorang pria berusia 50-an seperti Farihin, yang menginginkan stabilitas ekonomi untuk menghidupi keluarga barunya. Dengan kata lain, prioritas hidup Farihin telah berubah sejalan bertambahnya usia. Namun, semangat dan keinginannya untuk membela Islam jauh dari sirna.

"Menjadi *mujahid* [prajurit Islam] adalah identitas inti saya," jelasnya.

Jadi, Farihin marah ketika sekelompok laki-laki yang jauh lebih muda berkumpul di sebuah masjid di Menteng, Jakarta Pusat, menunjukkan dukungan mereka pada deklarasi kekhalifahan Islam oleh Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada pertengahan tahun 2014. Masjid itu hanya sepelemparan batu dari Kedutaan Besar A.S. di Jakarta.

Saya duduk bersamanya pada awal tahun 2015 untuk menanyakan alasannya tidak mendukung proyek kekhalifahan al-Baghdadi.

Ia menjelaskan bahwa mereka yang mendukung al-Baghdadi berpendapat bahwa semua umat Islam diperintahkan untuk menyatakan kesetiaan mereka padanya sebagai pemimpin kekhalifahan dan melakukan *hijrah* (migrasi) untuk mempertahankan wilayahnya dan memperluas perbatasannya di seluruh negara Muslim tradisional lainnya.

"Itu seruan omong kosong. Selain itu, para pendukung ISIS sama sekali tidak mengerti tentang jihad, oleh karena itu mereka tidak menghormati orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang jihad," ia menambahkan. "Sebagai veteran Afganistan, saya mengalami jihad. Kami bekerja sama erat dengan faksi lain yang memiliki keyakinan ideologis yang berbeda. Mengusir tentara Rusia dari tanah Muslim adalah hal yang menyatukan kami."

Mungkin karena pandangan anti-ISIS-nya, pihak berwenang Indonesia memanfaatkannya untuk menghentikan pengaruh ISIS di negara ini. Media, termasuk TV, juga mewawancarainya.

Menyaksikan ia berbicara di TV, saya dengan cepat menyadari bahwa ia sangat bersemangat mendidik masyarakat tentang bahaya ideologi ISIS. Ia dengan berani mengatakan bahwa ISIS tidak mewakili Islam karena kekejamannya.

Bisakah ia menjadi pegiat yang kredibel terhadap propaganda canggih ISIS?

Memang, penampilannya di TV tidak sempurna. Misalnya, ia menghabiskan banyak waktu memuliakan masa lalu kepahlawanannya sebagai veteran Afganistan. Akibatnya, ia tidak memiliki cukup waktu untuk secara sistematis menyoroti kemunafikan ISIS dengan argumen yang ringkas dan jelas. Ini termasuk narasi palsu ISIS tentang situasi yang sama-sama menguntungkan bagi rekrutan: Mereka akan menjadi martir di akhirat, setelah mati demi perjuangan, atau menjadi pahlawan dalam tatanan baru. Ini sesuatu yang orang-orang seperti saya dapat membantu mengartikulasikannya secara lebih jelas. Saya bisa memanfaatkan mantan teroris seperti Farihin sebagai agen perubahan potensial di dalam komunitas mereka sendiri.

Saya yakin perubahan internal lebih ampuh daripada membunuh mereka. Ini mencegah mereka menjadi martir dan menjadi kenangan guna menginspirasi orang lain

untuk menirunya. Kisah pribadi mereka meninggalkan jaringan kekerasan akan membantu mengungkapkan kemunafikan gerakan jihad agar dapat dilihat calon rekrutan.

Namun, saya sepenuhnya menyadari ada tantangan dengan penggunaan mantan teroris untuk melawan inisiatif ekstremisme kekerasan. Ini termasuk mempertahankan keaslian cerita mereka, mencegah mereka merasa sebagai selebritas, dan memastikan mereka tidak kembali ke militansi. Itu yang terjadi pada Abu Tholut dan Abdullah Sunata, yang dianggap "kooperatif" oleh kepolisian Indonesia namun kemudian terlibat dalam pelatihan militer Aceh pada tahun 2009 tidak lama setelah pembebasan mereka.

Dengan pertimbangan di atas, saya memutuskan untuk mengadakan lokakarya keterampilan komunikasi bagi para mantan teroris untuk menekankan pesan kemanusiaan daripada ideologi.

Bagi banyak jihadis seperti Farihin, ideologi Islam bukanlah titik masuk mereka ke dunia jihadisme. Mayoritas sama sekali tidak mengerti tentang agama. Mereka terutama masuk ke dalam terorisme melalui orang yang bergaul dengan mereka atau karena mereka pikir aspek militer terlihat keren. Mereka menggunakan pembenaran ideologis setelah mereka berada di dalam kelompok teroris.

LOKAKARYA KOMUNIKASI

Pada Agustus 2018, bersama tim YPP, saya mengadakan pelatihan komunikasi untuk 10 mantan teroris dan 20 *ustad*, atau guru — dosen universitas dan sarjana Muslim, yang terbagi rata antara laki-laki dan perempuan.

Para mantan teroris mewakili empat generasi: mereka yang bergabung dengan *mujahidin* yang didukung A.S. untuk melawan Soviet di Afganistan pada tahun 1980-an, dua mantan pejuang dari kelompok Muslim yang berusaha memaksakan aturan Islam di Filipina pada tahun 1990-an, dan enam veteran dari sengketa Muslim-Kristiani Indonesia. Generasi terbaru adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang pergi ke Suriah bersama lebih dari dua puluh anggota keluarganya untuk bergabung dengan ISIS.

Mantan teroris dan ustad dipasangkan dalam pengaturan di mana mantan teroris — disebut "malaikat" — akan memaksa ustad mereka — disebut "manusia" — dengan teks yang memberi semangat atau pengantaran makanan dari prasmanan restoran. Saya sengaja merancang intervensi sosial ini karena saya yakin bahwa perubahan dapat dimulai dari tindakan kebaikan yang sangat kecil.

Menanggapi teknik canggih militan menggunakan media baru untuk memobilisasi rekrutan dari seluruh penjuru dunia, materi literasi digital juga diperkenalkan.

Pengaruh ISIS telah berkurang sejak runtuhnya markasnya di Raqqa, Suriah. Namun, isu kemanusiaan internasional lainnya yang sedang terjadi yang melibatkan umat Islam seperti yang ada di Rakhine, Myanmar, atau nasib warga Uighur di Tiongkok dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh militan untuk menghidupkan kembali jaringan mereka di Indonesia.

Kartini Panggabean, tengah atas, mengajar di Pondok Pesantren Al Hidayah di Sei Mencirim, Sumatra Utara, Indonesia. Ia dan suaminya, mantan pengkhotbah radikal Khairul Ghazali, mendirikan sekolah untuk anak-anak militan yang ayahnya tewas dalam penyerbuan atau berada di penjara karena tindak pidana terorisme.
THE ASSOCIATED PRESS

Sebuah presentasi video menampilkan mantan militan Islam Mukhtar Daeng Lau dalam pertemuan mantan militan dan korban di Jakarta, Indonesia, pada Februari 2018.
THE ASSOCIATED PRESS

Media baru telah mengubah pola perekrutan. Dalam pola lama, perekrutan berlangsung murni melalui ruang offline, melalui khotbah agama, sekolah, persahabatan, dan kekerabatan. Dalam pola baru, perekrutan terjadi baik murni secara online maupun menggunakan kombinasi offline dan online.

Saya meminta teman Kristiani saya, Sahala Panjaitan, seorang ahli humas dan pencitraan merek digital, untuk berbagi kiat mengembangkan merek secara online. Sesinya bergema baik dengan mantan teroris karena terdapat banyak kesamaan antara mantan teroris dan pengusaha. Seperti pengusaha, mantan teroris adalah pengambil risiko, orang yang pintar bergaul, pencerita, dan dengan cara mereka sendiri, sering kali karismatik.

Gullnaz Baig, seorang spesialis kontra ekstremisme dari Facebook, terbang dari Singapura untuk berbicara tentang kebijakan berbagi konten perusahaan. Sementara itu, untuk menunjukkan kepada mantan teroris cara membantu orang lain, saya mengundang Hassan Ahmad, seorang pekerja bantuan kemanusiaan dari Singapura, untuk berbagi misinya ke Afganistan, Yaman, dan Jepang.

Peserta lokakarya diminta untuk tetap terhubung melalui situs web komunitas yang disebut www.ruangobrol.id, sebuah platform online bagi peserta untuk berbagi cerita. Alumni lokakarya ini masih terhubung melalui grup WhatsApp.

Untuk memastikan keberlanjutan situs web, saya mengubahnya menjadi prakarsa usaha sosial di bawah perusahaan baru bernama PT Kreasi Prasasti Perdamaian. Melalui perusahaan ini, saya berfokus pada dua kegiatan utama: produksi film dan penerbitan buku. Saya sengaja memilih gaya dokumenter untuk memberikan keaslian pada kisah tersebut. Film dipadukan dengan penerbitan buku dengan topik serupa. Begitu film dan buku siap, kami dapat menggunakannya untuk tujuan pencegahan dengan mengadakan serangkaian pemutaran film dan sesi berbagi.

Penggunaan film untuk kampanye kontra ekstremisme kekerasan bukan pendekatan baru bagi saya. Saya sudah memproduksi tiga film dokumenter:

1. *Prison and Paradise* memenangkan Festival Film Yamagata di Jepang. Film ini menampilkan wawancara dengan tiga pelaku bom Bali pertama dan keluarga mereka. Film ini sudah diputar di dalam dan luar negeri.
2. *Jihad Selfie* sudah ditayangkan lebih dari 400 kali di Indonesia dan luar negeri. Film ini mengisahkan kehidupan Akbar Maulana, seorang calon pejuang

Pejabat pemerintah, mantan militan, dan penyintas serangan teror menghadiri pertemuan korban- teroris. THE ASSOCIATED PRESS

ISIS yang memutuskan mengabaikan niatnya untuk berjuang karena hubungannya yang erat dengan orang tuanya. Menteri Luar Negeri Indonesia menggunakan film ini sebagai kampanye pencegahan untuk diaspora Indonesia.

3. *Pengantin* adalah film yang menceritakan kisah tiga perempuan pekerja migran Indonesia yang mencari cinta di media sosial. Film ini secara khusus menargetkan radikalisasi online di kalangan pekerja migran Indonesia.

Saya sedang memproduksi film dokumenter berjudul *Seeking the Imam-Raqqa and Back*. Film ini mengisahkan kehidupan seorang gadis berusia 19 tahun yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS bersama keluarganya.

Untuk proyek 2019, saya menyusun proposal untuk film dokumenter berjudul *Cubs of Caliphate*. Film ini akan mengeksplorasi kehidupan anak-anak yang direkrut untuk bergabung dengan ISIS.

KESEMPATAN KEDUA

Beberapa terpidana teroris akhirnya akan dibebaskan. Mereka harus punya masa depan. Ini tidak hanya baik untuk mereka dan keluarga, terutama untuk istri dan anak-anak mereka, tetapi juga untuk masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus secara halus berinvestasi dalam pelatihan vokasi untuk pekerjaan pasca-pembebasan dan pilihan hidup untuk mengurangi peluang residivisme. Namun, cerita mantan teroris juga dapat digunakan untuk program yang melawan ekstremisme kekerasan (CVE). CVE tidak menggantikan pendekatan "tangkap atau bunuh", tetapi menyerukan intervensi sosial yang sistematis untuk menghentikan proses radikalisasi dari penyangkalan atau pencegahan agar calon rekrutan tidak terlibat dalam tindakan kekerasan dan rehabilitasi pelaku kekerasan yang ditangkap. Dengan kata lain, CVE adalah tentang pencegahan.

Mencegah kekerasan dan mengubah ideologi radikal tetap menjadi prinsip panduan dalam program rehabilitasi. Transformasi ini hanya dapat terjadi melalui pendekatan multidimensi. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sepenuhnya, program tidak hanya harus berfokus pada kesejahteraan mental dan psikologis seseorang, tetapi hubungan sosial, ekonomi, dan masyarakat juga harus dipertimbangkan.

Semua kepingan ini saling terhubung. Mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan untuk rehabilitasi mengurangi kemungkinan kegagalan di jalan menuju reintegrasi □

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Untuk menerapkan program yang melawan ekstremisme kekerasan, gunakan budaya populer, termasuk film dokumenter, buku, komik, dan situs web komunitas, untuk melindungi kawula muda di ruang online dan offline sehingga mereka tidak akan berpaling ke radikalisasi. Penggunaan berbagai media akan efektif untuk memicu percakapan tentang permasalahan sensitif di lingkungan yang aman.

2. Program kontra ekstremisme kekerasan (CVE) harus lebih dari sekadar penyampaian slogan umum seperti "Islam agama damai" atau "Terorisme bukan Islam". Kegiatan tingkat komunitas, komunikasi interpersonal, dan penggunaan media interaktif seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram, harus mendukung program CVE.

DIALOG PERAIRAN DALAM

India dapat memperluas jangkauan maritim dengan membangun pelabuhan Indonesia

STAF *FORUM*

Berlokasi strategis di ujung utara Sumatra di titik masuk ke Selat Malaka, pelabuhan Sabang Indonesia mungkin akan segera memperoleh perombakan yang mungkin mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Samudra Hindia (IOR).

Indonesia dan India pada Mei 2018 mengumumkan bahwa mereka akan membentuk satuan tugas untuk "mengerjakan proyek infrastruktur terkait pelabuhan di dalam dan sekitar" pelabuhan Sabang. Sabang adalah sebuah kota di Pulau Weh, Sumatra bagian utara. India berjanji untuk membiayai peningkatan infrastruktur, dan sebagai imbalannya, India akan mendapatkan akses komersial dan kemungkinan akses militer ke pelabuhan tersebut. Luhut Pandjaitan, menteri koordinator bidang kemaritiman Indonesia, mengatakan bahwa pelabuhan itu bisa menjadi tempat berlabuh kapal dan kapal selam, demikian menurut *Eurasia Review*, sebuah jurnal independen dan wadah pemikir.

Meski tujuan kemitraan dinyatakan untuk meningkatkan pariwisata dan mengatasi permasalahan "ekonomi biru" seperti industri perikanan, kemitraan ini memiliki manfaat militer yang jelas, demikian pendapat para ahli. Akses ke pelabuhan tersebut akan memberi India cara lain untuk memeriksa meluasnya jangkauan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di IOR, yang telah meningkat melalui beberapa kemitraan sebagai bagian dari strateginya yang disebut Untaian Mutiara.

"Tak terbantahkan, India dan Indonesia berbagi keprihatinan tentang ketidakpastian kebangkitan Tiongkok," ungkap Laksamana Pertama (Purn.) Abhay Kumar Singh dari Angkatan Laut India kepada *FORUM*. Singh, seorang research fellow di Institute for Defence Studies and Analyses, mengatakan bahwa kedua negara percaya bahwa kemitraan itu meningkatkan keamanan regional.

"Kedua negara [India dan Indonesia] ingin melihat perkembangan tatanan regional multipolar di mana mereka diakui secara internasional sebagai kekuatan regional," katanya.

Singh menambahkan bahwa pernyataan bersama yang dikeluarkan usai kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada Mei 2018 menekankan bahwa peningkatan kerja sama maritim dapat "menjadi kekuatan stabilitas yang besar di kawasan ini."

"Kedua negara menganggap kemitraan strategis bilateral berguna dalam menyeimbangkan pertumbuhan pengaruh Tiongkok di kawasan ini," kata Singh.

SIGNIFIKANSI STRATEGIS

Beberapa ahli berpendapat bahwa pelabuhan itu lebih cocok untuk penggunaan militer daripada pengembangan komersial.

"Pelabuhan ini, karena ukurannya yang kecil dan jarak dari pedalaman inti Indonesia dan penguasa ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), tidak kondusif untuk perdagangan maritim jarak jauh," tulis Angshuman Choudhury, seorang peneliti dan koordinator Program Penelitian Asia Tenggara kepada *Eurasia Review*.

"Di sisi lain, lokasi khas Sabang, hanya 90 mil laut di bawah ujung paling selatan kepulauan Andaman dan Nicobar India, memberinya keuntungan strategis yang sangat penting untuk memfasilitasi pengintaian maritim yang lebih luas di dalam dan sekitar Laut Andaman selama masa damai; blokade preemtif Selat Malaka selama masa perang; dan sebagai pangkalan terdekat untuk manuver strategis tambahan di sisi timur IOR." Pulau ini sudah memiliki bandara operasional, yang dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi pesawat militer, tulis Choudhury.

Militer Indonesia berjaga di pelabuhan Sabang di provinsi Aceh, Indonesia. THE ASSOCIATED PRESS

Kerja sama militer sudah berlangsung di Sabang. Pada Juni 2018, INS Sumitra, kapal patroli Angkatan Laut India, mengunjungi pelabuhan tersebut. Kapal itu disambut dengan upacara yang melibatkan penari tradisional Indonesia, serta kehadiran R.K. Rawat, duta besar India untuk Indonesia, demikian menurut *Business Standard*, sebuah surat kabar harian berbahasa Inggris di India.

Namun, menandingi keberadaan angkatan laut RRT di Samudra Hindia bukan satu-satunya manfaat

dari kemitraan pelabuhan ini. Singh menunjukkan bahwa melindungi beberapa jalur pelayaran paling sibuk di dunia sangat penting. Menganut visi bersama tentang kerja sama maritim di Indo-Pasifik "mencerminkan penguatan progresif kerja sama maritim," katanya.

Sabang "memiliki kepentingan strategis yang signifikan berkat lokasinya yang berada di Six Degree Channel, yang juga dikenal dengan nama Great Channel. Tiga rute laut utama Samudra Hindia berasal dari atau menuju ke Tanjung Harapan, Teluk Aden dan Selat Hormuz bertemu di Great Channel," katanya. "Sebagai alur keluar dan pengumpan utama Selat Malaka, Great Channel atau Six Degree Channel sangat penting untuk penggunaan Selat Malaka melalui pelayaran maritim."

Ia menceritakan sejarah pembajakan di laut sekitar provinsi Aceh tempat Sabang berada dan mengatakan bahwa hal itu masih menjadi keprihatinan besar.

MENINGKATNYA KEBERADAAN TIONGKOK

Keberadaan maritim RRT di IOR berkembang pesat selama lima tahun terakhir dengan perjanjian pelabuhan dwiguna dengan Myanmar, Djibouti, Maladewa, Pakistan, dan Tanzania, tulis Choudhury. Strategi Untaian Mutiara di mana RRT menetapkan serangkaian nodus kekuatan militer dan ekonomi di seluruh kawasan ini dapat ditandingi jika India menerima kerja sama dari negara-negara Asia Selatan dan Tenggara lainnya, termasuk Myanmar, Malaysia, Sri Lanka, dan Thailand, katanya.

"Dalam konteks ini, New Delhi telah mencapai perkembangan dengan memajukan kerangka kerja konvergensi strategis yang mulai terbentuk di IOR melalui koordinasi antarkekuatan, patroli maritim bersama, latihan angkatan laut, dan berbagi intelijen waktu nyata dengan negara-negara litoral," tulisnya. "Namun, New Delhi tidak boleh beranggapan bahwa negara-negara litoral kecil akan mendukung India tanpa syarat jika terjadi konfrontasi dengan Beijing di IOR."

Dalam beberapa kasus, RRT menggunakan tekanan ekonomi untuk mendapatkan akses ke pelabuhan di kawasan ini. Di Sri Lanka, misalnya, pemerintah secara ekonomi dipaksa oleh RRT untuk memberi pemerintah Tiongkok sewa selama 99 tahun untuk mengendalikan pelabuhan Hambantota ketika Sri Lanka tidak mampu membayar pinjaman Tiongkok untuk pembangunannya.

Di Gwadar, Pakistan, pemerintah Tiongkok menyediakan investasi dan pinjaman senilai 643.5 triliun rupiah (46 miliar dolar A.S.) untuk membangun proyek energi dan infrastruktur sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan. RRT, sebagai imbalannya, mengambil kepemilikan Pelabuhan Gwadar di timur laut Selat Hormuz.

Meski militer Pakistan mengatakan bahwa

LOKASI PELABUHAN SABANG

ILUSTRASI *FORUM*

RRT belum meminta akses angkatan laut ke pelabuhan perairan dalam, pejabat dari India dan Amerika Serikat telah memilih Gwadar sebagai kemungkinan lokasi pangkalan militer Tiongkok di masa mendatang, demikian menurut berbagai laporan media. Dilansir Reuters, Tiongkok dan Pakistan berencana mengubah Gwadar menjadi pusat transshipment dan megaport. Jalur pipa energi, jalur kereta, dan jalan akan menghubungkan Gwadar ke kawasan barat Tiongkok.

Dengan kepentingannya yang intens di kawasan ini, pemerintah Tiongkok memberikan perhatian khusus pada perjanjian baru antara Indonesia dan India di Sabang. Prospek kerja sama militer di pelabuhan ini membangkitkan retorika rawan perdebatan dari surat kabar Tiongkok *Global Times*.

Tentara berbaris selama parade di pelabuhan Sabang untuk memperingati ulang tahun ke-73 berdirinya militer Indonesia. AFP/GETTY IMAGES

"Tiongkok selalu menjaga sikap positif terhadap investasi pelabuhan luar negeri India di negara Asia Tenggara, langkah yang dapat memajukan integrasi ekonomi regional, namun itu tidak berarti Tiongkok akan mengabaikan kemungkinan kerja sama militer antara India dan Indonesia di Sabang," tulis surat kabar itu pada Mei 2018. "Penggunaan Selat Malaka yang tinggi oleh Tiongkok berarti keamanan ekonomi dan energinya sedikit banyak terkait dengan rute perdagangan di selat ini. Jika India benar-benar mengupayakan akses militer ke pulau strategis Sabang, negara ini mungkin secara keliru menjebak dirinya dalam persaingan strategis dengan Tiongkok dan akhirnya mencelakai diri sendiri."

MITRA LAMA

Retorika itu kemungkinan tidak akan membentuk kemitraan selama beberapa dasawarsa antara India dan Indonesia. Sebagai tetangga litoral yang berbagi batas maritim di Samudra Hindia Timur, kedua negara ini memiliki tantangan keamanan dan kepentingan yang sama, kata Singh. "Ini menyediakan lingkungan yang ideal untuk meningkatkan jalur kerja sama maritim antara India dan Indonesia."

Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Indonesia memiliki "kerja sama yang erat" kata Singh, sejak tahun 1950-an. Singh, yang berspesialisasi dalam perang rudal dan meriam dalam karier angkatan lautnya selama 27 tahun, mengatakan bahwa kedua angkatan laut menandatangani perjanjian keamanan pertama pada tahun 1958 dan melakukan latihan angkatan laut bersama pertama pada Juli 1960. Sebagian akibat dinamika Perang Dingin dan divergensi dalam "persepsi regional", hubungan militer mengendur pada tahun 1960-an dan 1970-an, kata Singh.

Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, "ada konvergensi yang signifikan dari persepsi strategis kedua negara dan peningkatan yang dihasilkan dalam kerja sama maritim, yang sekarang mencakup latihan bilateral rutin, patroli terkoordinasi, kerja sama mengenai kesadaran domain maritim, dan pertukaran pelatihan antar kedua angkatan laut," ungkapnya.

Sedangkan untuk proyek Sabang, pelabuhan akan memberi Angkatan Laut India pangkalan logistik dan pasokan ulang untuk mempertahankan operasi di Samudra Hindia timur dan Selat Malaka. Hal ini juga dapat "meningkatkan kemampuan Angkatan Laut India untuk menanggapi keadaan darurat kemanusiaan, memberikan bantuan bencana, dan melakukan patroli anti-pembajakan," ungkap sebuah artikel di The Diplomat, sebuah majalah berita online.

Jadi, baik misi merupakan bantuan kemanusiaan, patroli anti-pembajakan, atau melindungi jalur pelayaran, menempa kemitraan yang langgeng dengan tetangga untuk meningkatkan keamanan maritim masuk di akal dari segi strategi, kata Singh. "Indonesia merupakan mitra penting bagi India berkat posisi geografisnya yang strategis," katanya. "Kemitraan yang erat antara kedua angkatan laut bertujuan memastikan stabilitas strategis di salah satu area Indo-Pasifik yang paling penting." □

HARI BARU BAGI PERTAHANAN JEPANG

Anggota Pasukan Bela Diri Darat Jepang mendengarkan instruktur sebelum berpartisipasi dalam latihan baku tembak dengan amunisi aktif di Camp Pendleton, California, pada Januari 2019. REUTERS

JEPANG MEMPERKUAT ARSITEKTUR PERTAHANAN NASIONALNYA DI TENGAH BERUBAHNYA LINGKUNGAN KEAMANAN

STAF *FORUM*

Lingkungan keamanan yang berubah drastis di Indo-Pasifik dan seluruh dunia telah mendorong Jepang untuk memperbarui tanggung jawab keamanan nasionalnya. Karakteristik cinta damai yang ditunjukkan Jepang sejak Perang Dunia II akan tetap ada, demikian menurut Pedoman Program Pertahanan Nasional Jepang (NDPG), seiring negara ini memulai arah baru untuk memperluas kemampuan militernya guna memastikan Jepang bertahan dan berkembang melawan segala ancaman, serta warga negara dan kedaulatannya tetap terlindungi.

Pedoman ini, diterbitkan pada 18 Desember 2018, memberikan wawasan bagaimana pemerintah dan Kementerian Pertahanan Jepang bermaksud mencapainya. "Jepang, di tengah lingkungan keamanan yang berubah drastis, perlu secara fundamental memperkuat arsitektur pertahanan nasionalnya yang digunakan untuk melindungi, dengan melakukan upaya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, kehidupan, orang, dan properti tanah, air, dan ruang udara teritorial, nasionalnya, serta kedaulatan dan kemerdekaannya, sehingga memperluas peran yang dapat dipenuhi Jepang," ungkap NDPG.

Takeshi Iwaya, yang menjadi menteri pertahanan Jepang pada Oktober 2018, berbicara tentang NDPG terbaru dalam kunjungan ke Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C., pada Januari 2019.

Iwaya menyoroti tiga prinsip dasar NDPG.

- Pertama, Jepang akan meningkatkan posturnya untuk pertahanan nasional. "Sebagai negara berdaulat, kami akan terus melakukan upaya untuk menjamin keamanan kami secara proaktif atas kemauan kami sendiri. Dengan melakukan upaya itu, kami akan berkontribusi langsung terhadap aliansi Jepang-A.S. yang lebih kuat."
- Kedua, Jepang akan semakin memperkuat aliansi Jepang-A.S. "Kami akan mempercepat upaya kami sesuai dengan pedoman kerja sama pertahanan Jepang-A.S. guna meningkatkan kemampuan aliansi untuk mencegah dan melawan ancaman."
- Ketiga, di bawah visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, Jepang akan secara strategis meningkatkan kerja sama dengan negara yang memiliki nilai universal dan kepentingan keamanan yang sama. "Aliansi Jepang-A.S. akan diposisikan sebagai landasan dalam memajukan kerja sama tersebut. Untuk meningkatkan postur pertahanan Jepang, kami telah memperkenalkan pasukan pertahanan multiranah sebagai konsep untuk lebih mewujudkan kemampuan pertahanan kami yang efektif. Kunci untuk mengintegrasikan pasukan pertahanan multiranah ini terletak pada pengembangan operasi lintas ranah kami."

Melaksanakan prinsip ini sangat penting bagi pencegahan dan tanggapan Jepang terhadap ancaman superior. Berhasil mematuhi konsep NDPG ini akan memungkinkan Jepang mengatasi segala kekurangan dalam ranah individual, tambah Iwaya.

"Untuk tujuan ini, Jepang akan menekankan upaya untuk memperoleh dan memperkuat kemampuan kami dalam ranah baru ruang angkasa, ruang siber, dan spektrum elektromagnetik," ujar Iwaya. "Selain itu, untuk kemampuan dalam ranah tradisional, kami akan berusaha membangun keunggulan maritim dan udara serta memperkuat kemampuan kami ... dari daya tembak serta pertahanan rudal dan udara yang komprehensif. Pada akhirnya, tujuan kami adalah untuk mengintegrasikan kemampuan secara organik di semua ranah, baik dalam ranah baru maupun ranah tradisional, untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat kekuatan secara keseluruhan."

Selama lima tahun ke depan, Jepang akan "secara signifikan meningkatkan" kemampuan pertahanannya dan berupaya untuk lebih memperkuat aliansi Jepang-A.S. berdasarkan pedoman kerja sama pertahanan, demikian kata Iwaya. "Lingkungan keamanan internasional yang dihadapi aliansi kami saat ini tidaklah mudah, seperti yang Anda ketahui. Tetapi saya yakin bahwa arah yang diambil Jepang dan Amerika Serikat jauh lebih selaras dibandingkan sebelumnya."

Lingkungan keamanan di sekitar Jepang berubah dengan "kecepatan yang sangat tinggi" ungkap NDPG. Perubahan dalam keseimbangan kekuatan internasional semakin cepat dan menjadi semakin kompleks, sehingga meningkatkan ketidakpastian atas tatanan yang ada.

"Selain itu, ekspansi yang cepat dalam penggunaan ranah baru, yaitu ruang angkasa, ruang siber, dan spektrum elektromagnetik, siap untuk secara fundamental mengubah paradigma keamanan nasional yang ada," ungkap NDPG, "yang telah memprioritaskan tanggapan dalam ranah fisik tradisional, yaitu darat, laut, dan udara."

MENGEMBANGKAN KEKUATAN MULTIRANAH

Target pengeluaran pertahanan Jepang selama lima tahun ke depan diperkirakan sebesar 3.425,6 triliun rupiah (245,3 miliar dolar A.S.) — meningkat 11%, atau 349,1 triliun rupiah (25 miliar dolar A.S.) lebih besar dari anggaran dalam program pertahanan jangka menengah sebelumnya, yang menetapkan pengeluaran pertahanan untuk pengadaan selama periode lima tahun. Iwaya mengatakan bahwa pengeluaran yang mencetak rekor ini diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan yang diuraikan dalam NDPG.

"Ini menunjukkan tekad kami yang kuat terhadap pertahanan nasional kami," ungkapnya.

Per tahun fiskal 2022, Jepang akan membentuk unit misi ranah ruang angkasa guna memastikan keunggulan dalam penggunaan ruang angkasa di semua tahap, dari masa damai hingga kontingensi, ujar Iwaya. Per tahun fiskal 2023, Jepang akan membentuk unit pertahanan siber di bawah komando menteri pertahanan.

"Ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan siber di dalam negeri, termasuk kemampuan menghambat penggunaan ruang siber oleh lawan dalam serangan bersenjatanya terhadap Jepang," kata Iwaya. "Selain itu, dalam hal penguatan kemampuan kami di ranah tradisional, kami akan memprioritaskan implementasinya untuk secara efektif menangani serangan bersenjata dari pesawat, kapal, dan rudal terhadap Jepang."

Kabinet Jepang pada tahun 2018 setuju untuk menambah pesanan pesawat F-35 A.S. dari 42 menjadi 147 pesawat, yang mencakup 63 pesawat F-35A dan 42 pesawat F-35B. F-35B adalah pesawat F-35 versi lepas landas pendek dan pendaratan vertikal milik Pasukan Marinir A.S. Sebagian besar F-35A akan dirakit secara lokal di Nagoya dan dikirim per akhir tahun fiskal 2022, demikian yang dilansir majalah online The Diplomat.

Menteri pertahanan mengatakan bahwa Jepang akan melanjutkan pengadaan rudal standoff untuk melindungi ancaman terhadap kapal atau pasukan pendaratan. Pemerintah juga melakukan penelitian dan pengembangan proyektil penggiling hipervelositas untuk melindungi pulau-pulau terpencilnya.

"Melalui pengembangan ini, kami bertujuan membangun postur pertahanan yang memadai untuk melawan segala jenis ancaman guna mempertahankan wilayah Jepang setiap saat," kata Iwaya. "Kami akan mencoba melakukannya di bawah komando dan kendali terpadu, menggabungkan semua kekuatan."

Jepang mengembangkan unit laut pertamanya sejak Perang Dunia II, Brigade Pengerahan Cepat

PERTAHANAN RUDAL JEPANG

Jepang memperluas kemampuan pertahanan rudal balistiknya (BMD) dengan sistem Aegis Ashore buatan A.S. untuk melawan ancaman yang semakin besar dari roket Korea Utara. Versi berbasis darat dari sistem Aegis BMD, yang akan dipasang di dua pangkalan Jepang, akan beroperasi pada tahun 2023. Jepang sedang mengevaluasi pembelian Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan A.S.

Stasiun Radar
Jaringan radar darat, termasuk radar deteksi dan pelacakan yang kuat (FPS-3 dan FPS-5), mendukung strategi BMD Jepang.

BMD Berbasis Laut

Jepang menambah armada kapal perusak Aegis yang mengerahkan rudal berbasis kapal dari enam menjadi delapan kapal dan membeli versi mutakhir Standard Missile 3, yang mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah.

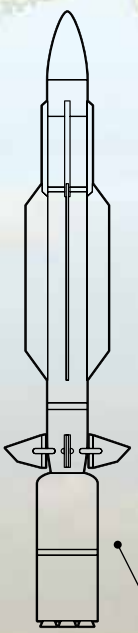

RIM-161 Standard Missile 3

Panjang:	6,5 meter
Jangkauan:	500 kilometer
Berat:	1,5 ton

BMD Berbasis Darat

BMD Jepang juga mencakup sistem rudal pertahanan udara Patriot PAC-3, yang sekarang dikerahkan di 17 batalion di seluruh negeri, untuk pertahanan titik target tertentu, seperti kota, dengan mencegat hulu ledak dalam fase terminal.

Rudal PAC-3 MIM-104F
Hulu ledak fragmentasi 73 kilogram

Panjang:	5,2 meter
Jangkauan:	15 kilometer
Berat:	312 kilogram

Sebuah unit rudal PAC-3 dikerahkan di Kementerian Pertahanan di Tokyo menghadapi penembakan rudal Korea Utara pada Agustus 2017.

THE ASSOCIATED PRESS

Kapal Perusak Kelas Kongo

Panjang:	161 meter
Berat benaman:	9.500 ton
Kecepatan puncak:	30 knot
Kru:	300

Empat kapal perusak kelas Kongo dan dua kapal perusak kelas Atago dengan **sistem antirudal Aegis:**

- Radar dengan cakupan 360 derajat
- Dapat melacak 100 target pada jarak 200 kilometer secara bersamaan.

Kapal perusak rudal berpemandu Kapal Pertahanan Jepang Kongo, depan, berlayar bersama kapal perusak rudal berpemandu USS Stethem di perairan selatan Jepang dalam latihan untuk meningkatkan interoperabilitas antara pasukan Jepang dan A.S. dalam operasi udara dan laut.

SERSAN DUA DANIEL JAMES LEWIS/ANGKATAN LAUT A.S.

Sumber: Graphic News, Reuters

Amfibi Pasukan Bela Diri Darat Jepang (JGSDF), untuk meningkatkan kemampuan interdiksi di pulau-pulau terpencil, demikian ungkap NDPG. JGSDF memperkenalkan kendaraan serbu amfibi sendiri dan membuktikan kekuatan serbu amfibinya dalam Iron Fist 2019.

ANCAMAN DARI TIONGKOK, KOREA UTARA, DAN RUSIA

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat dalam upaya paksa unilateral untuk mengubah status quo berdasarkan pernyataannya sendiri yang tidak sejalan dengan tatanan internasional yang ada, demikian ungkap NDPG. Di Laut Cina Timur, misalnya, RRT telah memperluas dan meningkatkan aktivitas militernya di laut dan udara. Di dekat Kepulauan Senkaku, bagian dari wilayah Jepang, personel RRT terus melanggar perairan Jepang meski adanya protes terhadap kapal angkatan laut Tiongkok yang berlayar di dekatnya.

"Perkembangan militer Tiongkok tersebut dan yang lainnya, ditambah dengan kurangnya transparansi seputar kebijakan pertahanan dan kekuatan militernya, merupakan keprihatinan keamanan yang serius bagi kawasan ini, termasuk Jepang, dan bagi masyarakat internasional," ungkap NDPG. "Jepang harus terus memberikan perhatikan besar pada perkembangan ini. Tiongkok sangat diharapkan untuk memainkan peran aktif dengan cara yang lebih kooperatif di kawasan ini dan komunitas internasional."

Anggota Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Marinir dan Pelaut A.S. berpartisipasi dalam latihan pendaratan amfibi selama Iron Fist 2019.

KOPTU CUTLER BRICE/PASUKAN MARINIR A.S.

Jepang juga khawatir tentang peluncuran rudal balistik Korea Utara dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara diyakini memiliki unit siber berskala besar yang mampu mencuri rahasia militer dan mengembangkan cara untuk menyerang infrastruktur kritis di negara asing.

"Perkembangan militer Korea Utara tersebut menimbulkan ancaman serius dan mendesak bagi keamanan Jepang dan secara signifikan merongrong perdamaian dan keamanan kawasan ini dan komunitas internasional," ungkap NDPG. "Melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional juga telah jelas menyatakan bahwa kegiatan Korea Utara terkait nuklir dan balistik merupakan ancaman nyata terhadap perdamaian dan keamanan internasional." Ancaman itu terus berlanjut saat Korea Utara melakukan uji coba penembakan yang tampaknya seperti rudal jarak pendek beberapa kali pada April dan Mei 2019, demikian yang dilansir Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Rusia adalah negara ketiga yang berpotensi menyebabkan ketegangan regional terbesar. Rusia memodernisasi militernya dan berfokus pada kekuatan nuklir. "Oleh karena itu, perhatian yang saksama harus diberikan pada perkembangan ini," ungkap NDPG.

Jepang berencana mengawasi aktivitas militer Rusia dengan ketat karena adanya tren menuju Lingkaran Arktika, Eropa, daerah di sekitar A.S., dan Timur Tengah, serta Timur Jauh — termasuk Wilayah Utara Jepang.

"Meski kemungkinan konflik militer berskala besar antara negara-negara besar, yang menjadi keprihatinan selama era Perang Dingin, tetap rendah, lingkungan keamanan Jepang menjadi semakin sulit dan tidak pasti dengan laju yang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan," demikian menurut NDPG.

KEKUATAN DIPLOMATIK

Memperkuat hubungan diplomatik merupakan bagian dari pedoman pertahanan terbaru demikian pula halnya memperkuat kemampuan pertahanan. Visi bersama akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sangat penting bagi kemitraan Jepang.

"Seraya munculnya persaingan antarnegara yang kentara, kini semakin penting bagi keamanan nasional Jepang untuk lebih memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat, yang memiliki nilai universal dan kepentingan strategis yang sama," ungkap NDPG.

Dengan aliansi Jepang-A.S. sebagai landasan, Jepang akan secara strategis memajukan kerja sama keamanan internasional dengan berkoordinasi erat dengan negara-negara yang memiliki nilai universal dan kepentingan keamanan yang sama, seperti Australia, India, dan negara-negara Asia Tenggara, demikian kata menteri pertahanan.

NDPG mengatakan bahwa Jepang akan mengupayakan pertukaran dan kerja sama pertahanan, termasuk pelatihan dan latihan bersama, peralatan pertahanan serta kerja sama dan pertukaran teknologi antar cabang militer.

"Saya benar-benar percaya bahwa upaya kami akan berkontribusi untuk mendukung perdamaian dan stabilitas tidak hanya di Jepang," kata Iwaya, "tetapi juga di Amerika Serikat, sekutu dan teman terpenting kami, dan pada akhirnya di Pasifik serta di seluruh dunia." □

SIMBOL kebebasan

ANGKATAN DARAT A.S.

Mayor Jenderal Viet Xuan Luong

KOMANDAN ANGKATAN DARAT A.S. DI JEPANG MEMBAGIKAN BAGAIMANA PENYELAMATAN KELUARGANYA DARI SAIGON MEMICU KEINGINANNYA UNTUK MELAYANI

STAF *FORUM*

Peristiwa dan gambaran pada 30 April 1975, tetap segar dalam benak Mayor Jenderal Viet Xuan Luong. Buku-buku sejarah menyebutkan tanggal itu sebagai jatuhnya Saigon, hari ketika Komunis Vietnam Utara dan Viet Cong merebut ibu kota Vietnam Selatan, memaksa Vietnam Selatan untuk menyerah, dan mengakhiri Perang Vietnam.

Bagi Luong, komandan Angkatan Darat A.S. di Jepang, tanggal itu selamanya akan dikenal sebagai hari ketika hidupnya dan hidup keluarganya berubah selamanya. Pada tanggal itulah Luong yang berusia 9 tahun dan keluarganya menemukan diri mereka berada dalam situasi yang sepertinya sudah tidak memiliki harapan di bandara Tan Son Nhut, Saigon. Pada saat teman-teman Amerika dari ayah Luong, seorang perwira infanteri Marinir Vietnam, telah berhasil membantu mendapatkan dokumen yang diperlukan keluarganya untuk meninggalkan negara itu, bandara itu telah ditutup.

"Kami pikir kami sudah ditakdirkan untuk mati," kenang Luong pada Desember 2018 saat wawancara dengan History Channel Jepang dan *FORUM* di Yama Sakura, latihan bilateral tahunan antara Jepang dan Amerika Serikat. "Kami dibombardir tidak hanya dengan serangan udara dan pengeboman pesawat terbang, tetapi juga dengan tembakan artileri dan mortir. Kami kira kami pasti akan menemui ajal."

Tanpa diketahui keluarga Luong, Operasi Frequent Wind sedang berlangsung. Operasi yang dipimpin A.S. itu merupakan evakuasi helikopter terbesar dalam sejarah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 81 helikopter menyelamatkan lebih dari 1.000 warga Amerika dan hampir 6.000 warga Vietnam ke kapal induk di lepas pantai Vietnam, demikian menurut History.com.

Keluarga Luong termasuk di antara mereka yang diangkut ke USS Hancock.

Luong mengingat "dengan sangat jelas" saat mendarat di kapal induk itu. Luong mengatakan bahwa kebanyakan orang mengira mereka telah dibawa ke suatu pulau di lepas pantai Vietnam karena kapal itu sangat besar.

"Saya menarik-narik baju ayah saya, dan saya mengatakan, 'Di mana kita berada?'" kenang Luong, mencoba menahan air mata ketika tetesan air matanya mulai jatuh ke pipinya. "Dan ayah saya mengatakan, 'Nak, kamu berada di atas USS Hancock, kapal induk dari Armada ke-7.'"

"Dan karena masih kanak-kanak, saya tidak tahu apa artinya itu. Saya bertanya kepada ayah saya, 'Apa artinya?'" Ayah Luong menatap putranya dan menjawab: "Itu artinya tidak ada apa pun di dunia ini yang dapat membahayakan dirimu sekarang."

"Kisah itu mungkin tampak agak dibuat-buat, tetapi saya tahu berdasarkan pengalaman saya saat itu bahwa saya akan membalas utang budi terhadap negara kita, dan

saya tahu saya akan bergabung di militer agar mampu melunasi utang budi itu," tutur Luong. "Saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya terus melayani setiap hari dan melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan saya mengakui bahwa saya ini semacam simbol dari siapa diri kita sebagai suatu bangsa dalam hal harga kebebasan, dalam hal konsep tugas, dalam hal harus melangkah maju untuk melakukan apa yang kita lakukan."

Dia mengambil alih komando Angkatan Darat A.S. di Jepang (U.S. Army Japan - USARJ) pada Agustus 2018, setelah menjabat sebagai wakil komandan jenderal bidang operasional di Angkatan Darat Kedelapan di Korea Selatan. Sebagai komandan USARJ, dia bertanggung jawab atas 2.500 Prajurit, warga sipil, dan anggota keluarga di 16 instalasi di Jepang daratan dan Okinawa.

Luong memuji Pasukan Bela Diri Darat Jepang (Japan Ground Self-Defense Force - JGSDF) atas profesionalismenya serta Prajurit dan alutsistanya yang luar biasa. Latihan-latihan seperti Yama Sakura menekankan kekuatan hubungan dekat yang sudah lama dimiliki Amerika Serikat dengan Jepang dan JGSDF.

"Kami berkomitmen penuh terhadap pertahanan Jepang," ucap Luong. "Kami tidak hanya terikat oleh perjanjian, tetapi juga oleh kehadiran kami di sini selama lebih dari 70 tahun. Kami memiliki hubungan militer ke militer yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, kedua negara kita memiliki hubungan hebat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun."

Luong mengakui bahwa Pedoman Program Pertahanan Nasional terbaru Jepang akan memungkinkan JGSDF untuk lebih responsif, lebih mematikan dalam hal pembelian persenjataan, dan mengatur ulang cara mereka melakukan pengorganisasian.

"Semuanya benar-benar baru bagi pasukan Jepang, dan semuanya akan menjadi lebih baik," ujar Luong.

Luong membuat perbandingan antara A.S. dan JGSDF. Luong mengatakan bahwa bagi A.S., prioritas tinggi ditempatkan pada kualitas sumber daya manusia dan cara pasukan beroperasi — dengan kepercayaan dan memungkinkan para pemimpin junior untuk membuat keputusan.

"Orang Jepang dalam banyak hal serupa," tuturnya. "Jika mereka belum mencapainya, mereka akan mencapainya, dan benar-benar menyenangkan bekerja sama dengan mereka."

Luong ingin Jepang tahu bahwa pasukan A.S. berkomitmen untuk melayani bersama-sama dengan mereka dan mempertahankan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Hanya dengan berada di sini, kami menunggu untuk mempertaruhkan nyawa kami guna melindungi Jepang dari ancaman apa pun berdasarkan perjanjian yang dimiliki oleh kedua negara kita. Yang kami minta hanyalah pengertian dan dukungan mereka, karena kadang-kadang cara kami berlatih, dan kadang-kadang cara kami bertarung, dan tembakan peluru tajam kami serta pesawat terbang kami bisa dianggap menimbulkan ketidaknyamanan," ungkap Luong. "Tapi saya akan memberi tahu Anda, sedikit ketidaknyamanan demi memperoleh kebebasan bukanlah hal yang terlalu berlebihan. Jika kebebasan Anda tidak pernah direnggut, agak sulit membayangkan seperti apa rasanya. Ada kalanya, ada hal-hal yang layak untuk dipertukarkan, ada hal-hal yang layak untuk dikorbankan, dan tentu saja ada hal-hal yang layak untuk dilakukan meskipun menimbulkan sedikit ketidaknyamanan." □

Prajurit A.S. melakukan parade pada saat upacara di bandara Tan Son Nhut di Saigon, Vietnam, selama Perang Vietnam pada Juli 1969. AFP/GETTY IMAGES

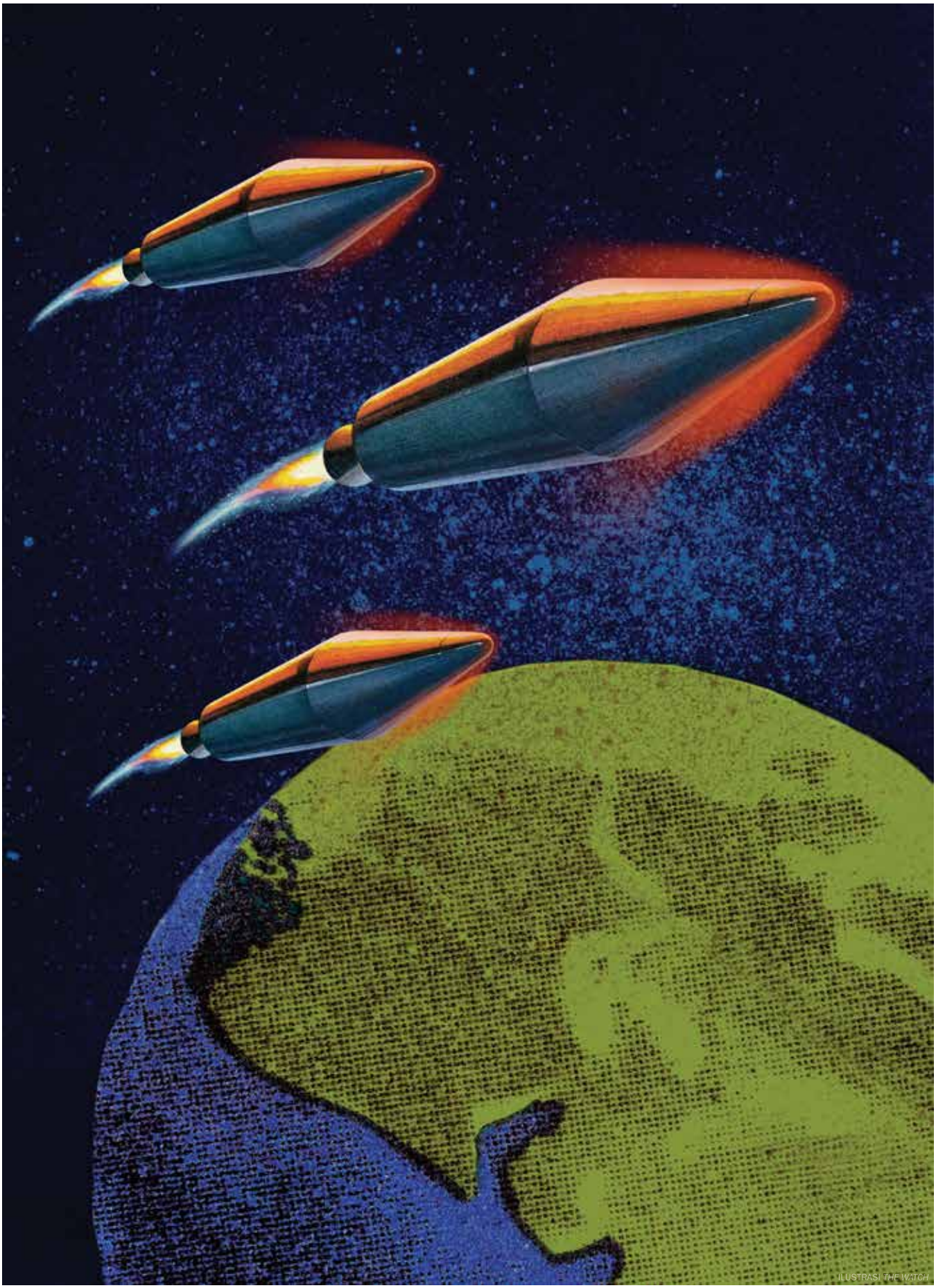

ILUSTRASI *THE WATCH*

DENTUMAN SONIK

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia bersaing untuk memenangkan kompetisi persenjataan hipersonik

STAF *THE WATCH*

Pemanfaatan kemampuan teknologi hipersonik telah menciptakan percepatan perlombaan persenjataan di antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Tiongkok dan Rusia mengklaim telah berhasil menguji coba persenjataan tersebut.

Bertekad untuk mempercepat programnya, Amerika Serikat telah memprioritaskan penelitian dan pengembangan persenjataan hipersonik dan mengantisipasi mengerahkan rudal-rudal itu paling lambat tahun 2028, demikian yang diungkapkan Menteri Pertahanan A.S. Mark Esper pada Agustus 2018, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Angkatan Darat A.S., demikian menurut Military.com.

"Saya mendorong mereka mengerjakannya secepat mungkin."

Mark Esper, Menteri Pertahanan A.S.

"Saya mendorong mereka mengerjakannya secepat mungkin," ujar Esper mengenai pengembang hipersonik militer A.S.

Pesawat terbang hipersonik mampu meluncur minimal lima kali kecepatan suara, membuatnya cukup cepat untuk melintasi benua Amerika Serikat pada kecepatan Mach 5 atau lebih dalam waktu sekitar 30 menit. Potensi untuk mempersenjatai kekuatan semacam itu membahayakan negara mana pun yang tidak memiliki teknologi serupa untuk melawannya. Tidak perlu diragukan lagi, persenjataan hipersonik sulit ditemukan, dilacak, dan dibunuh.

"Jika Anda mengira pertahanan rudal itu mudah, pikirkan lagi. Anda menembak peluru dengan peluru, dan tidak ada yang lebih baik dari itu," ungkap Marsekal Angkatan Udara A.S. Paul Selva, yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Kepala Staf Gabungan, pada Agustus 2018, demikian menurut CNBC. "Hal itu menjadi lebih buruk ketika peluru itu meluncur 13 kali kecepatan suara dan dapat bermanuver, dan itulah hipersonik."

Rudal hipersonik dibuat dalam dua variasi: rudal jelajah dan wahana luncur. Rudal jelajah hipersonik meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 5 dan bersifat non-balistik — kebalikan dari rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile - ICBM) tradisional, yang menggunakan kekuatan gravitasi untuk mencapai sasarannya. Wahana luncur hipersonik pada awalnya diluncurkan ke ruang angkasa dengan lintasan melengkung ketika hulu ledak dilepaskan dan jatuh ke atmosfer dengan kecepatan

hipersonik. ICBM tradisional membiarkan lintasan muatan mengikuti gaya gravitasi. Dengan teknologi hipersonik, hulu ledak dipasang pada wahana luncur yang memasuki kembali atmosfer, dan melalui bentuk aerodinamisnya, wahana itu dapat menunggangi gelombang kejut yang dihasilkan oleh kekuatan roket yang mengangkatnya ketika wahana itu menembus kecepatan suara, memberikan kecepatan yang cukup untuk mengatasi sistem pertahanan rudal yang ada saat ini, demikian menurut Defence IQ.

Dalam pidato kenegaraan pada Maret 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin membanggakan kemampuan nuklir persenjataan hipersonik yang diklaimnya berhasil diuji coba Rusia. Putin menggambarkan wahana luncur hipersonik Rusia, yang diberi nama Avangard, sebagai "senjata ideal" dan menyebutnya "tak terkalahkan" oleh sistem pertahanan rudal dan udara NATO.

"Tidak ada sistem anti-rudal — bahkan di masa depan — yang memiliki harapan untuk menghalanginya," ujar Putin.

Pernyataan Putin tidak mengejutkan bagi otoritas intelijen A.S., yang telah mengetahui perkembangan sistem persenjataan pengganggu kestabilan yang dimiliki Rusia selama lebih dari satu dekade. Laporan intelijen A.S. juga mengonfirmasi keberhasilan uji coba Rusia, yang dapat membawa hulu ledak nuklir, demikian yang dilaporkan CNBC.

Kepada Rusia, dan negara mana pun yang memiliki aspirasi nuklir dalam hal rudal hipersonik, A.S. mengeluarkan peringatan keras.

"Kami harus mengatakan kepada semua musuh potensial kami bahwa jika benda itu merupakan senjata nuklir, kami akan menanggapinya dengan senjata sejenis dan menimbulkan kerugian pada Anda sepadan dengan kerugian yang Anda timbulkan pada kami, dan itu tidak bisa dinegosiasikan," ujar Selva, demikian menurut CNBC. "Jadi, jangan lakukan."

Beberapa ahli menyatakan bahwa Rusia dan Tiongkok tampaknya berfokus untuk melengkapi persenjataan hipersonik mereka dengan hulu ledak nuklir. Akan tetapi Amerika Serikat berfokus pada persenjataan serangan konvensional.

Selama pidato Putin, sebuah video animasi menunjukkan peluncuran rudal dari Rusia dan menyerang A.S.

"Animasi video itu patut disayangkan," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri A.S. saat itu Heather Nauert pada Maret 2018, demikian menurut The Independent, surat kabar online Inggris. "Kami tidak menganggap hal itu sebagai perilaku pemain internasional yang bertanggung jawab."

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kekuatan besar lainnya yang bersaing secara strategis dengan A.S., memublikasikan keberhasilan uji coba senjata hipersonik barunya sendiri pada Agustus 2018.

Pesawat terbang B-52 Angkatan Udara A.S. bersiap membawa wahana hipersonik X-51 ke lapangan untuk peluncuran uji coba. REUTERS

BAGAIMANA RUDAL MELUNCUR HIPERSONIK

Ada dua jenis pendekatan untuk memecahkan tantangan hipersonik: scramjet dan boost glide. Scramjet yang memanfaatkan pernapasan udara mengandalkan kecepatan tinggi untuk mendapatkan kekuatannya.

Saat berakselerasi, lebih banyak udara dan bahan bakar didorong ke dalam mesin, memungkinkannya mencapai kecepatan hipersonik.

Model boost glide menunggangi wahana masuk-kembali ke ketinggian yang sangat tinggi, tempat wahana itu melompat melintasi atmosfer atas Bumi.

Rudal balistik tradisional sudah meluncur dengan kecepatan hipersonik. Dibuat untuk membawa hulu ledak nuklir dan konvensional, rudal balistik mampu mencapai luar angkasa dalam lintasan peluncurannya, tetapi tidak dapat bermanuver.

Akan tetapi kelas terbaru dari rudal hipersonik akan lebih kecil ukurannya, dipandu, dan dirancang untuk membawa bahan peledak konvensional untuk respons cepat yang sensitif terhadap waktu dalam operasi di medan peperangan. **Sumber:** ***Daily Mail***

CNN melaporkan bahwa Akademi Aerodinamika Kedirgantaraan Tiongkok (China Academy of Aerospace Aerodynamics - CAAA) melakukan uji coba pertamanya terhadap pesawat terbang "Starry Sky-2", dengan mengatakan bahwa pesawat itu mencapai kecepatan tertinggi Mach 6 — enam kali kecepatan suara, atau 7.344 kilometer per jam.

CAAA tidak mengungkapkan rencananya untuk pesawat terbang hipersonik, hanya mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari pengembangan industri kedirgantaraan RRT yang sedang berlangsung. "Proyek uji coba penerbangan Starry Sky-2 sangat inovatif dan sulit secara teknis, menghadapi sejumlah tantangan teknis internasional mutakhir," bunyi pernyataan CAAA. "Penguji penerbangan dapat dikontrol, dan data ilmiahnya valid. Pemulihan lengkap dari roket itu menandai keberhasilan penyelesaian uji coba penerbangan Star-2, menandai prestasi 'waverider pertama Tiongkok.'" Waverider adalah jenis pesawat terbang hipersonik yang menggunakan gelombang kejutnya sendiri sebagai permukaan pengangkat, sehingga meningkatkan rasio angkat-terhadap-tariknya.

Amerika Serikat mengakui adanya peningkatan tekanan ketika RRT dan Rusia memajukan persenjataan hipersonik mereka.

"Tiongkok telah menguji coba kemampuan hipersonik. Rusia telah menguji cobanya. Kami juga melakukannya. Kemampuan hipersonik merupakan tantangan yang signifikan," ungkap Jenderal John Hyten dari Komando Strategis A.S. kepada CNN pada Maret 2018. "Kita akan membutuhkan serangkaian sensor yang berbeda untuk melihat ancaman hipersonik. Musuh kita mengetahuinya."

Beberapa analis percaya bahwa RRT mungkin melakukan pengembangan lebih jauh dari yang dinyatakan tetapi sebagian besar tetap bungkam mengenai pengembangan hipersoniknya. Meskipun demikian, para pejabat militer A.S. mengatakan bahwa sistem pengiriman hipersonik RRT dapat menjangkau ribuan kilometer dari pantai Tiongkok "dan membuat kelompok tempur kapal induk kami atau pasukan yang dikerahkan ke garis depan kami ... berada dalam risiko," ungkap Mike Griffin, wakil menteri pertahanan di bidang penelitian dan teknik A.S., selama dengar pendapat Komite Senat Angkatan Bersenjata A.S. pada April 2018.

"Kita, hari ini, tidak memiliki sistem yang dapat membuat mereka mengalami risiko dengan cara yang setara, dan kita tidak memiliki pertahanan terhadap sistem-sistem itu," ujar Griffin dalam dengar pendapat itu, demikian menurut Business Insider, menambahkan bahwa "jika mereka memilih untuk mengerahkan persenjataan itu maka kita akan, hari ini, berada pada posisi yang kurang menguntungkan."

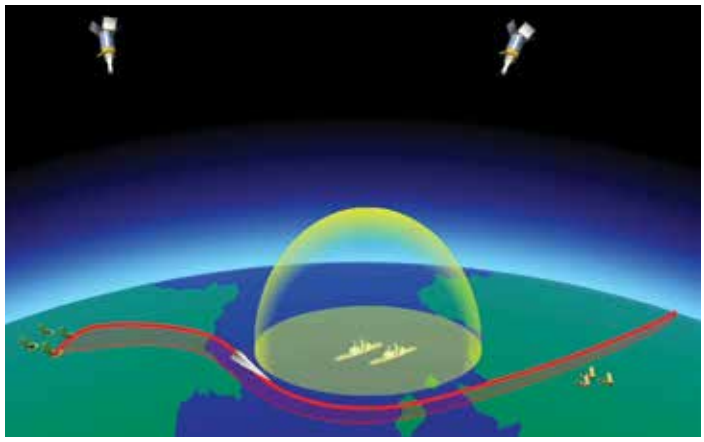

Simulasi komputer menggambarkan wahana hipersonik Avangard bermanuver untuk menembus pertahanan rudal dalam perjalanan ke sasaran. THE ASSOCIATED PRESS

Dengan tingkat urgensi yang meningkat, para pejabat Angkatan Udara A.S. mengatakan bahwa jalan ke depan akan terdiri dari pembelajaran seiring dengan berevolusinya pengembangan.

"Hipersonik merupakan program ketika saya mengharapkan kita untuk pergi keluar dan mempelajari banyak hal saat kita melakukan uji coba. Jadi, alih-alih meluangkan waktu untuk memastikan bahwa uji coba Anda memenuhi sesuatu yang Anda yakin dapat Anda lakukan, Anda memampatkan jadwal untuk pergi keluar dan membuat uji coba itu berfokus untuk mempelajari sesuatu," ungkap Dr. Will Roper, asisten sekretaris Angkatan Udara A.S. di bidang akuisisi, teknologi, dan logistik, kepada majalah *Defense News* pada Juli 2018. "Perbedaan pola pikir itu semata menghemat waktu bertahun-tahun dari program hipersonik kami. Kami berharap untuk [mencapai kemampuan operasional awal] dalam tiga hingga empat tahun, dan semua itu karena melakukannya sebagai program uji coba eksperimental, dan bukannya periode kepatuhan yang panjang."

Mantan Wakil Menteri Pertahanan A.S. Robert Work mencatat pada Juni 2018 bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memprioritaskan investasi besar dalam memodernisasi angkatan bersenjata RRT dan berinvestasi dalam teknologi militer generasi mendatang. Xi telah menetapkan target untuk menjadi pemimpin dunia dalam kecerdasan buatan paling lambat tahun 2030.

Akan tetapi, upaya RRT untuk menjadi yang pertama dalam semua hal yang terkait dengan modernisasi militer tidak dapat mengalahkan kebutuhan Amerika Serikat untuk mempertahankan keunggulan dan kehadiran strategis yang tangguh, terutama yang menyangkut teknologi hipersonik.

"Perlombaan ini," ujar Work, demikian menurut CNN, "merupakan perlombaan yang harus kita menangkan." □

Majalah *The Watch* adalah publikasi dari Komando Pasukan A.S. Wilayah Utara.

PERAN AUSTRALIA *di Indo-Pasifik*

MEMBANGUN FONDASI KESUKSESAN DI SELURUH KAWASAN

DUTA BESAR JANE M. HARDY/KONSULAT JENDERAL AUSTRALIA, HONOLULU

Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017, bersama dengan Buku Putih Pertahanan 2016, memperjelas bagaimana Australia melihat masa depannya. Buku putih 2017 itu menekankan pembangunan "fondasi kesuksesan" — kemampuan domestik, diplomatik, pertahanan, dan nasional yang kuat dan pemberian bantuan di luar negeri untuk memastikan dunia yang stabil dan makmur.

Buku putih itu memetakan kerangka kerja peluang — untuk "mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan makmur ketika hak-hak semua negara dihormati."

Buku putih itu menegaskan kembali bahwa aliansi kami dengan Amerika Serikat tetap menjadi bagian pokok bagi masa depan Australia. Selain itu, dinyatakan bahwa tanpa keterlibatan kuat A.S. di kawasan ini, kekuasaan dapat bergeser, dan Australia akan merasa lebih sulit untuk mencapai tingkat keamanan dan stabilitas yang kami cari.

Bagi kawasan kami, Komando Indo-Pasifik A.S. adalah simbol kuat dari apa yang dikatakan Wakil Presiden A.S. Mike Pence pada November 2018: "Pesan kami sederhana: Komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik bersifat kukuh dan abadi."

Kawasan kami tidak bersifat sederhana atau jinak. Kawasan ini ditandai dengan perubahan dan pergeseran cepat dalam bobot dan kekuatan geoekonomi. Berdasarkan statistik, produksi Tiongkok sekarang lebih banyak dari A.S. India merupakan ekonomi utama yang tumbuh paling cepat di dunia. Indonesia tampaknya akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi global teratas paling lambat tahun 2030. Banyak negara — Tiongkok, Jepang, India, dan lainnya — membangun pasukan militer yang semakin kuat. Pasukan itu diposisikan dalam arsitektur global untuk disesuaikan dengan kekuatan ekonomi mereka. Persaingan semakin intensif atas perbatasan laut dan darat, wilayah laut dan udara, serta integrasi ekonomi regional. Tatanan internasional yang dibangun sejak Perang Dunia II sedang disengketakan.

Mempertahankan Nilai-Nilai Inti

Di tengah-tengah perubahan seperti itu, nilai-nilai Australia mampu dipertahankan. Kami adalah salah satu negara demokrasi tertua dan masyarakat multikultural yang paling sukses di dunia. Komitmen kami terhadap nilai-nilai itu dan institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai itu memberi kami kepercayaan diri dan kredibilitas.

Australia berupaya membentuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dari paksaan, berlimpah dengan peluang bagi semua pihak, dan berdasarkan aturan yang jelas dan adil. Berdasarkan nilai-nilai ini, Australia meningkatkan kegiatan praktis dan jangka panjang bersama dengan mitra regional kami.

Pesawat terbang C-130 J Hercules Angkatan Udara Australia terbang bersama dengan MC-130J Commando II Angkatan Udara A.S. di atas Queensland, Australia, selama Talisman Saber 2017 untuk meningkatkan interoperabilitas di antara kedua pasukan. KAPTEN JESSICA TATE/ANGKATAN UDARA A.S.

Prakarsa baru Australia yang diuraikan di bawah ini didasarkan pada keterlibatan selama puluhan tahun di lingkungan kami. Prakarsa itu mencakup banyak bidang — dari perahu patroli dan infrastruktur hingga dialog strategis, olahraga, pendidikan, dan siber. Prakarsa itu melibatkan kemitraan melalui banyak saluran, termasuk bilateral, multilateral, pemerintah, nonpemerintah, dan komunitas yang memiliki kepentingan bersama.

Pada November 2018, perhatian dunia tertuju pada negara tetangga geografis terdekat kami, Papua Nugini. Port Moresby menjadi tuan rumah bagi 21 negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). APEC adalah gagasan yang diprakarsai pada tahun 1989 oleh perdana menteri Australia, bersama dengan Korea Selatan dan Singapura. Sejak itu anggota APEC tumbuh berlipat ganda — sekarang mewakili negara-negara yang memproduksi lebih dari setengah produk domestik bruto global.

Selama lebih dari 30 tahun, bersama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan berbagai mitra, kami telah membangun forum arsitektur regional lainnya, seperti KTT Asia Timur, Forum Regional ASEAN, Pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN-Plus, dan pakta perdagangan utama yang meliputi Lingkar Pasifik dan India. Arsitektur ini mencerminkan sejarah, geografi, dan keanekaragaman unik kawasan kami. Jadi, sama halnya dengan berbagai prakarsa baru yang kami kembangkan di seluruh Indo-Pasifik.

Keterlibatan Di Seluruh Indo-Pasifik

Pemerintah Australia telah lama mengakui meningkatnya kekuatan ekonomi India dan baru-baru ini mengeluarkan cetak biru untuk mentransformasikan keterlibatan ekonomi bilateral. India dan Australia mengadakan pertemuan luar negeri dan pertahanan reguler 2+2, dialog maritim, dan konsultasi terkait keamanan lainnya.

Kami telah melakukan dialog dengan India, A.S., dan Jepang yang menjadi bagian penting dari diplomasi regional kami. Pada tahun 2019, kegiatan maritim tahunan utama Australia, Indo-Pacific Endeavour (IPE) berfokus pada Samudra Hindia. IPE adalah kegiatan pelayanan bersama yang mempromosikan prioritas pertahanan Australia, termasuk dukungan kami terhadap arsitektur regional, dan untuk memperkuat komitmen kami dalam meningkatkan kerja sama keamanan maritim dengan mitra regional.

Sejak keterlibatan kami dalam Perang Korea dan setelahnya, Australia telah menjalin kemitraan ekonomi dan strategis yang erat dengan Korea Selatan. Australia terus berkontribusi secara diplomatis dan material terhadap upaya-upaya untuk mengelola ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan sistem rudal dan persenjataan nuklir Korea Utara. Memastikan stabilitas dan keamanan di Asia timur laut tetap menjadi tujuan utama dalam strategi Indo-Pasifik Australia.

Dengan Jepang, Australia memiliki kemitraan strategis

khusus dan beberapa kemitraan bilateral, trilateral (dengan A.S.), dan prakarsa multilateral lainnya.

Jelas sekali, peran Tiongkok akan menjadi penentu utama stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan akan membentuk kontur strategis masa depan kawasan kami. Hubungan bilateral Australia dengan Tiongkok merupakan salah satu hubungan yang paling penting bagi kami.

Terlepas dari perspektif kami yang berbeda pada beberapa masalah, kami memiliki pandangan jernih tentang peluang dan juga tantangan. Kami berusaha untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam prakarsa yang berfungsi untuk menegakkan tatanan berbasis aturan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional.

Australia memiliki minat utama dalam hubungan pertahanan positif dengan Tiongkok yang meningkatkan pemahaman timbal balik, memupuk transparansi, dan membangun kepercayaan. Untuk itu, Tiongkok — bersama dengan mitra lainnya — berpartisipasi dalam latihan militer bilateral dan multilateral Australia.

Hubungan di seluruh Asia Tenggara

Pada tahun 1940-an, Australia membuka misi diplomatik di seluruh Asia Tenggara. Kami sekarang memiliki kemitraan strategis formal yang menopang hubungan kami dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Kami memiliki dialog dengan Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Timor-Leste.

Australia dan Indonesia baru-baru ini meningkatkan hubungan bilateral kami menjadi kemitraan strategis komprehensif — tingkat tertinggi dari hubungan yang tidak berpihak. Australia dan Indonesia bekerja secara erat untuk memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan. Kerja sama keamanan kami meluas di seluruh bidang penegakan hukum, intelijen, hukum, dan peradilan.

Seorang Prajurit Australia mendemonstrasikan keterampilan bertahan hidup di hutan kepada para pemberi kerja Australia selama Latihan Boss Lift 2019 di Pusat Pelatihan Tempur Angkatan Darat di Malaysia. KOPTU KYLE GENNER/DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

Setelah militan yang mendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyerang Kota Marawi di Filipina pada tahun 2017, pengawasan yang dilakukan oleh pesawat terbang AP-3C Orion Pasukan Pertahanan Australia (Australian Defence Force - ADF) mendukung operasi Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Philippines - AFP) untuk membebaskan Marawi. Sejak dibebaskannya kota itu, Kelompok Tugas Bersama ADF 629 telah melakukan program kerja sama kontraterorisme dengan AFP. Hingga saat ini, kami telah melibatkan lebih dari 7.000 personel AFP, membagikan pengalaman dan pendekatan ADF terhadap taktik teroris kompleks yang telah ditransfer dari Timur Tengah ke kawasan kami.

Australia telah mendukung upaya pemulihan dan pembangunan perdamaian jangka panjang Filipina melalui Kemitraan Australia untuk Perdamaian, program senilai 115,2 miliar rupiah (12 juta dolar Australia) yang sedang dilaksanakan melalui lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional.

Australia memiliki nota kesepahaman tentang kontraterorisme dengan sebagian besar negara tetangga kami di Asia Tenggara dan dengan mitra Indo-Pasifik lainnya, termasuk Fiji, India, Pakistan, dan Papua Nugini.

Australia bangga menjadi mitra dialog terlama ASEAN. KTT Khusus ASEAN-Australia 2018 mengumumkan bahwa Australia dan ASEAN akan menerapkan paket prakarsa untuk memperkuat perlindungan perbatasan dan maritim sipil, kesadaran ranah maritim, hukum maritim, dan aplikasinya, serta perlindungan stok ikan regional.

Pada November 2018, Australia mengumumkan Prakarsa Tata Kelola dan Infrastruktur Ekonomi Asia Tenggara untuk membantu membuka fase pertumbuhan berikutnya di kawasan kami. Program Sumber Daya Air Mekong Raya Australia akan mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih adil dan efektif. Dan kami akan memperdalam hubungan kreatif dan pendidikan dengan program yang ditujukan untuk kaum muda di seluruh 10 negara ASEAN.

Prakarsa Pasifik

Australia baru-baru ini mengumumkan paket prakarsa di Pasifik Barat Daya untuk membawa keterlibatan kami ke tingkat yang baru. Pasifik Barat Daya berada di garis depan dan pusat dari kebijakan luar negeri dan pandangan strategis kami. ADF sudah memainkan peran penting dalam keterlibatan Pasifik kami, dan ADF akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.

Di bawah Program Keamanan Maritim Pasifik (Pacific Maritime Security Program - PMSP) Australia, kami akan mengirimkan lebih banyak perahu patroli dengan kemampuan lebih baik dan pengawasan udara untuk meningkatkan pertukaran informasi guna melacak perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan penangkapan ikan ilegal. PMSP adalah komitmen senilai 19,2 triliun rupiah (2 miliar dolar Australia) selama 30

tahun dan mencakup 21 perahu patroli kelas Guardian — 19 perahu untuk negara-negara kepulauan Pasifik dan dua perahu untuk Timor-Leste.

Kami memiliki perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon, dan nota kesepahaman keamanan dengan Tuvalu dan Nauru. Australia dan Vanuatu baru-baru ini mengumumkan peningkatan keterlibatan di bidang keamanan, termasuk pelatihan yang diberikan Australia untuk rekrutan baru Kepolisian Vanuatu dan negosiasi perjanjian keamanan bilateral.

Dengan Fiji, Australia mengubah Kamp Bantuan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan serta Pemeliharaan Perdamaian Blackrock menjadi pusat regional untuk pelatihan kepolisian dan pemelihara perdamaian.

Australia dan Papua Nugini (PNG) telah mengumumkan prakarsa utama bersama di Pangkalan Angkatan Laut Lombrum PNG di provinsi Manus. Wakil Presiden A.S. Mike Pence mengumumkan selama APEC bahwa A.S. juga akan menjadi mitra dalam hal ini. Pengembangan Lombrum akan semakin meningkatkan interoperabilitas kami, memperdalam kerja sama keamanan maritim kami, dan melengkapi PMSP Australia.

Dalam melanjutkan momentum yang dihasilkan selama persiapan APEC, kepolisian Australia dan PNG akan bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan penyampaian layanan kepolisian ke komunitas PNG.

Australia akan membentuk Tim Pelatihan Bergerak Pasifik ADF yang melakukan rotasi secara terus-menerus. Berbasis di Australia, Tim itu akan melakukan perjalanan melintasi Pasifik ketika diundang untuk melatih dan terlibat dengan pasukan lain.

Angkatan Laut Australia akan melakukan lebih banyak pengerahan ke Pasifik untuk melakukan pelatihan dan latihan maritim dengan negara-negara tetangga kami — termasuk dengan perahu patroli kelas Guardian yang baru itu.

Meningkatkan Kemitraan

Melalui prakarsa ini, ADF akan bekerja sama secara erat dengan mitra kami, membangun interoperabilitas dalam bidang teknik, layanan medis, komunikasi, pengawasan, logistik, dukungan dan perencanaan maritim.

Australia berencana untuk membuka lima misi diplomatik penuh baru di Kepulauan Cook, Polinesia Prancis, Kepulauan Marshall, Niue, dan Palau — menjadikan Australia negara pertama yang memiliki diplomat tetap di semua 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Kami memperdalam dukungan kami untuk pembangunan ekonomi dengan cara yang mengatasi tantangan infrastruktur unik di Pasifik Barat Daya.

Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Australia untuk Pasifik akan memobilisasi dana hibah dan pinjaman senilai 19,2 triliun rupiah (2 miliar dolar Australia) untuk beragam proyek di berbagai sektor seperti telekomunikasi, energi, transportasi, dan air. Ini akan dilengkapi dengan proposal untuk memberi lembaga pembiayaan ekspor Australia, yang dikenal sebagai Efic, dengan tambahan modal senilai 9,6 triliun rupiah (1 miliar dolar Australia) dan kekuasaan yang lebih fleksibel untuk mendukung investasi.

Ikatan pribadi kami meluas ke obsesi bersama yang dirasakan secara mendalam. Siapa pun yang mengunjungi Pasifik Selatan akan menyaksikan gairah untuk berolahraga. Program olahraga Australia-Pasifik yang baru akan memperluas kerja sama olahraga kami dan memperdalam hubungan orang-ke-orang.

Program kemitraan gereja yang baru akan meningkatkan hubungan di antara gereja-gereja Pasifik dan Australia.

Memahami pentingnya pendidikan berkualitas dalam meningkatkan prospek ekonomi, kami akan mendanai paket beasiswa sekunder baru untuk mendukung para pelajar di Pasifik untuk bersekolah di Australia.

Kami juga meningkatkan skema tenaga kerja dan program pekerja musiman Pasifik untuk memastikan aliran masyarakat dan peluang ekonomi.

Untuk mendukung Deklarasi Keamanan Regional Boe PIF pada September 2018, Australia mengumumkan Pusat Fusi Pasifik baru untuk melengkapi arsitektur keamanan regional yang sudah ada termasuk Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional Pasifik di Samoa dan Pusat Pengawasan Perikanan Regional Lembaga Perikanan Forum di Kepulauan Solomon.

Kami juga sedang mengembangkan Perguruan Tinggi Keamanan Pasifik Australia untuk memperkuat kemampuan dan jaringan di antara para pejabat senior di Pasifik Barat Daya.

Memupuk Kerja Sama

Australia dan Selandia Baru akan bekerja sama dengan mitra regional untuk meningkatkan ketahanan siber. Australia menginvestasikan 367,1 miliar rupiah (38,4 juta dolar Australia) hingga tahun 2022 melalui Program Kerja Sama Siber kami di seluruh kawasan ini, kemitraan kerja sama siber dengan PNG, dan berbagai proyek lainnya. Ini akan memperkuat pencegahan, penuntutan, dan kerja sama kejahatan siber dan meningkatkan kemampuan respons insiden siber.

Deklarasi Boe menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan keamanan terbesar bagi negara-negara anggota PIF. Australia tetap menjadi mitra yang stabil dalam mendukung respons regional terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana dan telah berkomitmen untuk membelanjakan setidaknya 9,56 triliun rupiah (1 miliar dolar Australia) selama lima tahun untuk perubahan iklim di negara-negara berkembang, termasuk paket bantuan regional empat tahun senilai 2,87 triliun rupiah (300 juta dolar Australia).

Australia berupaya bekerja sama dengan semua negara yang memiliki kepentingan di Indo-Pasifik. Tantangan kami adalah memastikan bahwa upaya kami digabungkan untuk membangun kawasan yang aman, stabil, terbuka, dan makmur. Ini adalah nilai-nilai kami. □

PASUKAN BELA DIRI *Jepang*

SIAP MENYELAMATKAN NYAWA, BERKONTRIBUSI TERHADAP PERDAMAIAN

PERDANA MENTERI SHINZO ABE/PANGLIMA TERTINGGI/PASUKAN BELA DIRI JEPANG

Abe menyampaikan pidato ini pada Oktober 2018 kepada pasukannya.

Saya sangat senang melihat inspeksi pasukan di sini di Asaka untuk ketiga kalinya dan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan para anggota Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces - SDF) yang gagah berani.

Ketika memulai pidato ini, saya mendoakan agar mereka yang kehilangan nyawa dalam serangkaian bencana alam yang melanda Jepang selama musim panas 2018 beristirahat dengan tenang di alam sana. Saya juga menyatakan simpati tulus saya kepada semua orang yang terkena dampak bencana ini.

Apa pun bencananya, Anda dan kolega Anda selalu ada di sana.

Rumah-rumah diluluhlantakkan oleh tanah longsor. Anda merespons laporan ini, berjalan tanpa henti ke tempat kejadian, meskipun harus mengatasi pohon tumbang dan berjibaku dalam lumpur di tengah perjalanan menuju lokasi yang dilanda bencana. Tepat sebelum jatuh kelelahan, Anda menggunakan setiap jengkal kekuatan terakhir untuk menyelamatkan semua korban ketika keluarga mereka terpana menyaksikannya.

"SDF sungguh melampaui harapan kami." Kata-kata dari orang-orang yang terkena dampak bencana ini merupakan bukti lain dari kemampuan Anda dan, khususnya, tekad Anda yang luar biasa.

Pada faktanya, SDF telah dikirim untuk misi bantuan bencana lebih dari 40.000 kali.

Ini tidak hanya untuk kasus-kasus bencana alam. Dalam keadaan seperti itu, bahwa suatu momen tidak boleh disia-siakan untuk menyelamatkan nyawa pasien medis di pulau-pulau terpencil, penyediaan transportasi darurat memang merupakan sumber bantuan bagi kehidupan masyarakat.

Sebelas tahun lalu Pangkalan Udara Naha menerima panggilan telepon yang melaporkan adanya seorang perempuan yang jatuh sakit dan dalam keadaan genting. Tanpa ragu, empat orang kru yang dipimpin oleh Kolonel Yoshitomo Tatemura naik helikopter dan terbang menembus malam yang gelap gulita, menuju Tokunoshima di Prefektur Kagoshima.

Sesampainya di sana, mereka dikelilingi oleh kabut tebal dan tidak dapat melihat lokasi pendaratan. Awan yang menggantung rendah menghalangi upaya pendaratan mereka.

Mengingat memburuknya kondisi perempuan itu dan tidak boleh ada waktu yang hilang, Kolonel Tatemura terus mencoba untuk mendarat, memanfaatkan pengalaman jam terbangnya yang lebih dari 4.800 jam dan semua pengalamannya sebagai anggota

Prajurit Pasukan Bela Diri Jepang berbaris melewati Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam upacara tahunan di Asaka, utara Tokyo, pada Oktober 2018. REUTERS

SDF. Sampai detik-detik terakhir, dia tidak pernah menyerah, meminta pengatur darat untuk membuat pengaturan pendaratan di Bandara Tokunoshima yang berada di dekat sana dan terus mengambil semua kemungkinan tindakan. Sebagai tanggapan, personel SDF di lapangan juga melakukan semua hal yang mampu mereka lakukan.

"Terima kasih."

Kata-kata terima kasih kepada pengatur darat itu merupakan ucapan terakhir dari Kolonel Tatemura. Kru empat orang itu tidak pernah kembali ke pangkalan. Kolonel Tatemura dikatakan pernah memberi tahu personel junior hal-hal berikut ini: "Jika kita tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?"

Melindungi dan Melayani

Jepang dan rakyatnya dilindungi oleh rasa tanggung jawab dan tugas yang kuat dari masing-masing dari 250.000 anggota SDF.

"Dalam keadaan darurat, saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas, yang mungkin menempatkan diri saya dalam bahaya, seperti yang dipercayakan oleh negara." [Bagian dari Sumpah Jabatan yang diambil oleh pejabat SDF yang baru saja direkrut.]

Saya ingin sekali lagi mengungkapkan rasa hormat setulus-tulusnya atas tekad mulia Anda.

Personel SDF itu, yang mempertahankan pengawasan di garis depan di tengah situasi yang sangat tegang, 24 jam sehari, 365 hari setahun, menerbangkan pesawat jet jika diperlukan untuk melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga perdamaian adalah mereka yang mengamankan perairan dan wilayah udara Jepang yang luas, bahkan sekarang ini, pada saat ini juga.

Untuk memastikan perdamaian Jepang dan meletakkan dasar bagi perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, dan untuk memastikan implementasi lengkap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan Korea Utara, personel itu bekerja sama secara erat dengan negara-negara yang berpandangan serupa seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru dan melakukan kegiatan pengawasan maritim untuk mencegah transfer kapal-ke-kapal ilegal.

Anda yang telah memilih untuk mengikuti jalan yang sulit atas kemauan Anda sendiri, yang mengabdikan diri Anda untuk melaksanakan tugas Anda, semuanya demi sesama warga negara Anda, Anda merupakan kebanggaan Jepang.

Melindungi tanah, laut, dan udara teritorial secara menyeluruh serta kehidupan dan properti warga merupakan tugas terbesar pemerintah. Upaya tanpa henti kami merupakan landasan kebijakan keamanan; tidak ada kemungkinan untuk berhenti dan beristirahat.

Hanya dalam waktu lima tahun, lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin tidak pasti dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya dan telah berubah menjadi parah.

Saat ini, paradigma kebijakan keamanan juga bergeser secara signifikan. Kecuali jika kita membangun keunggulan kompetitif di bidang baru seperti ruang angkasa, ruang siber, dan kemampuan spektrum elektromagnetik, kita tidak akan lagi mampu melindungi negara kita secara menyeluruh.

Pedoman Program Pertahanan Nasional baru itu [diterbitkan pada pertengahan Desember 2018] menyajikan visi baru tentang kemampuan pertahanan yang tidak akan menjadi perpanjangan status quo semata melainkan akan membangun fondasi yang bertahan selama beberapa dekade ke depan.

Saya meminta masing-masing dari Anda untuk memperhatikan kondisi internasional dan tren teknologi yang terus berubah serta mengerahkan upaya Anda tanpa lelah ke arah yang ideal, tanpa bergantung pada metode atau ide konvensional.

Sebagai panglima tertinggi SDF, saya bertekad untuk mengerahkan segala upaya untuk melindungi dengan tegas kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang damai dan menurunkannya kepada generasi berikutnya.

Perdamaian Proaktif

Kedamaian yang dinikmati Jepang tidak bisa dilindungi oleh satu negara saja. Mengangkat tinggi panji "kontribusi proaktif terhadap perdamaian," Jepang bertekad untuk memberikan kontribusi jauh lebih besar daripada sebelumnya terhadap perdamaian dan kemakmuran dunia, dengan cara yang hanya mampu kita lakukan.

Di Indonesia, yang dilanda gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter dan tsunami setelahnya, 49 anggota SDF, yang dikirim melalui pesawat angkut C-130, bekerja tanpa lelah untuk melindungi nyawa orang-orang yang terkena dampak bencana.

Di lepas pantai Somalia dan di Teluk Aden, SDF mengerahkan segala upaya, bersama dengan personel dari negara lain, untuk mengamankan jalur laut demi perdamaian dan kemakmuran masyarakat internasional.

Di Kenya yang panas terik, personel SDF bekerja dengan rajin untuk melatih unit dari berbagai negara Afrika untuk operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seorang perempuan yang mengambil bagian dalam program itu berasal dari Sierra Leone. Sierra Leone sekarang merupakan negara yang secara aktif membantu pembangunan bangsa sesama negara-negara Afrika lainnya; hingga baru-baru ini, dulunya negara itu dirusak oleh perang saudara yang hebat. Menemukan dirinya berada di garis depan, perempuan itu tidak punya pilihan selain mengangkat senjata dan berperang sebagai seorang Prajurit.

Setelah datang ke Kenya, dia pertama kalinya dilatih keterampilan literasi, belajar membaca dan menulis di bawah bimbingan SDF. Sambil belajar sendiri dalam berbagai mata pelajaran, dia juga menguasai pengoperasian mesin derek pengangkat benda berat. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk kembali ke tanah airnya, dia berkata,

Prajurit Pasukan Bela Diri Darat Jepang ambil bagian dalam inspeksi militer di tempat latihan mereka di Asaka, prefektur Saitama. GETTY IMAGES

"Saya benar-benar senang bisa berkontribusi pada perdamaian."

Dia, serta para peserta lainnya, akan menggunakan keterampilan yang mereka pelajari dari Jepang untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Infrastruktur seperti itu pada akhirnya akan digunakan oleh banyak orang dan membawa senyum ke wajah anak-anak.

"Benih perdamaian" yang ditanam SDF Jepang di Afrika ditakdirkan untuk mekar suatu hari nanti sebagai bunga besar. Orang-orang yang telah dilatih SDF pastinya akan memikul masa depan yang damai di Afrika dan melestarikan perdamaian dan kemakmuran dunia.

Saya meminta Anda terus mengerahkan segala upaya untuk perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional dengan penuh kebanggaan. Saya memiliki keyakinan yang kuat pada Anda.

Rasa Hormat dan Bersyukur

Saat ini, 90 persen rakyat Jepang menghormati SDF. Namun, dalam sejarahnya yang membentang selama lebih dari 60 tahun, ada masanya tatkala keberadaan SDF dipandang dengan kurang menyenangkan. Namun demikian, anggota SDF pantang menyerah dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk memenuhi tugas mereka.

Anda benar-benar mendapatkan kepercayaan dari rakyat melalui karya Anda sendiri.

Sekarang saatnya bagi politik untuk turut serta dalam memainkan perannya dengan sepenuhnya.

Politisi saat ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua anggota SDF untuk memenuhi tugas mereka dengan penuh kebanggaan. Saya bertekad untuk dengan tegas memenuhi tanggung jawab ini.

Kepada keluarga anggota SDF, tidak ada yang lain selain Anda yang membangkitkan keberanian anggota SDF dan menginspirasi mereka untuk menjalankan misi mereka dengan rasa tanggung jawab yang kuat, tentu saja dalam pelatihan sehari-hari mereka dan juga ketika berada dalam kondisi sulit.

Sebagai panglima tertinggi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan yang Anda berikan dalam mengizinkan pasangan, anak, ayah, dan ibu yang Anda cintai bertugas di SDF.

Bagi para anggota SDF, rakyat Jepang dan saya akan selalu bersatu bersama dengan Anda. Dengan mengingat hal itu, harap jalankan tugas Anda sebagai anggota SDF dengan bangga dan percaya diri.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan harapan tulus saya agar Anda akan selalu tetap menyadari pentingnya tugas Anda, menjaga integritas perilaku Anda, dan bekerja dengan ketekunan yang jauh besar untuk memastikan perdamaian dan stabilitas Jepang dan dunia. □

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, panglima tertinggi Pasukan Bela Diri Jepang, menyampaikan pidato ini pada tanggal 14 Oktober 2018, selama inspeksi pasukan untuk memperingati berdirinya SDF. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format *FORUM*.

'Manusia Sampah' Kamboja

Murid-murid menyerahkan tutup botol air plastik yang mereka kumpulkan kepada Ouk Vanday, pendiri Coconut School, untuk membayar uang sekolah di Taman Nasional Kirirom, provinsi Kampong Speu.

Dia mengelola sekolah tempat anak-anak membiayai pendidikan mereka dengan bahan limbah daur ulang

KISAH DARI AGENCE FRANCE-PRESSE
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Duduk di sebuah bangunan yang terbuat dari ban bekas, botol plastik bekas, dan barang-barang daur ulang lainnya, murid Kamboja Roeun Bunthon mencatat selama pelajaran bahasa Inggris di "Sekolah Sampah". Di sekolah itu, uang sekolah dibayar dengan sampah alih-alih uang tunai.

Sebagai imbalannya, anak-anak yang membutuhkan seperti Bunthon, mantan pengemis jalanan, dapat mengikuti kelas komputer, matematika, dan bahasa — dan mempelajari manfaat mengurangi limbah di negara yang terkenal tercemar dan hampir tidak memiliki fasilitas daur ulang.

"Saya sudah berhenti mengemis. ... Sepertinya saya mendapatkan kesempatan lain," ujar Bunthon, yang membayar biaya pendaftarannya dengan sekantong tutup botol bekas.

Terletak di taman nasional yang rimbun, Coconut School dibangun hampir seluruhnya dari limbah daur ulang dan merupakan gagasan Ouk Vanday, dijuluki "Manusia Sampah," mantan manajer hotel yang memimpikan Kamboja bebas sampah.

Sekitar 65 orang anak-anak terdaftar di sekolah itu, yang dinding ruang kelasnya terbuat dari ban mobil yang dicat dan pintu masuknya dihiasi dengan mural bendera Kamboja yang seluruhnya terbuat dari tutup botol berwarna-warni.

Sebagian besar sampah itu merupakan uang sekolah yang dibayarkan oleh murid-murid.

"Saya menggunakan sampah guna mendidik anak-anak untuk mengubah sampah menjadi ruang

Murid-murid Coconut School mengumpulkan botol-botol air plastik bekas dan barang-barang daur ulang lainnya di taman.

Ouk Vanday mengajar murid-murid di ruang kelas dengan dinding yang terbuat dari ban yang dicat.

kelas ... sehingga anak-anak akan memahami manfaat menggunakan sampah dengan cara yang bermanfaat," ungkap pria berusia 34 tahun itu di sekolah itu, yang dibuka pada tahun 2017 dan berjarak sekitar 115 kilometer di sebelah barat Phnom Penh.

Dia berencana untuk memperluas kelas di provinsi pertanian miskin Kampong Speu untuk menampung 200 orang anak-anak, dengan kelas taman kanak-kanak baru akan dibuka pada tahun 2019 dan menampilkan dinding yang terbuat dari botol plastik. Dia merasa optimis bahwa generasi muda merupakan duta lingkungan di masa yang akan datang.

"Kami berharap mereka akan menjadi aktivis baru di Kamboja, memahami penggunaan, pengelolaan, dan daur ulang limbah," ujar Vanday.

Vanday terinspirasi setelah bepergian berkeliling Kamboja dan melihat berbagai objek wisata tersumbat sampah. Merasa terganggu dengan fakta ini, dia mendirikan proyek percontohan di Phnom Penh pada tahun 2013 sebelum memperluasnya ke lokasi kedua di taman nasional.

Visi Vanday untuk Kamboja yang sadar akan sampah merupakan visi ambisius di negara Asia Tenggara tempat kantong dan botol plastik dibuang tanpa pikir panjang, banyak yang berakhir di kota-kota yang dipenuhi sampah atau membekap pantai-pantai yang dulunya sangat indah.

Kamboja mengakumulasi 3,6 juta ton limbah pada tahun 2017, demikian menurut Kementerian Lingkungan Hidup negara itu.

Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup, Neth Pheaktra, mengatakan bahwa hanya 11 persen saja sampah yang didaur ulang, sementara hampir setengahnya dibakar atau dibuang ke sungai, menyebabkan polusi yang meluas.

Sisanya diangkut dengan truk ke TPA dan lokasi pembuangan yang terus tumbuh, tempat tumpukan sampah yang mengeluarkan gas metana dapat menyebabkan kebakaran, serta menambah perubahan iklim.

Adegan-adegan suram inilah yang menginspirasi Vanday untuk mendirikan Coconut School, yang didukung oleh sumbangan dan guru sukarela, untuk anak-anak yang hanya mendapatkan sedikit pengetahuan mengenai pendidikan lingkungan di sekolah reguler milik pemerintah.

Sekolah itu juga merupakan kesempatan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu membayar program selepas jam sekolah yang telah menjadi hal yang umum dijumpai oleh sebagian besar kaum muda di seluruh Kamboja.

Pendidikan publik gratis menurut hukum, tetapi pelajaran "tambahan" untuk bahasa Inggris atau mata pelajaran ekstrakurikuler lainnya membutuhkan biaya tambahan, mulai dari 70 ribu rupiah (5 dolar A.S.) hingga ratusan dolar per kelas, tergantung pada sekolah dan lokasinya. Ini bisa menjadi investasi yang mahal di negara tempat penduduk rata-rata berpenghasilan kurang dari 19,7 juta rupiah (1.400 dolar A.S.) per tahun.

Untuk keluarga miskin di daerah terpencil, anak-anak dikirim untuk mengemis guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mampu membayar biaya kelas tambahan. Di sekolahnya, Vanday ingin mengakhiri praktik ini. Upaya ini sudah berhasil untuk beberapa murid.

"Guru bahasa Inggris saya tidak mengizinkan saya mengemis atau berjudi," ungkap mantan pengemis Sun Sreydow yang berusia 10 tahun. "Saya senang. Ketika sudah besar nanti, saya ingin menjadi dokter."

INGGRIS

Inggris bergerak untuk melarang Hezbollah

Pemerintah Inggris mengatakan pada Februari 2019 bahwa pihaknya berencana untuk menetapkan Hezbollah sebagai kelompok teroris, menuduh organisasi yang didukung Iran itu mengacaukan Timur Tengah.

Perintah yang disampaikan ke Parlemen Inggris itu melarang Hezbollah dan dua kelompok lainnya. Perintah itu mulai berlaku pada 1 Maret. Perintah itu menyatakan bahwa menjadi anggota atau mengajak untuk mendukung Hezbollah merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara. Hingga saat ini, sayap militer kelompok yang bermarkas di Lebanon itu telah dilarang di Inggris, tetapi bukan sayap politiknya.

Hezbollah adalah gerakan Muslim Syiah yang muncul pada awal tahun 1980-an dengan dukungan keuangan dari Iran. Hezbollah memperoleh kemenangan pada pemilu di Lebanon tahun lalu dan sekarang memiliki tiga menteri di pemerintahan Lebanon. A.S. dan berbagai negara lainnya menuduh kelompok itu mengganggu kestabilan kawasan itu melalui intervensi militernya di Suriah di sisi pemerintahan Presiden Bashar Assad.

Menteri Dalam Negeri Sajid Javid mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang mengancam keselamatan dan keamanan, dan dia menuduh Hezbollah telah mengganggu stabilitas Timur Tengah. "Kami tidak dapat lagi membedakan antara sayap militer mereka yang sudah dilarang dan partai politiknya," ungkap Javid. "Oleh karena itu, saya telah mengambil keputusan untuk melarang kelompok itu secara keseluruhan." The Associated Press

MESIR

Dinasti Penuh Warna

Dalam sebuah penemuan arkeologis besar, Mesir pada April 2019 mengungkap makam seorang pejabat Dinasti Kelima yang dihiasi dengan relief berwarna-warni dan prasasti yang terpelihara dengan baik.

Makam itu, di dekat Saqqara, nekropolis luas di selatan Kairo, merupakan milik seorang pejabat senior bernama Khuwy yang diyakini sebagai seorang bangsawan selama Dinasti Kelima, yang memerintah Mesir sekitar 4.300 tahun yang lalu.

"Makam Khuwy yang berbentuk L dimulai dengan sebuah koridor kecil menuju ke bawah ke dalam ruang depan dan dari sana sebuah ruang lebih besar dengan relief berwarna yang menggambarkan pemilik makam yang duduk di sebuah meja persembahan," ujar Mohamed Megahed, kepala tim penggalian, dalam pernyataan Kementerian Purbakala.

AFP/GETTY IMAGES

Diapit oleh lusinan duta besar, Menteri Purbakala Khaled al-Enani mengatakan bahwa makam itu ditemukan pada Maret 2019. Makam itu sebagian besar terbuat dari batu kapur putih. Lukisan-lukisan hiasan terbuat dari resin hijau khusus di seluruh bagiannya dan minyak yang digunakan dalam proses penguburan, demikian ungkap kementerian itu. Pernyataan itu menambahkan bahwa dinding utara makam menunjukkan bahwa desainnya terinspirasi oleh cetak biru arsitektur piramida kerajaan dinasti itu.

Tim penggalian telah menggali beberapa makam yang terkait dengan Dinasti Kelima. Baru-baru ini para arkeolog menemukan prasasti pada kolom granit yang didedikasikan untuk Ratu Setibhor, yang diyakini sebagai istri Raja Djedkare Isesis, raja kedelapan dan kedua terakhir dari dinasti tersebut. Agence France-Presse

JERMAN

PENCEGAHAN PANDEMI CEPAT

Koalisi yang berusaha untuk mengatasi pandemi berikutnya telah menyetujui kesepakatan senilai 476,9 miliar rupiah (34 juta dolar A.S.) dengan perusahaan bioteknologi Jerman CureVac untuk mengembangkan teknologi "pencetakan" vaksin yang bertujuan untuk menghasilkan vaksin dengan cepat guna melawan berbagai penyakit.

Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) mengatakan bahwa dukungannya akan membantu pekerjaan CureVac dalam membuat prototipe produk Printer RNA-nya — fasilitas pencetakan otomatis yang dapat dibawa-bawa untuk jenis molekul yang dikenal sebagai RNA pengirim pesan.

Sementara vaksin tradisional menggunakan bagian patogen hidup atau tidak aktif untuk menghasilkan respons kekebalan, teknologi baru yang sedang dikembangkan menggunakan molekul mRNA untuk mengangkut informasi genetik dari DNA ke dalam sel, memerintahkannya untuk menghasilkan protein atau antigen spesifik untuk mendorong respons kekebalan.

Epidemi penyakit menular seperti Ebola, Zika, dan Lassa bisa tidak dapat diprediksi dan bergerak cepat, namun pengembangan vaksin terhadap penyakit itu saat ini dapat memakan waktu 10 tahun atau lebih.

CEPI, yang didirikan pada awal tahun 2017, bertujuan untuk mempercepat secara dramatis pengembangan vaksin terhadap patogen ini, serta penyakit baru dan tidak dikenal — secara kolektif dikenal sebagai Penyakit X.

Di bawah kesepakatan selama tiga tahun dengan CEPI, CureVac akan menggunakan platform mRNA-nya untuk mengembangkan vaksin potensial terhadap demam Lassa, rabies, dan demam kuning.

Jika uji praklinis untuk ketiga penyakit tersebut berhasil, dua kandidat vaksin akan dikembangkan melalui uji keselamatan tahap awal pada manusia. Reuters

Menjelajahi Kedalaman

PARA ILMUWAN MENDOKUMENTASIKAN PERUBAHAN BAWAH AIR DI PERAIRAN SEYCHELLES

KISAH DAN FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

Misi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjelajahi Samudra Hindia dan mencatat perubahan yang terjadi di bawah ombak memulai penelitiannya pada Maret 2019 di perairan Seychelles.

Misi Nekton yang dipimpin Inggris tiba di pesisir atol kecil Alphonse pada dini hari, setelah cuaca buruk yang membayanginya memaksa dilakukannya perubahan rencana dan rute.

Ekspedisi ambisius itu akan menyelidiki salah satu bidang penelitian utama yang belum dijelajahi di planet ini, perairan luas yang sudah merasakan dampak perubahan iklim. Memahami ekosistem Samudra Hindia merupakan hal penting tidak hanya bagi spesies yang hidup di dalamnya, tetapi juga bagi sekitar 2,5 miliar orang yang mendiami kawasan ini — dari Afrika Timur hingga Semenanjung Arab, anak benua India, dan Asia Tenggara.

Meskipun misi itu pada akhirnya menggunakan kapal selam berteknologi tinggi, penelitian itu dimulai dengan peralatan yang lebih sederhana: perangkat untuk mengukur kimia air dan jaring yang digunakan untuk mengambil zooplankton.

"Ketika Anda benar-benar akhirnya mulai melakukan sains, rasanya sedikit melegakan dan menyenangkan," ujar Louise Allcock, seorang profesor zoologi di University of Ireland di Galway.

Alphonse merupakan atol kecil, ujung gunung yang tenggelam, 232 mil laut barat daya ibu kota Seychelles, Victoria. Dalam beberapa kilometer dari pantainya, samudranya memiliki kedalaman hingga 5.000 meter.

Sedikit yang diketahui tentang keanekaragaman hayati Atol Alphonse karena masih belum dijelajahi di luar kedalaman scuba.

Anggota misi Stephanie Marie, seorang peneliti kelautan dari Seychelles, baru-baru ini menghabiskan waktu satu minggu di Alphonse mengerjakan studi tentang spesies ikan yang disebut Giant Trevally, atau GT. Dia mengatakan bahwa dia merasa antusias untuk mencari tahu apa yang ada di bawah sana.

"Ketika cuacanya luar biasa, banyak hal yang bisa dilihat, seperti ikan hiu, GT, dan karang, jadi seperti tempat yang berbeda, pemandangan yang berbeda setiap waktu," tuturnya.

Peran Marie adalah mengumpulkan zooplankton untuk melakukan identifikasi taksonomi.

"Saya merasa sangat antusias. Pengalaman itu akan membuka wawasan baru karena saya belum pernah melihat sedalam ini," ujarnya. "Penelitian itu sangat penting. Ikan memakan zooplankton, jadi kita perlu melihat kualitasnya, karena jika ekosistem berubah, hal itu mungkin berdampak pada ikan yang kita makan."

Misi itu berharap untuk menemukan spesies baru, serta mendokumentasikan bukti perubahan iklim dan polusi yang disebabkan manusia.

Data itu akan digunakan untuk membantu Seychelles mengonsolidasikan dan memperluas kebijakannya dalam melindungi hampir sepertiga perairan nasionalnya paling lambat tahun 2020. Area laut yang akan dilindungi lebih besar dari Jerman. Prakarsa itu merupakan komponen kunci dari "ekonomi biru" Seychelles, yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan lingkungan samudra.

Sebuah kapal selam berawak naik ke permukaan setelah misi yang gagal menemukan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh di Samudra Hindia.

MEDITASI GAGAH BERANI

Prajurit Angkatan Bersenjata Singapura bersiap untuk keluar dari kendaraan serbu amfibi selama latihan Valiant Mark di Pusat Pertempuran Darat Udara Pasukan Marinir di Twentynine Palms, California, A.S. pada 11 September 2018. Angkatan Bersenjata Singapura dan Pasukan Marinir A.S. melaksanakan latihan Valiant Mark setiap tahun untuk memperkuat hubungan militer-ke-militer melalui pelatihan integrasi persenjataan gabungan.

Foto Dari: **KOPRAL DUA RHITA DANIEL** | PASUKAN MARINIR A.S.

SASARAN PASTI

Komando anti-teror Indonesia ambil bagian dalam latihan bersama di Jakarta pada 9 April 2019. Para peserta meliputi pasukan operasi khusus kontraterorisme dari Angkatan Udara Indonesia, yang dikenal sebagai Paskhas; Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia, yang dikenal sebagai Kopassus; dan pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia, yang dikenal sebagai Denjaka. Latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan militer Indonesia untuk mengamankan negara itu menjelang pemilihan umum pada 17 April 2019.

Foto Dari: **ADEK BERRY** | AFP/GETTY IMAGES

RELEVAN. BERWAWASAN. ONLINE.

www.ipdefenseforum.com

ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI!

BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA

Indo-Pacific Defense FORUM adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi siapa pun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Pasifik.

UNTUK BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA:

www.ipdefenseforum.com/subscribe

surat: *IPD FORUM* Program Manager
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

MOHON SERTAKAN:

- Nama
- Pekerjaan
- Gelar atau jabatan
- Alamat surat
- Alamat email

Mari bergabung dengan kami di Facebook dan Twitter.